BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Sumatera Utara

AGUSTUS 2026

LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Sumatera Utara

AGUSTUS
2026

VISI
Bank Indonesia

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju.

MISI
Bank Indonesia

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

VISI
Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dalam mendukung Kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

MISI
Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dan kehandalan Sistem Pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun **Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Utara Periode Agustus 2026.** Laporan ini menyajikan evaluasi kinerja perekonomian Sumatera Utara triwulan II 2026 serta prospek untuk keseluruhan tahun 2026. Publikasi laporan ini sekaligus menjadi bagian dari visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia untuk berkontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah.

Pertama, perekonomian Sumatera Utara pada triwulan II 2026 mencatatkan pertumbuhan yang semakin menguat. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang oleh solidnya konsumsi rumah tangga yang didorong oleh terjaganya daya beli, efektivitas stimulus fiskal (seperti program Asta Cita dan Makan Bergizi Gratis), serta peningkatan mobilitas masyarakat seiring penyelenggaraan berbagai event strategis regional dan nasional seperti Piala AFF, forum IMT-GT, dan Rakernas APEKSI. Konsumsi pemerintah meningkat sejalan dengan perbaikan kualitas belanja dan optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD), sementara investasi terkerek oleh percepatan pembangunan infrastruktur strategis, hunian pascabencana, serta ekspansi KEK Sei Mangkei. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan didorong oleh akselerasi sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum. Di sisi lain, kinerja ekspor nonmigas tetap menunjukkan pertumbuhan positif yang ditopang oleh tingginya permintaan global terhadap minyak kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya.

Kedua, tekanan inflasi Sumatera Utara tetap dikelola secara konsisten dalam koridor sasaran nasional. Keberhasilan menjaga stabilitas harga didukung oleh eratnya sinergi antara Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), operasi pasar, serta optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) guna memitigasi risiko volatilitas harga pangan dan tekanan biaya produksi.

Memasuki keseluruhan tahun 2026, perekonomian Sumatera Utara diprakirakan tumbuh lebih kuat dalam kisaran 4,9–5,7% (yoy). Pertumbuhan ini akan terus didorong oleh ketahanan permintaan domestik, stabilitas kinerja ekspor, serta kelanjutan berbagai kebijakan dan proyek strategis pemerintah. Inflasi tahun 2026 dipetakan tetap terjaga dalam sasaran 2,5 ± 1%. Meski demikian, tingginya ketidakpastian perekonomian global—termasuk dinamika geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia—menuntut kewaspadaan dan penguatan respons bauran kebijakan.

Akhir kata, kami berharap laporan ini tidak hanya menjadi rujukan yang bermanfaat, tetapi juga turut memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Sumatera Utara yang lebih baik ke depan. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi, antara lain Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi, serta instansi vertikal lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga saran, masukan, serta dukungan data dari pembaca sekalian senantiasa kami harapkan guna meningkatkan kualitas publikasi ke depan.

Medan, Agustus 2026
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ttd

Ameriza M. Moesa

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Tabel	xix
Ringkasan Eksekutif	x
Tabel Indikator	xvi

01 Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

1.1	Pertumbuhan Ekonomi Global	2
1.2	Pertumbuhan Ekonomi Nasional	2
1.3	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Menunjukkan Peningkatan	3
1.4	Kinerja Komponen Pengeluaran Mayoritas Mengalami Peningkatan	4
1.5	Kinerja Lapangan Usaha Menunjukan Perbaikan	13
Boks 1	*SUMATRA INVEST DAY* 2026 : Upaya Akselerasi Investasi Sumatera	21

02 Perkembangan Inflasi Daerah

2.1	Kinerja Inflasi Triwulan II 2026	26
2.2	Andil Inflasi Berdasarkan Kelompok	27
2.3	Inflasi Spasial	28
2.4	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	35
Boks 2	El Nino dan Risiko Inflasi Sumatera Utara: Pentingnya Menjaga Keseimbangan Pasokan Pangan Antarwilayah	38
Boks 3	Perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD) Bottom Up Hortikultura Ke Wilayah Kalimantan: Perkuat Stabilitas Pangan Antarwilayah	43

03 Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan, Serta UMKM

3.1	Pembiayaan Daerah	48
3.2	Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	57
Boks 4	Strategi Perluasan Akses Pasar UMKM Melalui Penyelenggaraan Karya Kreatif Sumatera Utara (KKSU) 2026	60

04 Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

4.1	Sistem Pembayaran Menguat	64
4.2	Upaya Perluasan Elektronifikasi Sistem Pembayaran Terus Dilaksanakan	66
4.3	Aliran Uang Kartal Mengalami Net Inflow	68
4.4	Aliran Transfer Dana Lintas Negara mengalami peningkatan	68
Boks 5	Implementasi Inovasi *Split Payment System* Pada Pajak Daerah dengan Skema Insentif Pengurangan Pajak Untuk Peningkatan PAD di Kabupaten Deli Serdang	70

05
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

5.1 Ketenagakerjaan 76
5.2 Kesejahteraan 78

06
Prospek Perekonomian Daerah

6.1 Prospek Perekonomian Global 86
6.2 Prospek Perekonomian Nasional 86
6.3 Prospek Perekonomian Sumatera Utara 86
6.4 Rekomendasi 92

Daftar Grafik

01

Grafik 1.1. Perkembangan PDRB dan PDB Triwulan 4
Grafik 1.2. Nominal Transaksi *E-Commerce* di Sumatera Utara 5
Grafik 1.3. Survei Penjualan Eceran 5
Grafik 1.4. Konsumsi Listrik Rumah Tangga 5
Grafik 1.5. Survei Konsumen 5
Grafik 1.6. Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Kerja 6
Grafik 1.7. Indeks Konsumsi Barang Tahan Lama 6
Grafik 1.8. Kredit Rumah Tangga 6
Grafik 1.9. DPK Pemerintah dan Pemda 8
Grafik 1.10. Konsumsi Listrik Kantor Pemerintah 8
Grafik 1.11. Pengadaan Semen 9
Grafik 1.12. Kredit Modal Kerja 9
Grafik 1.13. Realisasi Investasi 9
Grafik 1.14. Pangsa PMDN dan PMA Berdasarkan Sektor Triwulan II 2026 9
Grafik 1.15. Survei Liaison 9
Grafik 1.16. Nilai dan Volume Ekspor 11
Grafik 1.17. Pertumbuhan Harga Komoditas di Pasar Global 11
Grafik 1.18. Negara Tujuan Utama Ekspor 11
Grafik 1.19. Indeks PMI 11
Grafik 1.20. Pangsa Komoditas 12
Grafik 1.21. Ekspor CPO 12
Grafik 1.22. Ekspor Karet 12
Grafik 1.23. Total Kunjungan Wisatawan Mancanegara 12
Grafik 1.24. *Likert Scale* Permintaan Ekspor 12
Grafik 1.25. Nilai dan Volume Impor 13
Grafik 1.26. Pangsa Impor Berdasarkan Kelompok Barang 13
Grafik 1.27. Nilai Impor Berdasarkan Kelompok Barang 13
Grafik 1.28. Perkembangan Produksi Padi 14
Grafik 1.29. Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 14
Grafik 1.30. Perkembangan Harga Kelapa Sawit (CPO) dan Karet Dunia 15
Grafik 1.31. Nilai Tukar Petani 15
Grafik 1.32. Kredit Pertanian 15
Grafik 1.33. Konsumsi Listrik Bisnis dan Industri 16
Grafik 1.34. Kredit Industri Pengolahan 16
Grafik 1.35. Nilai Proyek BCI Asia 16
Grafik 1.36. Pertumbuhan Kredit di sektor Konstruksi 17
Grafik 1.37. Penambahan Pagu APBN Belanja Pemerintah Regional Sumut Juni 2026 17
Grafik 1.38. Survei Penjualan Eceran 18
Grafik 1.39. *Likert Scale* Permintaan Ekspor 18

Grafik 1.40 Kredit Perdagangan 19
Grafik 1.41 Pertumbuhan Kredit Konsumsi 19
Grafik 1.42 Aktivitas Bongkar Muat Barang Luar Negeri di Pelabuhan Belawan 20
Grafik 1.43 Penumpang Angkutan Udara Kualanamu 20
Grafik 1.44 Perkembangan Kunjungan Kapal 20

02

Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional 26
Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Provinsi Sumatera Utara dan Daerah Lainnya 26
Grafik 2.3 Distribusi Andil Inflasi per Kelompok 27
Grafik 2.4 Inflasi Kota Gunungsitoli per Kelompok 29
Grafik 2.5 Inflasi Kabupaten Labuhanbatu per Kelompok 29
Grafik 2.6 Inflasi Kota Sibolga per Kelompok 30
Grafik 2.7 Inflasi Kota Pematangsiantar per Kelompok 31
Grafik 2.8 Inflasi Kabupaten Deli Serdang per Kelompok 31
Grafik 2.9 Inflasi Kota Padangsidimpuan per Kelompok 32
Grafik 2.10 Inflasi Kota Medan per Kelompok 32
Grafik 2.11 Inflasi Kabupaten Karo per Kelompok 33

03

Grafik 3.1 Perkembangan Kredit dan NPL Sumatera Utara 48
Grafik 3.2 Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenis Usaha Bank 49
Grafik 3.3 Perkembangan Kredit Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Penggunaan 49
Grafik 3.4 Pangsa Kredit Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Penggunaan 49
Grafik 3.5 *Likert Scale* Permintaan Domestik dan Permintaan Ekspor – Liaison Bank Indonesia 49
Grafik 3.6 Perkembangan Kredit Sektoral 50
Grafik 3.7 Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Penggunaan 51
Kredit 51
Grafik 3.8 Perkembangan Loan at Risk di Sumatera Utara 51
Grafik 3.9 Perkembangan Suku Bunga Kredit, Suku Bunga DPK, dan BI-Rate 52
Grafik 3.10 Pertumbuhan Kredit Korporasi 52
Grafik 3.11 Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan 52
Grafik 3.12 Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha

Grafik 3.13 NPL Kredit Korporasi 52
Grafik 3.14 Proporsi DPK Sumatera Utara Berdasarkan Pemilik 53
Grafik 3.15 Pertumbuhan DPK Berdasarkan Kelompok Deposan 53
Grafik 3.16 Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia Sumatera Utara: Indeks Ekspektasi 54
Grafik 3.17 Hasil Survei Perkembangan Harga Properti Residensial Primer Sumatera Utara 54
Grafik 3.18 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Sektor Rumah Tangga di Sumatera Utara 54
Grafik 3.19 Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga 55
Grafik 3.20 NPL Kredit Rumah Tangga 56
Grafik 3.21 Perkembangan Kredit Berdasarkan Segmen UMKM 57
Grafik 3.22 Pertumbuhan Kredit UMKM 57
Grafik 3.23 Rasio Kredit UMKM di Sumatera Utara 58
Grafik 3.24 Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi 58
Grafik 3.25 Perkembangan NPL Kredit UMKM 59

04

Grafik 4.1 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM Debit, Kartu Kredit, dan UE 64
Grafik 4.2 Perkembangan Volume Transaksi Kartu ATM/Debit, Kartu Kredit, dan UE 64
Grafik 4.3 Alokasi Penggunaan Kartu ATM/Debit 64
Grafik 4.4 Alokasi Penggunaan Kartu Kredit 64
Grafik 4.5 Alokasi Penggunaan Uang Elektronik 65
Grafik 4.6 Pangsa Instrumen Pembayaran *e-commerce* 65
Grafik 4.7 Perkembangan Transaksi *E-Commerce* 65
Grafik 4.8 Perkembangan RTGS 65
Grafik 4.9 Perkembangan SKNBI 66
Grafik 4.10 Perkembangan Bantuan Sosial - Sembako 66
Grafik 4.11 Perkembangan PKH 66
Grafik 4.12 Perkembangan QRIS 67
Grafik 4.13 Perkembangan QRIS 67
Grafik 4.14 Perkembangan *Inflow - Outflow* 68
Grafik 4.15 Perkembangan Transaksi KUPVA BB 68
Grafik 4.16 Perkembangan Transaksi KUPVA BB 69
Grafik 4.17 Perkembangan Transaksi PJP-LR 69

05

Grafik 5.1	Tingkat Pengangguran Menurut Daerah Tempat Tinggal	76
Grafik 5.2	TPT Menurut Jenjang Pendidikan	76
Grafik 5.3	Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Februari 2026	77
Grafik 5.4	Pangsa Pekerja Berdasarkan Lapangan Usaha	77
Grafik 5.5	Tingkat Upah Rill vs Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara	78
Grafik 5.6	Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara	78
Grafik 5.7	Tingkat Kemiskinan Kab/Kota Sumut Maret 2026	79
Grafik 5.8	Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan	79
Grafik 5.9	Perkembangan Rasio Gini	80
Grafik 5.10	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perkotaan	80
Grafik 5.11	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perdesaan	81
Grafik 5.12	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perkotaan	81
Grafik 5.13	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perdesaan	81
Grafik 5.14	Perkembangan Nilai Tukar Petani	82
Grafik 5.15	IT dan IB Sumatera Utara	82
Grafik 5.16	Perkembangan IPM Sumatera Utara dan Nasional	83

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran Provinsi Sumatera Utara	4
Tabel 1.2	Postur APBD se-Provinsi Sumatera Utara	7
Tabel 1.3	Postur APBN se-Sumatera Utara	7
Tabel 1.4	Target Operasional Pelaku Usaha KEK Sei Mangkei	8
Tabel 1.5	Pertumbuhan PDRB Sisi Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara	14
Tabel 2.1	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan Triwulan II 2026	27
Tabel 2.2	Perkembangan Inflasi Kota IHK Sumatera Utara, Sumatera, dan Nasional	28
Tabel 2.3	Inflasi di Kota IHK Sumatera Utara Triwulan II 2026	34
Tabel 2.4	Komoditas Penyumbang Inflasi Kota dan Kabupaten Sampel	34
Tabel 3.1	Perkembangan Kredit Sumatera Utara Berdasarkan Kabupaten/ Kota	50
Tabel 3.2	Pertumbuhan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah	55
Tabel 3.3	Pertumbuhan Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor	56
Tabel 5.1	Klasifikasi Penduduk Bekerja (Pekerja Penuh/Tidak Penuh)	76
Tabel 5.2	IPM Sumatera Utara Menurut Komponen	83
Tabel 6.1	Faktor Pendorong dan Penahan Perekonomian Sumatera Utara Tahun 2026	87
Tabel 6.2	Faktor Pendorong dan Penahan Inflasi Sumatera Utara Tahun 2026	92

Ringkasan Eksekutif

Agustus 2026

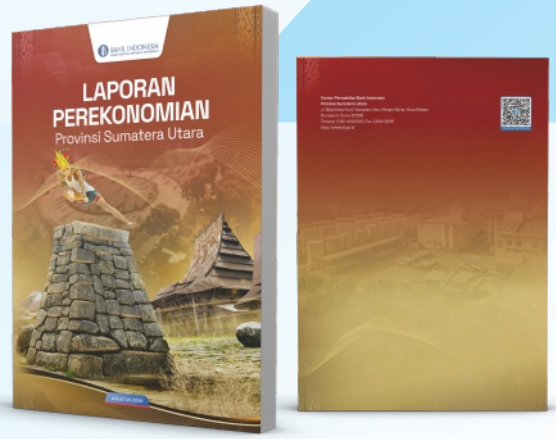

Asesmen Makro Ekonomi Regional

Di tengah ketidakpastian perekonomian global dan pengetatan kebijakan moneter internasional, perekonomian domestik pada triwulan II 2026 tetap terjaga melalui penguatan permintaan domestik, percepatan realisasi program prioritas pemerintah, serta sinergi bauran kebijakan fiskal dan moneter. Berdasarkan kondisi makroekonomi tersebut, perkembangan perekonomian di Sumatera Utara menunjukkan ketahanan yang ditopang oleh kinerja positif sektor-sektor utama, termasuk industri pengolahan CPO, sektor konstruksi, dan kinerja ekspor komoditas unggulan di tengah dinamika global.

Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,06% (yoy) lebih tinggi dari triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 4,98% (yoy). Dari sisi pengeluaran, penguatan ekonomi didorong oleh akselerasi konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga (RT) dan investasi (PMTB). Sementara dari sisi net ekspor mengalami pelemahan terutama karena tingginya pertumbuhan impor. Akselerasi konsumsi pemerintah melonjak seiring meningkatnya realisasi belanja pegawai dan belanja barang-jasa, pembayaran gaji ke-13, pengangkatan ASN baru, serta percepatan pembayaran gaji tenaga pendidik. Kondisi ini turut menopang konsumsi RT yang tumbuh berbasis kebutuhan esensial akibat keterbatasan ekspektasi pendapatan, serta mobilitas dan pariwisata selama libur panjang. Kinerja ekspor menguat dipicu oleh peningkatan pengapalan CPO dan turunannya, karet, produk olahan laut, aluminium, serta lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara. Sementara itu, investasi (PMTB) meningkat ditopang oleh percepatan proyek infrastruktur strategis, pengembangan kawasan industri, serta pembangunan infrastruktur. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi tertahan oleh tingginya impor bahan baku.

Dari sisi lapangan usaha (LU), penguatan pertumbuhan terutama ditopang oleh kinerja LU Pertanian, Industri Pengolahan, dan Konstruksi. Pertumbuhan LU Pertanian didukung oleh pemulihan lahan pascabencana untuk perkebunan, faktor musiman, dan penguatan harga komoditas perkebunan, khususnya sawit dan karet, sementara produksi padi masih tertahan. LU Industri Pengolahan juga menguat sejalan dengan peningkatan ekspor CPO dan produk turunannya, permintaan mitra dagang, konsumsi listrik industri, akselerasi kredit industri.. Lebih lanjut, kinerja LU konstruksi membaik didorong oleh peningkatan belanja modal pemerintah, pembangunan JTTS dan BRT Mebidang, rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana, serta pembangunan *tenant* di KEK dan KI.

Di sisi lain, walaupun LU Perdagangan dan LU Transgud tetap tumbuh tinggi, kedua LU tersebut sedikit termoderasi pada triwulan laporan. Perlambatan kinerja LU Perdagangan disebabkan berakhirnya momentum Ramadan–Idulfitri dan moderasi daya beli. Namun perbaikan perdagangan eksternal, penguatan distribusi, peningkatan transaksi *e-commerce,* serta terjaganya konsumsi masyarakat menjaga kinerja LU Perdagangan tetap

tumbuh tinggi. Sementara itu, LU Transportasi dan Pergudangan melambat seiring normalisasi mobilitas dan aktivitas logistik pasca puncak HBKN Idulfitri, meskipun volume penumpang udara masih relatif tinggi dan penumpang laut tumbuh positif secara yoy. Dengan demikian, struktur pertumbuhan LU pada triwulan II 2026 mencerminkan penguatan aktivitas produksi dan investasi yang diimbangi normalisasi konsumsi dan mobilitas, dengan dukungan pembiayaan perbankan yang semakin kuat pada sektor-sektor utama.

Asesmen Inflasi

Inflasi Sumatera Utara pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 4,79% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,86% (yoy) serta berada di atas inflasi Nasional sebesar 3,34% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh meningkatnya mobilisasi dan permintaan masyarakat menjelang dan selama libur sekolah Juni 2026. Selain itu, penyesuaian harga BBM jenis Pertamax pada 10 Juni 2026 turut memberikan kontribusi terhadap tingginya inflasi, khususnya pada komoditas bensin. Di sisi lain, ketidakpastian geopolitik global mendorong peningkatan preferensi investor terhadap aset safe haven, yang meningkatkan permintaan emas dan berimbas pada kenaikan harga emas global.

Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta Kelompok Transportasi. Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau didorong oleh berakhirnya masa panen raya komoditas cabai merah dan cabai rawit, masih berlangsungnya masa tanam komoditas beras, dan perubahan harga Gabah Kering Giling (GKG). Sejalan dengan peningkatan harga emas dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global, harga emas perhiasan menjadi penyumbang utama inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Penyesuaian harga BBM Pertamax dan tingginya permintaan angkutan udara menjelang dan selama libur sekolah Juni 2026 turut menekan inflasi Kelompok Transportasi.

Secara spasial, wilayah di Sumatera Utara yang mengalami inflasi tertinggi, yaitu Kota Gunungsitoli (6,25%, yoy), Kabupaten Labuhanbatu (5,81% yoy), dan Kota Sibolga (5,79%, yoy). Inflasi terendah tercatat di Kabupaten Karo (4,47%, yoy). Mayoritas Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara mengalami inflasi yang disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Guna menahan laju inflasi lebih tinggi pada triwulan laporan, koordinasi TPID yang semakin baik dilakukan melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), seperti: (i) pelaksanaan pasar murah 4T (tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat komoditas); (ii) perluasan jangkauan distribusi barang, termasuk pelaksanaan sidak pasar yang masif; (iii) dukungan terhadap peningkatan produksi; (iv) dorongan prioritisasi pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara melalui KAD, serta (v) perluasan kemitraan UMKM dan SPPG dalam menjaga ketersediaan pasokan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan diversifikasi menu.

Asesmen Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan, Serta UMKM

Kinerja pembiayaan Sumatera Utara pada triwulan II 2026 menunjukkan kondisi yang tetap resilien di tengah proses pemulihan aktivitas ekonomi yang masih berlangsung pascabencana akhir tahun 2025. Fungsi intermediasi perbankan mengalami peningkatan, tecermin dari akselerasi pertumbuhan kredit menjadi 7,69% (yoy), terutama didorong oleh percepatan kredit modal kerja dan pertumbuhan kredit investasi yang tetap tinggi. Perkembangan tersebut mengindikasikan meningkatnya permintaan pembiayaan produktif seiring dengan penguatan aktivitas ekonomi di Sumatera Utara. Di sisi lain, risiko kredit tetap terkendali, tecermin dari rasio NPL sebesar 1,91%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 2,1%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran pembiayaan tetap diikuti dengan kualitas kredit yang terjaga.

Secara keseluruhan, akselerasi pembiayaan yang disertai dengan risiko kredit yang tetap terkendali mencerminkan terjaganya ketahanan sistem keuangan di Sumatera Utara. Kondisi ini turut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya pembiayaan bagi dunia usaha dan rumah tangga, khususnya untuk mendorong aktivitas produksi, investasi, dan konsumsi di tengah proses pemulihan ekonomi pascabencana.

Ke depan, prospek pembiayaan perbankan Sumatera Utara diperkirakan terus meningkat seiring dengan semakin stabilnya aktivitas ekonomi pascabencana dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk mendukung berbagai program strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan risiko kredit yang tetap terkendali, peningkatan kapasitas intermediasi perbankan diharapkan dapat terus memperkuat pemulihan dan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ke depan.

Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Secara umum, transaksi sistem pembayaran non-tunai di triwulan II 2026 tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif. Secara agregat, pertumbuhan kartu ATM/Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik tercatat menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,59% (yoy) dari sisi nominal dan sebesar 6,86% (yoy) dari sisi volume. Selain APMK, inovasi pembayaran berbasis QRIS semakin diterima luas oleh masyarakat, ditunjukkan oleh pertumbuhan volume transaksi QRIS yang tumbuh sebesar 90,5% (yoy), sejalan dengan peningkatan nominal transaksi QRIS yang juga tumbuh sebesar 82% (yoy). Perluasan akseptasi QRIS juga ditunjukkan melalui jumlah pengguna QRIS yang tumbuh sebesar 11,5% (yoy) dan sejalan dengan jumlah merchant QRIS yang juga tumbuh sebesar 18,3% (yoy). Peningkatan ini menunjukkan bahwa akseptasi QRIS di Sumatera Utara terus meluas, baik dari sisi masyarakat sebagai pengguna maupun pelaku usaha sebagai penyedia kanal pembayaran digital. Sementara itu, ekosistem pasar valuta asing domestik juga mencatat kinerja positif, yang tecermin dari pertumbuhan transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) sebesar 75% (yoy) dan transaksi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) sebesar 25% (yoy). Seiring dengan semakin menguatnya digitalisasi sistem pembayaran di Sumatera Utara, kinerja penerimaan daerah juga menunjukkan tren yang positif. Kondisi tersebut tecermin dari realisasi PAD total Sumatera Utara yang meningkat di tahun 2026 sebesar Rp16 triliun, dengan porsi transaksi melalui kanal non tunai mencapai 88,4% yang menunjukkan tingginya adopsi transaksi digital dalam pengelolaan penerimaan daerah. Untuk mengakselerasi digitalisasi penerimaan daerah, telah dikembangkan inovasi split payment pajak untuk Hotel, Restoran, dan Kafe (HOREKA) untuk meningkatkan transparansi dan optimalisasi PAD. Selain itu, implementasi split payment pajak didorong dengan adanya insentif pada merchant dan konsumen.

Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Utara pada Mei 2026 berada pada level yang lebih rendah dibandingkan Februari 2026. Hal ini ditandai dengan menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sejalan dengan meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT mengalami peningkatan bersamaan dengan kesenjangan urban dan rural. Masih terdapat ketimpangan antara upah riil dan upah nominal yang cenderung melebar pasca COVID 19.

Kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara secara umum tetap terjaga, tecermin dari penurunan kemiskinan yang disertai peningkatan NTP serta penurunan Rasio Gini yang menunjukkan distribusi hasil pembangunan semakin merata. Secara historis, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara terus menunjukkan tren penurunan. Pada periode terbaru, Maret 2026, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 1,11 juta jiwa atau 7,10% dari total populasi atau menurun dibanding dibandingkan September 2025 yang sebesar 7,24% atau sekitar 1,13 juta jiwa. Penurunan tingkat kemiskinan terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan. Lebih lanjut, kesejahteraan petani mengalami peningkatan tecermin dari Nilai Tukar Petani yang meningkat pada triwulan II 2026 dibandingkan triwulan I 2026. Ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara tetap berada dalam kondisi yang relatif terjaga, tecermin dari nilai Rasio Gini yang masih lebih rendah dibandingkan Nasional. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut memperkuat kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Sumatera Utara pada 2026 diprakirakan tumbuh lebih kuat dalam kisaran 4,9–5,7% (yoy), ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang solid, peningkatan kualitas belanja pemerintah melalui optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD) dan pemulihan pascabencana, serta PMTB yang menguat didorong ekspansi KEK Sei Mangkei dan proyek infrastruktur strategis. Kinerja ekspor diproyeksikan tetap tinggi seiring kuatnya permintaan global terhadap CPO dan produk turunannya, sementara dari sisi sektoral pertumbuhan didorong oleh akselerasi industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, transportasi, serta pertanian melalui program swasembada pangan.

Inflasi tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam sasaran 2,5±1% berkat sinergi erat TPID dan implementasi GPIPS untuk mengendalikan harga *volatile food.* Di tengah tingginya ketidakpastian global, perlambatan ekonomi dunia, serta dinamika geopolitik, Sumatera Utara perlu memperkuat sinergi dan implementasi strategi pembangunan guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Tabel Indikator

	2024					2025					2026	
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
PDRB (%yoy)	4,88	4,95	5,20	5,10	5,03	4,67	4,69	4,55	4,23	4,53	4,98	5,06
Pengeluaran												
Konsumsi Rumah Tangga	5,54	5,45	5,47	5,26	5,43	5,29	4,95	4,69	4,05	4,74	5,03	5,10
Konsumsi LNPRT	17,69	8,20	12,11	10,37	11,79	-0,92	6,34	-0,58	8,49	3,36	11,24	6,05
Konsumsi Pemerintah	2,04	1,61	4,67	7,53	4,01	3,39	-4,76	1,91	0,68	0,14	9,82	14,17
PMTB	4,38	4,40	5,23	5,73	4,95	1,23	0,9	0,58	-0,40	0,56	3,61	5,45
Ekspor	8,86	11,57	11,04	12,62	11,22	14,04	9,94	9,05	8,30	10,24	2,67	7,39
Impor	10,54	13,62	13,88	9,65	12,12	5,13	3,37	3,18	3,35	3,73	4,92	11,68

Sumber: BPS

	2024					2025					2026	
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
PDRB (%yoy)	4,88	4,95	5,20	5,10	5,03	4,67	4,69	4,55	4,23	4,53	4,98	5,06
Lapangan Usaha												
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,42	3,71	3,43	4,32	3,72	4,70	7,15	6,99	0,71	4,88	0,41	1,10
Pertambangan dan Penggalian	3,91	5,25	4,03	2,96	4,03	1,22	-0,04	1,45	4,12	1,70	4,60	5,83
Industri Pengolahan	3,72	4,44	5,60	4,84	4,66	4,46	3,70	4,04	1,78	3,49	1,53	1,96
Pengadaan Listrik, Gas	3,22	2,83	3,18	1,44	2,66	2,83	3,41	5,35	1,59	3,31	-2,60	5,44
Pengadaan Air	3,10	2,90	2,16	2,15	2,57	2,08	6,52	8,32	7,61	6,16	-0,02	2,26
Konstruksi	6,42	6,47	6,44	6,71	6,52	0,87	0,02	0,01	-0,91	-0,02	3,81	6,78
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,42	5,27	4,81	2,37	4,44	4,32	4,88	5,01	10,29	6,15	10,63	10,06
Transportasi dan Pergudangan	7,52	5,74	5,53	6,60	6,33	12,13	12,83	9,35	8,86	10,74	8,52	6,91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,63	9,75	12,65	13,74	11,98	6,42	5,14	-2,55	8,50	4,37	18,62	17,43
Informasi dan Komunikasi	7,85	6,71	7,52	7,54	7,41	5,29	6,08	6,36	8,24	6,52	11,35	6,96
Jasa Keuangan	4,27	6,06	1,95	3,29	3,87	3,26	0,54	3,20	5,42	3,10	4,28	4,71
Real Estate	3,03	3,33	7,99	5,31	5,41	5,45	5,29	10,69	12,95	8,64	8,79	2,05
Jasa Perusahaan	3,75	3,48	4,69	10,10	5,12	10,27	8,47	9,59	13,42	10,45	9,95	10,70
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,80	4,77	5,41	4,82	6,08	9,85	-1,51	-8,27	-2,12	-0,60	0,10	5,04
Jasa Pendidikan	7,36	5,15	5,59	5,61	5,66	4,06	4,32	3,27	5,00	4,16	5,97	5,78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,69	5,49	8,05	8,53	5,12	6,63	4,59	8,84	12,99	8,34	7,78	5,36
Jasa lainnya	4,15	5,19	5,20	5,10	6,54	5,36	4,34	-1,21	5,20	3,36	14,91	10,57

Sumber: BPS

Inflasi	2024					2025					2026	
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
LAJU INFLASI TAHUNAN (%YOY)												
Sumatera Utara	3,67	3,35	1,40	2,12	2,12	0,69	1,25	5,32	4,66	4,66	3,86	4,79
Medan	3,62	3,31	1,74	2,12	2,12	0,38	1,02	4,44	4,36	4,36	4,17	4,65
Sibolga	4,28	3,75	1,39	2,94	2,94	0,50	1,02	4,83	5,62	5,62	5,80	5,79
Pematangsiantar	3,84	3,35	2,45	2,86	2,86	2,18	3,15	5,84	5,37	5,37	4,60	5,26
Padangsidimpuan	4,10	4,13	1,35	2,46	2,46	1,05	1,68	5,37	5,46	5,46	4,25	4,69
Gunung Sitoli	3,90	3,48	2,25	3,10	3,10	1,97	2,74	5,50	10,84	10,84	6,30	6,25
Karo	4,88	3,81	0,04	1,33	1,33	0,27	0,48	5,18	3,15	3,15	3,01	4,46
Deli Serdang	2,89	3,37	0,88	1,80	1,80	1,24	1,45	6,81	1,72	1,72	3,04	4,73
Labuhanbatu	5,87	3,18	1,23	3,36	3,36	0,16	1,43	6,38	2,14	2,14	3,87	5,81
Nasional	3,05	2,51	1,84	1,57	1,57	1,03	1,87	2,65	2,92	2,92	3,48	3,34

SSK	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)	320,69	324,11	324,70	322,65	329,27	328,86	336,87	332,39	344,34	343,62
Giro	55,82	57,08	55,04	50,81	52,98	55,79	60,23	55,91	65,18	64,29
Tabungan	137,71	139,59	141,89	141,41	142,10	146,80	148,15	150,83	155,88	156,26
Deposito	127,16	127,44	127,77	130,42	134,20	126,26	128,49	125,66	123,28	123,06
Kredit (Rp Triliun)	262,50	268,01	274,83	299,84	298,69	307,19	312,30	312,71	310,84	330,82
Modal Kerja	118,02	116,34	123,21	141,49	138,41	136,46	139,56	134,63	132,15	143,67
Investasi	65,17	69,96	66,93	70,71	70,84	79,71	80,25	84,36	83,61	91,81
Konsumsi	79,32	81,72	84,70	87,64	89,43	91,02	92,49	93,72	95,08	95,34
NPL Kredit (%)	1,92%	1,98%	1,87%	1,58%	1,72%	1,89%	1,89%	1,87%	1,94%	1,91%

Sumber : Data Bank Umum Sumatera Utara Menurut Lokasi Proyek

Sistem Pembayaran	2024			2025				2026	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
SP Tunal									
Inflow (Satker Kas - dlm juta)	11,189,381	7,491,336	3,402,058	11,908,943	11,154,129	5.970.342	6.563.981	12.540.655	8.383.131
Outflow (Satker Kas - dlm juta)	-8,761,221	-5,922,992	-13,611,251	-8,708,080	-5,868,971	-8.745.921	-9.264.617	-7.925.115	-1.427.781
Netflow (Satker kas - dlm juta)	2,428,160	1,568,344	-10,209,193	3,200,863	5,285,158	-2.775.579	2.700.635	4.615.540	6.955.350
SP Non Tunal									
RTGS - volume	53,226	61,828	64,146	54,242	53,067	63.075	63.617	53.966	56.158
RTGS - nominal (Rp milyar)	189,913	207,630	222,650	210,433	234,107	265.985	280.374	224.574	256.544
SKNBI - nominal (Rp milyar)	432,940	458,211	467,150	362,088	349,545	375.007	402.965	304.464	340.245
SKNBI - nominal (Rp milyar)	26,668	28,562	27,958	23,300	23,148	25.708	25.847	22.249	23.865

01.

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Pertumbuhan Ekonomi

4,98
5,06

Konsumsi Rumah Tangga

5,03
5,10

Konsumsi Pemerintah

9,82
14,17

Investasi

3,61
5,45

Ekspor

2,67
7,39

- Triwulan I 2026 (%,yoy)
- Triwulan II 2026 (%,yoy)

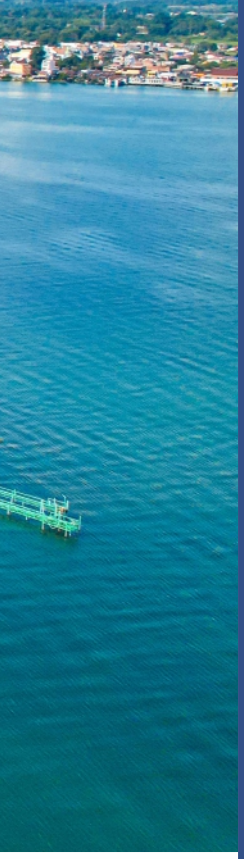

01.

Di tengah ketidakpastian perekonomian global dan pengetatan kebijakan moneter internasional, perekonomian domestik pada triwulan II 2026 tetap terjaga melalui penguatan permintaan domestik, percepatan realisasi program prioritas pemerintah, serta sinergi bauran kebijakan fiskal dan moneter. Berdasarkan kondisi makroekonomi tersebut, perkembangan perekonomian di Sumatera Utara menunjukkan ketahanan yang ditopang oleh kinerja positif sektor-sektor utama, termasuk industri pengolahan CPO, sektor konstruksi, dan kinerja ekspor komoditas unggulan di tengah dinamika global.

Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,06% (yoy) lebih tinggi dari triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 4,98% (yoy). Dari sisi pengeluaran, penguatan ekonomi didorong oleh akselerasi konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga (RT) dan investasi (PMTB). Sementara dari sisi net ekspor mengalami pelemahan terutama karena tingginya pertumbuhan impor. Akselerasi konsumsi pemerintah melonjak seiring meningkatnya realisasi belanja pegawai dan belanja barang-jasa, pembayaran gaji ke-13, pengangkatan ASN baru, serta percepatan pembayaran gaji tenaga pendidik. Kondisi ini turut menopang konsumsi RT yang tetap kuat didukung daya beli masyarakat dan meningkatnya mobilitas dan aktivitas pariwisata selama libur panjang. Kinerja ekspor menguat dipicu oleh peningkatan pengapalan CPO dan turunannya, karet, produk olahan laut, aluminium, serta lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara. Sementara itu, investasi (PMTB) meningkat ditopang oleh percepatan proyek infrastruktur strategis, pengembangan kawasan industri, serta pembangunan infrastruktur. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi tertahan oleh tingginya impor, khususnya migas dan barang modal.

Di sisi lain, walaupun LU Perdagangan dan LU Transgud tetap tumbuh tinggi, kedua LU tersebut sedikit termoderasi pada triwulan laporan. Perlambatan kinerja LU Perdagangan disebabkan berakhirnya momentum Ramadan–Idulfitri dan moderasi daya beli. Namun perbaikan perdagangan eksternal, penguatan distribusi, peningkatan transaksi *e-commerce,* serta terjaganya konsumsi masyarakat menjaga kinerja LU Perdagangan tetap tumbuh tinggi. Sementara itu, LU Transportasi dan Pergudangan melambat seiring normalisasi mobilitas dan aktivitas logistik pasca puncak HBKN Idulfitri, meskipun volume penumpang udara masih relatif tinggi dan penumpang laut tumbuh positif secara yoy. Dengan demikian, struktur pertumbuhan LU pada Triwulan II 2026 mencerminkan penguatan aktivitas produksi dan investasi yang diimbangi normalisasi konsumsi dan mobilitas, dengan dukungan pembiayaan perbankan yang semakin kuat pada sektor-sektor utama.

1.1. Pertumbuhan Ekonomi Global

Perekonomian global pada tahun 2026 terus dihadapkan pada perubahan lanskap eksternal yang penuh tantangan. Re-eskalasi intensitas perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada awal Juli 2026 kembali meningkatkan ketidakpastian global. Lalu lintas di Selat Hormuz kembali terhambat sehingga mengganggu produksi dan rantai pasok perdagangan antarnegara serta harga minyak dan berbagai komoditas dunia berbalik naik. Kebijakan moneter global menjadi lebih ketat sebagai respons terhadap makin tingginya tekanan inflasi. Ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global yang kembali meningkat tersebut mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Sejumlah bank sentral mulai menaikkan suku bunga kebijakannya untuk merespons kenaikan inflasi tersebut. Suku bunga kebijakan moneter AS, Fed Funds Rate, saat ini dipertahankan pada level 3,50-3,75%, dan terdapat kemungkinan akan naik seiring dengan prospek inflasi AS yang lebih tinggi. Imbal hasil (yield) US Treasury tetap tinggi mencapai 4,49% (tenor 10 tahun) dan 4,18% (tenor 2 tahun) pada tanggal 17 Juni 2026 didorong oleh defisit fiskal yang membesar. Indeks dolar AS terhadap negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY) tetap kuat. Akibatnya, preferensi penempatan investor global ke negara *Emerging Markets* (EMs) belum kuat dan beralih ke aset aman *(safe-haven assets)* di negara maju.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang (*Emerging Market and Developing Economies*/EMDEs) secara umum melambat. Tanpa memperhitungkan kontribusi dari China dan India, tingkat pendapatan per kapita di banyak negara berkembang berisiko mengalami *lost decade* atau dekade konvergensi yang hilang. Meski demikian, kejatuhan ekonomi yang lebih dalam masih dapat ditahan oleh beberapa faktor pendukung, seperti ekspansi investasi serta adopsi teknologi AI yang semakin luas, sedikit penurunan tarif perdagangan pasca-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, serta penguatan tren kerja sama perdagangan regional.

1.2. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga baik ditopang oleh permintaan domestik. Perkembangan pada triwulan II 2026 menunjukkan konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi ditopang berlanjutnya realisasi program-program prioritas serta percepatan belanja Pemerintah, terutama pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Konsumsi rumah tangga terjaga didorong berbagai stimulus Pemerintah, seperti bantuan pangan, potongan tarif transportasi, serta program magang dan pelatihan vokasi nasional. Investasi terutama didukung oleh investasi bangunan terkait realisasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di tengah investasi swasta yang perlu terus ditingkatkan.

Perbaikan investasi menjadi salah satu faktor yang menopang pertumbuhan ekonomi di mayoritas wilayah pada triwulan II 2026. Hal tersebut didukung akselerasi Proyek Strategis Nasional (PSN), program prioritas Pemerintah dan swasta, terutama di Kawasan Ekonomi/Industri di beberapa wilayah. Kinerja ekspor yang masih positif turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera dan Kalimantan. Hal tersebut sejalan dengan masih tingginya permintaan negara mitra dagang utama untuk batu bara dan CPO. Dari eksternal, kinerja ekspor perlu terus diperkuat guna memanfaatkan tingginya harga komoditas dunia, di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global. Secara sektoral, pertumbuhan Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan, LU Konstruksi, serta LU Transportasi dan Pergudangan tetap baik sejalan dengan realisasi program-program Pemerintah.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan wilayah didukung oleh kinerja positif LU Konstruksi di semua wilayah. Kinerja positif LU turut didukung Industri Pengolahan di Sumatera terkait pengolahan CPO yang tetap meningkat. Selain itu, LU Industri Pengolahan di Jawa juga tetap terjaga, di tengah tekanan kenaikan biaya input impor. Sementara itu, perbaikan kinerja LU Pertambangan di Sumatera dan Kalimantan pada TW II 2026 mendukung pertumbuhan kedua wilayah tersebut.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat untuk memitigasi dampak rambatan tingginya ketidakpastian global. Neraca perdagangan Indonesia pada Januari hingga Mei 2026 secara kumulatif mencatat surplus sebesar 4,03 miliar dolar AS, dengan perkembangan pada Mei 2026 mencatat defisit sebesar 1,61 miliar dolar AS. Dari transaksi modal dan finansial, berbagai penguatan respons kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia bersinergi dengan kebijakan fiskal Pemerintah untuk meningkatkan imbal hasil

instrumen keuangan domestik dapat mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 tetap terjaga sebesar 145,6 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui optimalisasi berbagai instrumen. Rupiah kembali melemah ke Rp17.885 per dolar AS sejak akhir Juni 2026 akibat kembali meningkatnya konflik di Timur Tengah dan menguatnya ekspektasi pasar terhadap kenaikan FFR. Dengan perkembangan tersebut, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS relatif stabil dibandingkan dengan level akhir Juni 2026 sebesar Rp17.880. Guna tetap menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia terus mengoptimalkan intervensi baik di pasar NDF luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri. Suku bunga SRBI dinaikkan untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga meluncurkan berbagai insentif, termasuk pemotongan tingkat swap lindung nilai *(hedging)* sebesar 10% bagi investor asing serta perluasan instrumen transaksi berbasis mata uang lokal (*Local Currency Transaction*/LCT) menggunakan Renminbi Tiongkok (CNH).

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terjaga dalam sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Inflasi inti yang stabil didukung konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga pencapaian sasaran inflasi. Meskipun demikian, kenaikan terbatas terjadi pada kelompok *administered price*s akibat penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan avtur akibat tingginya harga energi dunia. Sementara itu, kelompok *volatile food* mencatatkan kenaikan inflasi disumbang oleh berakhirnya masa panen raya dan meningkatnya biaya logistik.

Bank Indonesia terus mengoptimalkan likuiditas dan insentif makroprudensial guna memperkuat penyaluran kredit ke sektor produktif dan ketahanan perbankan. Dalam kaitan ini, upaya Bank Indonesia dalam memperkuat likuiditas pasar uang dan perbankan melalui pembukaan window lelang instrumen *repurchase agreement* (repo) bagi perbankan dan pembelian Surat Berharga Negara, termasuk pembelian di pasar sekunder. Langkah ini diperkuat oleh implementasi insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang secara fokus dialokasikan untuk sektor-sektor strategis seperti hilirisasi, pertanian, konstruksi, dan UMKM. Sinergi kebijakan tersebut terbukti meningkatkan penyaluran kredit perbankan hingga tumbuh 12,67% (yoy) pada Juni 2026, dengan lonjakan tertinggi pada jenis kredit investasi. Pertumbuhan kredit perbankan tersebut didukung dengan ketahanan perbankan nasional yang tecermin dari tingkat kecukupan modal yang tinggi dan rasio kredit bermasalah yang terjaga rendah.

Transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal untuk menopang kegiatan ekonomi. Pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan II 2026 terus menunjukkan kinerja positif, didorong oleh perluasan akseptasi pembayaran digital yang tecermin dari pertumbuhan transaksi QRIS, serta pemanfaatan infrastruktur BI-FAST dan BI-RTGS. Sejalan dengan stabilitas sistem pembayaran yang tetap terjaga melalui dukungan infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI), keandalan sistem pembayaran didukung oleh penguatan interkoneksi antarpelaku industri digital dan ketersediaan pasokan uang kartal yang memadai hingga ke kawasan Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

1.3. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Menunjukkan Peningkatan

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2026

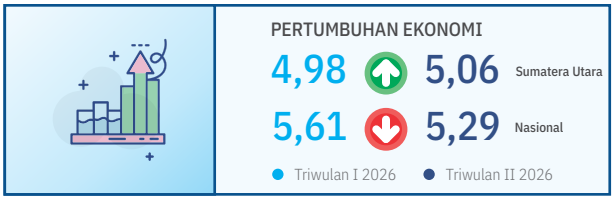

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan II 2026 melanjutkan tren positif dan meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Ekonomi Sumatera Utara pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,06% (yoy), menguat dari triwulan I 2026 yang tumbuh 4,98% (yoy). – Grafik 1.1.

Dari sisi pengeluaran, penguatan ekonomi didorong oleh akselerasi konsumsi pemerintah dan kinerja ekspor, serta peningkatan konsumsi rumah tangga (RT) dan investasi (PMTB), meskipun masih tertahan oleh tingginya pertumbuhan impor. Akselerasi konsumsi pemerintah melonjak seiring meningkatnya realisasi belanja pegawai dan belanja barang-jasa, pembayaran gaji ke-13, pengangkatan ASN baru, serta percepatan

Grafik 1.1. Perkembangan PDRB dan PDB Triwulan

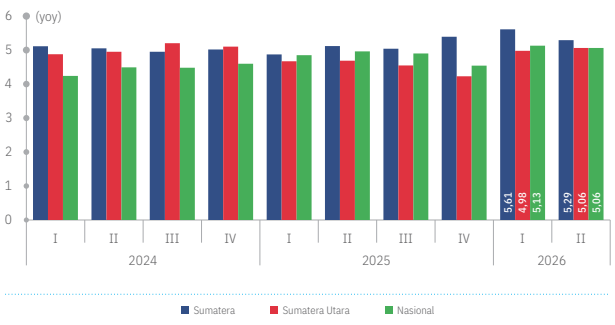

Sumber: BPS, diolah

pembayaran gaji tenaga pendidik. Kondisi ini turut menopang konsumsi RT yang tetap kuat didukung daya beli masyarakat, momentum Hari Raya Iduladha, serta meningkatnya mobilitas dan aktivitas pariwisata selama libur panjang.

Kinerja ekspor menguat dipicu oleh peningkatan pengapalan CPO dan turunannya, karet, produk olahan laut (ikan dan udang), aluminium, serta lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara. Sementara itu, investasi (PMTB) meningkat ditopang oleh percepatan proyek infrastruktur strategis seperti Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pengembangan kawasan industri/KEK, serta pembangunan fasilitas gedung perkantoran, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Namun demikian, laju PDRB lebih tinggi tertahan oleh tingginya impor, khususnya migas dan barang modal berupa mesin dan peralatan.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), peningkatan kinerja didorong oleh penguatan sektor konstruksi, industri pengolahan, dan pertanian, di samping tetap kuatnya kinerja perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan-minum (akmamin), serta transportasi dan pergudangan (transgud). Kinerja konstruksi terakselerasi seiring percepatan pembangunan infrastruktur strategis (JTTS dan BRT Mebidang), proyek KDMP, serta konstruksi swasta dan pemerintah. Industri pengolahan dan pertanian membaik ditopang oleh membaiknya produksi dan harga sawit, CPO, beserta produk turunannya meskipun sektor pertanian masih tertahan oleh produksi padi dan tanaman hortikultura. Industri pengolahan juga mendapat dorongan dari pertumbuhan industri mikro-kecil, peningkatan ekspor produk olahan laut, dan ekspansi kredit perbankan ke sektor manufaktur.

Sementara itu, sektor perdagangan, akmamin, dan transgud tetap tumbuh tinggi. Hal ini didukung oleh tingginya transaksi *e-commerce,* mobilitas masa libur panjang Iduladha, kunjungan wisman, serta penyelenggaraan berbagai event skala nasional dan internasional seperti Rakernas APEKSI, HUT APKASI, dan Piala AFF U-19.

Untuk isu perekonomian ekonomi Sumatera Utara lainnya, seperti perkembangan inflasi, pembiayaan daerah, penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Penyelenggaraan Uang Rupiah, serta isu lainnya, dijelaskan secara rinci pada bab selanjutnya.

1.4. Kinerja Komponen Pengeluaran Mayoritas Mengalami Peningkatan

Tabel 1.1. Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran Provinsi Sumatera Utara

Uraian	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
PDRB (%, yoy)	4,88	4,95	5,20	5,10	4,67	4,69	4,55	4,23	4,98	5,06
Pengeluaran										
Konsumsi Rumah Tangga	5,54	5,45	5,47	5,26	5,29	4,95	4,69	4,05	5,03	5,10
Konsumsi LNPRT	17,69	8,20	12,11	10,37	-0,92	6,34	-0,58	8,49	11,24	6,05
Konsumsi Pemerintah	2,04	1,61	4,67	7,53	3,39	-4,76	1,91	0,68	9,82	14,17
PMTB	4,38	4,40	5,23	5,73	1,23	0,9	0,58	-0,40	3,61	5,45
Ekspor	8,86	11,57	11,04	12,62	14,04	9,94	9,05	8,30	2,67	7,39
Impor	10,54	13,62	13,88	9,65	5,13	3,37	3,18	3,35	4,92	11,68

Sumber: BPS

Kinerja konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,10% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya 5,03% (yoy). Peningkatan ini terutama ditopang oleh faktor musiman perayaan Idul Adha serta pencairan Gaji ke-13 bagi ASN, TNI/Polri, dan pensiunan yang turut menjaga likuiditas masyarakat. Sejalan dengan momentum tersebut, transaksi *e-commerce* terakselerasi sebesar 27,50% (yoy) dengan total transaksi mencapai Rp5,89 triliun – (Grafik 1.2).

Grafik 1.2. Nominal Transaksi *E-Commerce* di Sumatera Utara

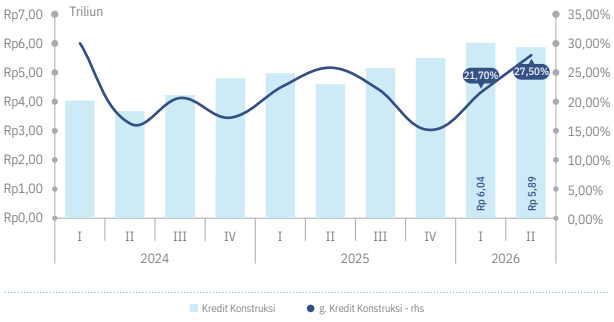

Sumber: Transaksi E-commerce,diolah

Lonjakan transaksi digital ini turut diakselerasi oleh fenomena konvergensi antara momentum penerimaan gaji dengan masifnya stimulus promosi *platform online* (seperti *payday sale* dan kampanye tanggal kembar). Capaian ini mengindikasikan optimalisasi ekosistem digital oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan perayaan keagamaan dan persiapan tahun ajaran baru secara efisien.

Kinerja Indeks Penjualan Riil (IPR) mengonfirmasi adanya peningkatan aktivitas belanja. Naiknya IPR dari 356,3 menjadi 369,2 – (Grafik 1.3) didorong secara asimetris oleh kelompok esensial, yakni Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Bahan Bakar seiring tingginya mobilitas masyarakat saat libur panjang sekolah dan cuti bersama keagamaan. Sebaliknya, kontraksi pada kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi mengindikasikan adanya penundaan *upgrade gadget,* di mana masyarakat memilih mengalihkan dananya untuk prioritas mudik lokal dan biaya pendidikan.

Grafik 1.3. Survei Penjualan Eceran

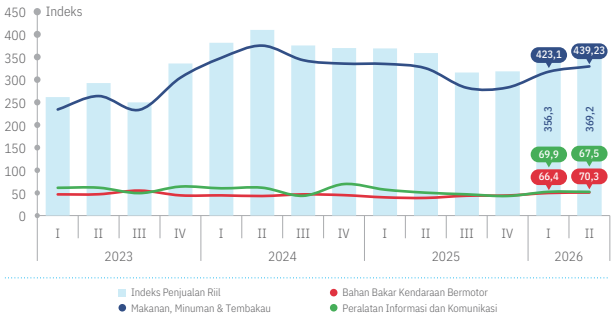

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Peningkatan aktivitas domestik rumah tangga juga tecermin kuat dari indikator pemakaian energi. Penjualan listrik rumah tangga mencatatkan pertumbuhan 7,5% (yoy) dengan volume 575,76 Juta KwH, berbalik dari fase kontraksi 4,3% (yoy) pada triwulan sebelumnya – (Grafik 1.4). Lonjakan utilitas ini sejalan dengan intensitas kegiatan keluarga di rumah selama periode libur sekolah yang panjang, serta peningkatan utilisasi peralatan elektronik untuk pengolahan makanan selama momentum Iduladha.

Di sisi lain, meskipun aktivitas konsumsi pemenuhan kebutuhan dasar meningkat, keyakinan masyarakat secara umum masih tertahan. Berdasarkan hasil Survei Konsumen, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) termoderasi dari 102,98 menjadi 94,60 di tengah peningkatan belanja esensial – (Grafik 1.5). Penurunan ini digerakkan oleh persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan saat ini yang tertahan di area pesimis atau di bawah level 100 – (Grafik 1.6). Fluktuasi harga komoditas pangan pokok menjelang perayaan keagamaan memicu kewaspadaan masyarakat Sumatera Utara sehingga konsumen menahan ekspektasi belanja jangka pendek.

Grafik 1.4. Konsumsi Listrik Rumah Tangga

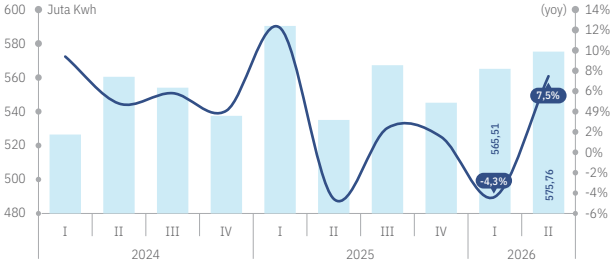

Sumber: PLN Persero

Grafik 1.5. Survei Konsumen

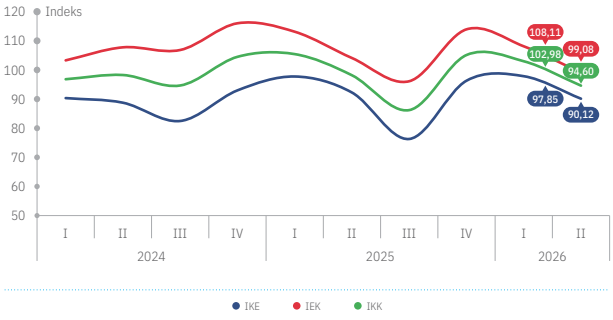

Sumber: Survei Konsumen – Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.6. Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Kerja

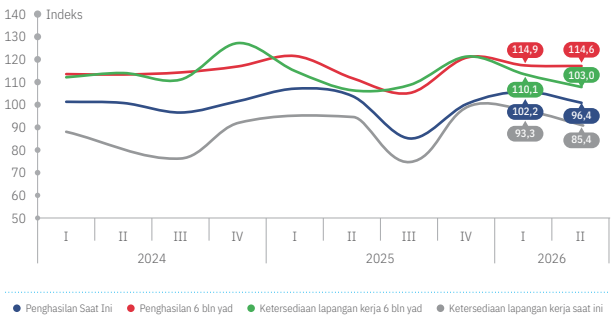

Sumber: Survei Konsumen – Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.8. Kredit Rumah Tangga

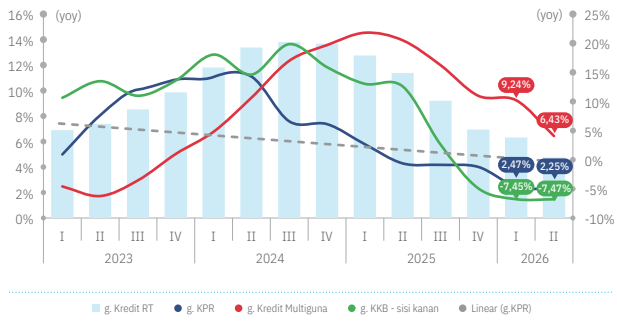

Sumber: LBUT, diolah

Sejalan dengan persepsi tersebut, Indeks Konsumsi Barang Tahan Lama *(durable goods)* termoderasi sebagai bentuk rasionalisasi pengeluaran bernominal besar, terkoreksi ke kisaran level 88 pada triwulan laporan – (Grafik 1.7). Penurunan minat pembelian perabotan atau barang elektronik ini menegaskan strategi perlindungan arus kas. Rumah tangga memprioritaskan likuiditas uang tunainya untuk melunasi kewajiban prioritas, khususnya pembayaran daftar ulang dan uang pangkal sekolah anak yang jatuh bersamaan pada triwulan ini.

Dari sisi pembiayaan, Kredit Konsumsi Rumah Tangga merekam sikap kehati-hatian struktural yang tecermin melalui tren deselerasi secara menyeluruh. Pertumbuhan Kredit Multiguna melambat ke 6,43% (yoy) dan KPR melandai ke 2,25% (yoy), sementara Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) terus tertahan di zona kontraksi 7,47% (yoy) – (Grafik 1.8). Hal ini secara anekdotal mengonfirmasi bahwa masyarakat lebih memilih menggunakan tambahan likuiditas dari Gaji ke-13 secara tunai untuk berbelanja kebutuhan pokok, alih-alih mengambil komitmen utang jangka panjang di tengah sikap penyesuaian arus kas rumah tangga.

Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan II 2026 didorong sepenuhnya oleh *necessity-driven consumption* (konsumsi berbasis pemenuhan kebutuhan esensial jangka pendek), bukan oleh ekspansi daya beli struktural yang solid. Rumah tangga dipaksa untuk meningkatkan pengeluaran pada makanan, bahan bakar, dan utilitas dasar di tengah pesimisme terhadap ketersediaan lapangan kerja dan ekspektasi pendapatan. Sebagai respons rasional untuk menjaga arus kas terhadap tekanan fundamental tersebut, konsumen melakukan *trade-off* ketat dengan memotong pengeluaran barang tersier, menahan pembelian barang tahan lama, dan menghindari penarikan kredit baru.

Grafik 1.7. Indeks Konsumsi Barang Tahan Lama

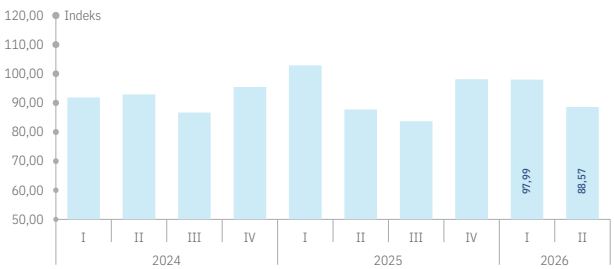

Sumber: Survei Konsumen – Bank Indonesia, diolah

Konsumsi Pemerintah pada triwulan II 2026 mengalami akselerasi. Kinerja konsumsi Pemerintah pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 14,17% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 9,82% (yoy). Akselerasi ini ditopang kuat oleh postur APBD dengan total realisasi Belanja Daerah mencapai Rp21.000,47 miliar atau 35,95% dari pagu, meski secara tahunan terkontraksi 3,44% (yoy). Berdasarkan rinciannya, serapan tertinggi dicatatkan oleh Belanja Pegawai yang mencapai 48,84% terhadap pagu 2026, sejalan dengan momentum pencairan gaji ke-13 dan tunjangan aparatur negara. Sementara itu, realisasi Belanja Barang dan Jasa menyusul dengan serapan sebesar 33,41% (tumbuh 6,92% yoy), yang secara anekdotal diarahkan untuk mengeksekusi program prioritas pemberdayaan masyarakat – (Tabel 1.2).

Tabel 1.2. Postur APBD se-Provinsi Sumatera Utara periode Januari s.d. Juni 2026

Akun	Anggaran/Pagu (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	% thd Pagu	Growth (%yoy) thd 2025
I. Pendapatan Daerah	57.165,82	32.109,27	56,17%	17,76%
1. PAD	17.122,03	7.164,82	41,85%	8,47%
2. TKDD	37.793,60	24.379,48	64,51%	25,69%
3. Pendapatan Lainnya	2.250,19	564,97	25,11%	-55,33%
II. Belanja Daerah	58.419,25	21.000,47	35,95%	-3,44%
1. Belanja Pegawai	24.793,38	12.108,44	48,84%	13,57%
2. Belanja Barang dan Jasa	16.389,76	5.475,75	33,41%	6,92%
3. Belanja Modal	7.138,31	661,82	9,27%	-52,81%

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan

Tabel 1.3. Postur APBN se-Sumatera Utara

APBN (miliar rupiah)	Pagu/Target (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	% thd APBN	Growth %yoy thd 2025
Belanja Negara	68.390,20	35.944,18	52,56%	23,41%
I. Belanja Pemerintah Pusat	27.340,82	10.675,76	39,05%	34,58%
1. Belanja Pegawai	11.765,11	6.829,93	58,05%	24,77%
2. Belanja Barang	9.393,98	2.554,98	27,20%	18,09%
3. Belanja Modal	6.167,97	1.286,96	20,87%	392,89%
4. Bantuan Sosial	13,76	3,9	28,34%	-88,52%
II. Transfer Ke Daerah	41.049,38	25.268,42	61,56%	24,77%
1. Dana Bagi Hasil	3.132,22	2.487,15	79,41%	229,98%
2. Dana Alokasi Umum	27.514,71	17.608,24	64,00%	26,48%
3. Dana Alokasi Khusus Fisik	219,65	19,18	8,73%	-64,44%
4. Dana Alokasi Khusus NonFisik	8.398,99	4.314,39	51,37%	8,20%
5. Dana Desa	1.783,81	839,46	47,06%	-64,52%

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan

Melengkapi postur APBD, akselerasi konsumsi pemerintah mendapat dorongan ekspansif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total pagu Belanja Negara mencapai Rp68.390,20 miliar, yang terealisasi sebesar Rp35.944,18 miliar atau 52,56%. Realisasi ini mencatatkan pertumbuhan yang solid sebesar 23,41% (yoy). Dari total tersebut, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sumatera Utara tercatat sebesar Rp10.675,76 miliar atau 39,05% dari pagu. Motor penggerak utama BPP adalah Belanja Pegawai yang terealisasi tinggi sebesar Rp6.829,93 miliar (terserap 58,05%) untuk memenuhi kewajiban gaji, tunjangan kinerja, hingga pembayaran Gaji ke-13. Selain itu, Belanja Barang terserap sebesar Rp2.554,98 miliar (27,20%) guna mendukung kelancaran program pelayanan kesehatan lanjutan, pendidikan tinggi, hingga pemeliharaan keamanan – (Tabel 1.3).

Dari sisi pembangunan fisik, APBN memberikan stimulus langsung melalui realisasi Belanja Modal Pusat sebesar Rp1.286,96 miliar atau 20,87% dari pagu. Capaian ini didorong secara struktural untuk mempercepat pengerjaan prasarana strategis, infrastruktur konektivitas, hingga program ketahanan sumber daya air di daerah. Sementara itu, sebagai bantalan daya beli masyarakat lapis bawah, Pemerintah Pusat juga menyalurkan Belanja Bantuan Sosial melalui DIPA satuan kerja pusat senilai Rp3,90 miliar (28,34% dari pagu) yang dialokasikan spesifik untuk program perlindungan sosial – (Tabel 1.3).

Di sisi lain, dukungan APBN untuk daerah juga mengalir deras melalui Transfer Ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp25.268,42 miliar atau mencapai 61,56% dari total pagu Rp41.049,38 miliar. Dana ini disalurkan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik dan Nonfisik, hingga Dana Desa – (Tabel 1.3).

Grafik 1.9. DPK Pemerintah dan Pemda

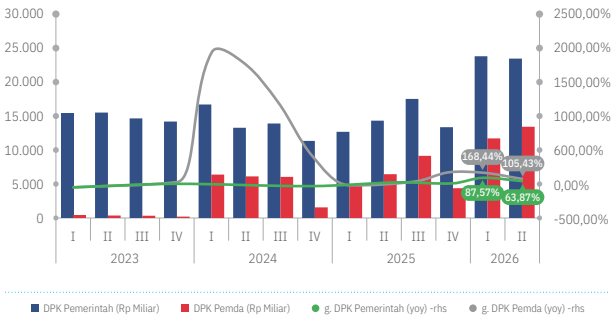

Sumber: LBUT BI,diolah

Grafik 1.10. Konsumsi Listrik Kantor Pemerintah

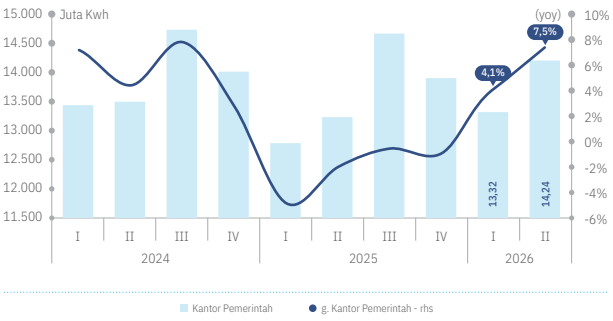

Sumber: PLN, diolah

Di tengah agresivitas belanja pegawai dan suntikan pagu infrastruktur pusat, kualitas pengeluaran daerah justru masih tertahan oleh kelambatan penyerapan Belanja Modal APBD yang baru menyentuh 9,27% dari pagu Rp7.138,31 miliar, dan terkontraksi tajam hingga 52,81% (yoy). Kesenjangan kecepatan eksekusi proyek fisik daerah ini berdampak langsung pada tingginya akumulasi Dana Pihak Ketiga (DPK) Pemerintah Daerah di perbankan. Indikator likuiditas merekam tren penumpukan kas yang ekstrem, ditandai dengan lonjakan pertumbuhan DPK Pemda hingga 105,43% (yoy), sejalan dengan DPK Pemerintah secara keseluruhan yang tumbuh 63,87% (yoy) – (Tabel 1.9). Kondisi ini mengonfirmasi bahwa tingginya realisasi penerimaan Dana Transfer (TKDD) dari pusat sebesar 61,56 % terhadap pagu 2026 belum sepenuhnya dioptimalkan oleh pemerintah daerah untuk memutar roda ekonomi riil secara mandiri.

Kinerja operasional birokrasi yang mulai berekspansi secara menyeluruh juga terkonfirmasi oleh indikator Konsumsi Listrik Kantor Pemerintah yang mengalami akselerasi menjadi 7,5% (yoy) dengan volume 14,24 Juta KWH – (Tabel 1.10). Peningkatan ini sejalan dengan tingginya angka pertumbuhan konsumsi Pemerintah pada triwulan ini, yang digerakkan baik oleh lonjakan beban administratif (pembayaran gaji dan tunjangan) maupun oleh meningkatnya intensitas kegiatan operasional aparatur daerah di lapangan.

INVESTASI PENANAMAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

3,61 → 5,45

● Triwulan I 2026 ● Triwulan II 2026

Kinerja investasi yang tecermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) semakin menguat. Kinerja investasi PMTB pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,45% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I sebesar 3,61% (yoy). Penguatan tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembentukan modal, tecermin dari peningkatan realisasi belanja modal gedung dan bangunan APBN Provinsi Sumatera Utara 2026 – (Tabel 1.3) dan meningkatnya impor barang modal seperti mesin/peralatan listrik serta kendaraan dan bagiannya. Peningkatan aktivitas konstruksi juga tecermin dari kontraksi penjualan semen yang mengalami perbaikan

Tabel 1.4. Target Operasional Pelaku Usaha KEK Sei Mangkei

Jenis Usaha	Target Operasi (Jumlah Perusahaan)
Sawit & Hilirisasi Sawit	Sudah operasional (5), November 2026 (1), Desember 2026 (2), TBC (1)
Oleochemical	Sudah operasional (3), 2027 (1)
Fertilizer / Biofertilizer	Sudah operasional (1), TBC (1)
FMCG	Sudah operasional (3)
Refinery	Desember 2026 (1)
Rubber Gloves	Sudah operasional (1), 2027–2028 (1)
Green Energy / EFB	Sudah operasional (1)
Biodiesel	Desember 2026 (1), 2027 (1)
SPBU	Belum ada target (1)
Utilitas Air & Lingkungan	Sudah operasional (2)
Gas Industri	Sudah operasional (1)
Telekomunikasi	Agustus 2026 (1)
Energi Terbarukan	Sudah operasional (1)
Ketenagalistrikan	Sudah operasional (1)
Gas Bumi	Sudah operasional (1)
Perhotelan	TBC (1)
Kawasan Industri	Sudah operasional (1)
Dryport / Logistik	Sudah operasional (1)

Sumber: KEK Sei Mangkei, diolah

Grafik 1.11. Pengadaan Semen

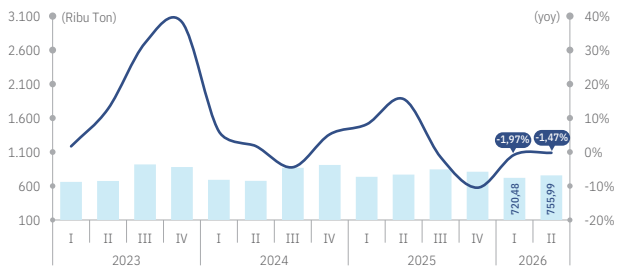

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 1.12. Kredit Modal Kerja

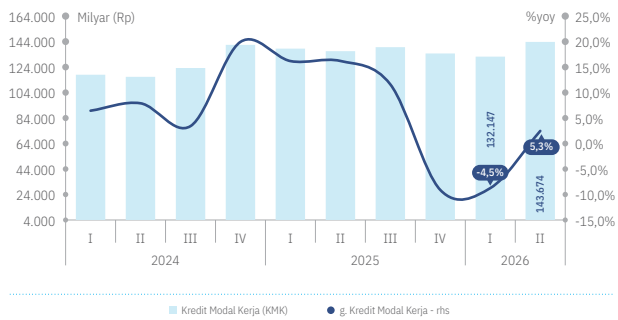

Sumber: LBU – Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.13. Realisasi Investasi

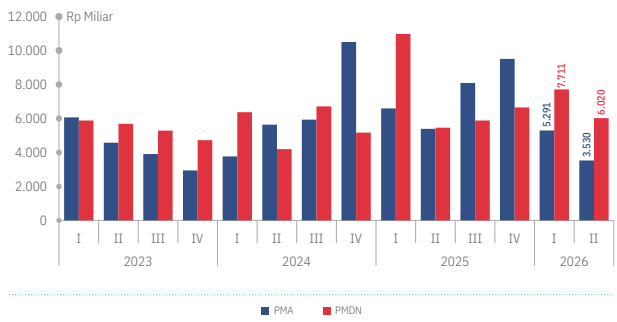

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, diolah

Grafik 1.14. Pangsa PMDN dan PMA Berdasarkan Sektor Triwulan II 2026

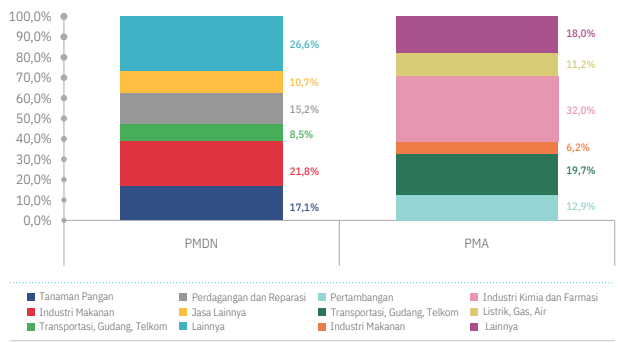

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, diolah

pada triwulan II 2026 menjadi -1,47% (yoy), dari -1,97% (yoy) pada triwulan sebelumnya – (Grafik 1.11), sementara dari sisi pembiayaan, pertumbuhan kredit modal kerja turut meningkat signifikan menjadi 5,3% (yoy), berbalik dari kontraksi 4,5% (yoy) pada triwulan sebelumnya – (Grafik 1.12).

Penguatan PMTB turut didukung oleh berlanjutnya pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera, dimulainya pembangunan BRT Mebidang beserta infrastruktur pendukungnya, pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Sekolah Rakyat, serta mulai beroperasinya pabrik di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) – (Tabel 1.4). Selain itu, pembangunan gedung perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta proyek perumahan oleh sektor swasta dan pemerintah turut menopang pembentukan modal di Sumatera Utara.

Penguatan PMTB turut tecermin dari tetap tingginya realisasi investasi Sumatera Utara pada triwulan II 2026 yang mencapai Rp9,55 triliun, terdiri atas PMDN sebesar Rp6,02 triliun dan PMA sebesar Rp3,53 triliun - (Grafik 1.13). Realisasi PMDN terutama ditopang oleh sektor Industri Makanan (21,8%), Tanaman Pangan (17,1%), serta Perdagangan dan Reparasi (15,2%). Sementara itu, realisasi PMA didominasi oleh sektor Industri Kimia dan Farmasi (32,0%), Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (19,7%), serta Pertambangan (12,9%) – (Grafik 1.14).

Penguatan kinerja investasi turut terkonfirmasi oleh persepsi pelaku usaha, tecermin dari hasil Survei Liaison Bank Indonesia yang mencatatkan *likert scale* Investasi sebesar 0,72 pada triwulan II 2026, sedikit melandai dari triwulan sebelumnya namun masih berada pada level zona optimis. Angka ini mengindikasikan bahwa optimisme pelaku usaha terhadap realisasi kegiatan investasi semakin menguat, sejalan dengan akselerasi PMTB pada triwulan laporan.

Grafik 1.15. Survei *Liaison*

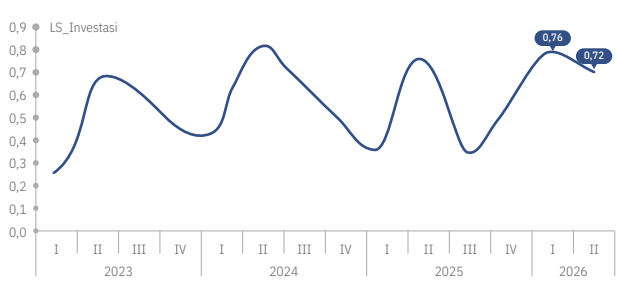

Sumber: Survei Liaison Bank Indonesia, diolah

Bank Indonesia terus mendukung penguatan investasi di Sumatera Utara melalui perluasan konektivitas antarwilayah, promosi investasi, dan fasilitasi jejaring dengan calon investor. Kegiatan tersebut antara lain:

a) Penyelenggaraan Sumatra *Connect – Road to* Sumatra *Investment Day* 2026 pada 18–19 Mei 2026 di Medan sebagai *platform* kolaboratif untuk mempertemukan pemangku kepentingan pariwisata dan investasi lintas provinsi, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong integrasi destinasi dan paket wisata Sumatera. Kegiatan juga dirangkaikan dengan *business matching* antara pelaku industri pariwisata domestik dan sekitar 40 perwakilan *international travel buyers* dari berbagai negara guna memperluas akses pasar dan jejaring kerja sama pariwisata Sumatera;

b) Upaya ini terus berlanjut hingga memasuki triwulan III 2026 dengan diselenggarakannya *Sumatra Investment Day* (SID) 2026 pada 23 Juli 2026 di Medan sebagai *platform* utama promosi investasi regional Sumatera yang mempertemukan *project owner* dengan investor domestik dan internasional, dengan melibatkan sinergi bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kegiatan ini menghadirkan 23 proyek investasi unggulan dari 10 provinsi di Sumatera dan 82 investor, serta melibatkan jajaran Konsulat Jenderal dan Konsul Kehormatan negara sahabat. SID 2026 diarahkan untuk memperkuat *qualified investment pipeline,* khususnya pada sektor hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan pariwisata daerah, melalui fasilitasi *business matching* dan *one-on-one meeting* (O3M) guna meningkatkan kualitas struktur proyek investasi daerah, memperluas akses pendanaan dan pendalaman peluang ekspansi bagi investor, serta memperkuat proses tindak lanjut menuju *Letter of Intent* (LoI), *due diligence,* hingga realisasi investasi. Hasil penjajakan investasi selanjutnya dikawal melalui targeted investor engagement serta kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian/ Lembaga terkait untuk mengatasi *bottleneck* perizinan dan infrastruktur guna mempercepat eksekusi proyek investasi (Boks 1.2 – *Sumatra Investment Day* 2026).

Gambar 1.1. Rangkaian Kegiatan Sumatra Invesment Day 2026

Sumber: Dokumentasi Bank Indonesia

Kinerja ekspor triwulan II 2026 meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2026, kinerja ekspor tercatat 7,39% (yoy) dari periode sebelumnya sebesar 2,67% (yoy). Hal ini tecermin dari nilai ekspor yang sebelumnya terkontraksi sebesar 1,0% (yoy) menjadi 21,1% (yoy) pada triwulan II 2026 – (Grafik 1.16).

Sepanjang Januari s.d. Juni 2026, sektor industri pengolahan mendominasi kontribusi ekspor tercatat hingga 93,21% atau senilai US$ 6.089,09 juta. Sementara, sektor pertanian berkontribusi sisanya sebesar 6,78% (US$ 442,60 juta). Komoditas utama yang menjadi andalan ekspor daerah ini didominasi oleh kelompok lemak dan minyak hewan/nabati dengan porsi 38,49% (US$ 2.514,16 juta), disusul oleh berbagai produk kimia sebesar 16,42% (US$ 1.072,49 juta). Penjelasan mengenai perkembangan kinerja lapangan usaha lebih rinci dapat dilihat pada Sub Bab 1.5.

Selain itu, kenaikan harga komoditas ekspor utama Sumatera Utara di pasar global turut menyumbang pertumbuhan nilai ekspor, khususnya CPO dan karet – (Grafik 1.17).

Selain itu, peningkatan ekspor tecermin pada pasar ekspor Sumatera Utara masih terpusat di tiga negara tujuan utama, yakni Tiongkok sebagai penyerap terbesar (17,02%), disusul oleh Amerika Serikat (14,10%), dan India (7,03%) – (Grafik 1.18).

Dari segi kinerja industri negara mitra dagang, Purchasing Managers' Index (PMI) Tiongkok mencatatkan pemulihan tipis ke level ekspansif sebesar 50,20 pada triwulan II 2026. Di sisi lain, PMI India mengalami pelemahan menjadi 55,03 namun tetap berada di zona ekspansif. Sementara itu, PMI Jepang (54,70), Amerika Serikat (53,60), Zona Eropa (52,07), Korea Selatan (53,50), dan Singapura (51,00) secara konsisten tetap berada pada level ekspansifnya – (Grafik 1.19).

Ditinjau dari sisi komoditas, CPO masih menjadi komoditas utama ekspor Sumatera Utara pada triwulan laporan. Sebagai salah satu penghasil terbesar kelapa sawit di Indonesia, ekspor CPO Sumatera Utara mencatatkan pangsa sebesar 22,6% – (Grafik 1.20).

Tren harga CPO di pasar global yang relatif kompetitif turut mendorong pertumbuhan ekspor pada triwulan II 2026 sebesar 10,9% (yoy)- (Grafik 1.21).

Di sisi lain, nilai ekspor komoditas karet Sumatera Utara pada triwulan II 2026 tercatat terkontraksi sebesar 1,58% (yoy). Pelemahan nilai ekspor ini mengindikasikan adanya kendala dari sisi pasokan (suplai) domestik, tecermin dari volume ekspor karet yang tertahan sebesar 20,9 ribu ton – (Grafik 1.22), akibat cuaca/curah hujan tinggi mengganggu penyadapan, usia tanaman karet yang menua, dan alih fungsi lahan. Sementara itu, dari sisi permintaan, kondisi ini tidak tecermin dari pelemahan

Grafik 1.16. Nilai dan Volume Ekspor

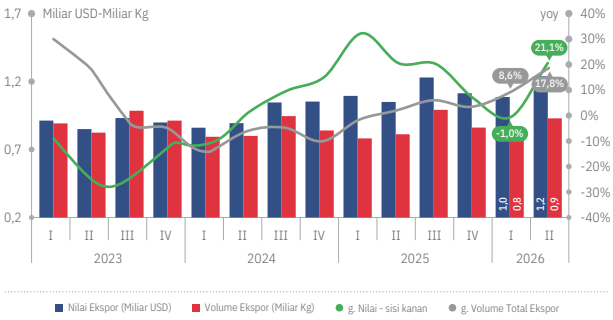

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.17. Pertumbuhan Harga Komoditas di Pasar Global

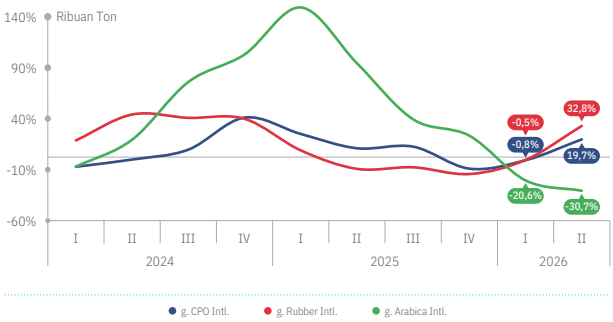

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.18. Negara Tujuan Utama Ekspor

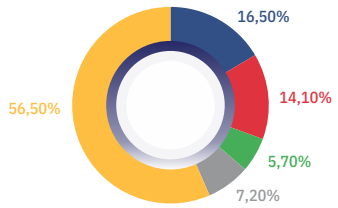

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.19. Indeks PMI

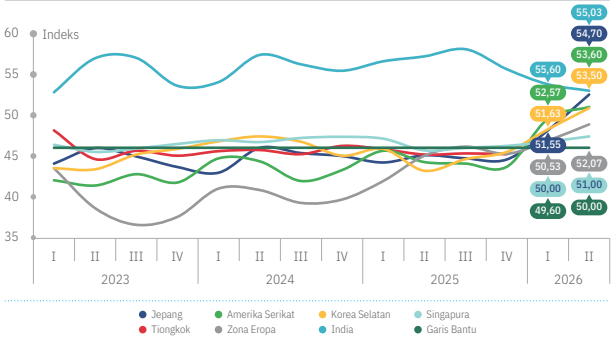

Sumber: Berbagai sumber, diolah

Grafik 1.20. Pangsa Komoditas

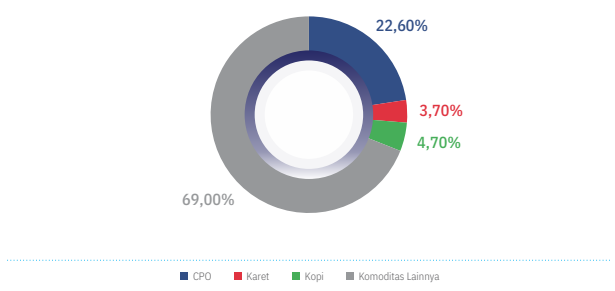

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.21. Ekspor CPO

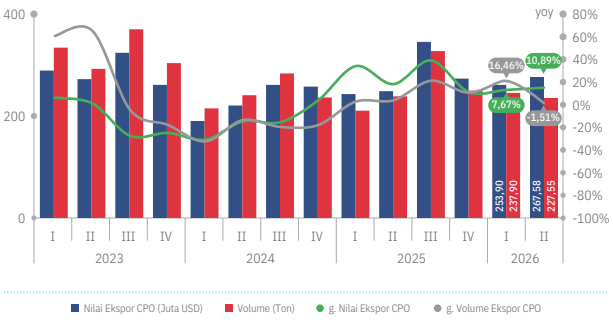

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.22. Ekspor Karet

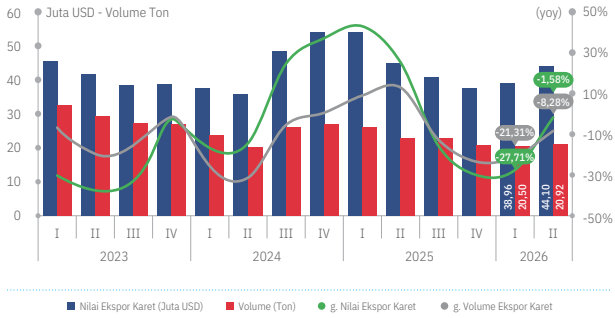

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.23. Total Kunjungan Wisatawan Mancanegara

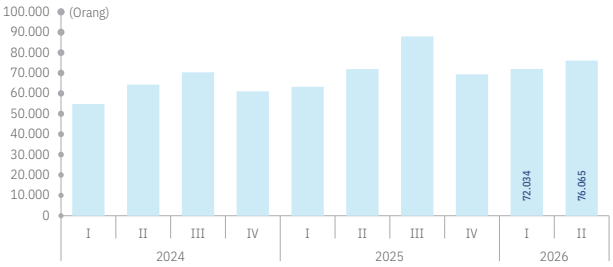

Sumber: BPS, diolah

pasar tujuan ekspor utama seperti Jepang, yang indeks PMI-nya justru tetap berada pada level ekspansif, mengindikasikan permintaan riil terhadap komoditas karet masih solid – (Grafik 1.19).

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara, dari 72.034 orang pada triwulan I menjadi 76.065 orang pada triwulan II 2026, mencerminkan penguatan mobilitas global yang turut memperkuat ketahanan eksternal daerah – (Grafik 1.23). Kenaikan arus wisman ini tidak hanya mengerek perolehan devisa melalui sektor jasa pariwisata.

Penguatan kinerja ekspor pada triwulan II 2026 turut terkonfirmasi oleh persepsi pelaku usaha, tecermin dari hasil Survei Liaison Bank Indonesia yang mencatatkan perbaikan tajam pada Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Permintaan Ekspor (LS_Permintaan Ekspor), dari -0,75 pada triwulan I 2026 berbalik ke level positif sebesar 0,33 pada triwulan II 2026 – (Grafik 1.24). Perbaikan persepsi permintaan ekspor ini sejalan dengan akselerasi pertumbuhan nilai ekspor secara agregat, didukung oleh solidnya kinerja komoditas unggulan seperti CPO di tengah tren harga global yang kompetitif, serta permintaan pasar mitra dagang utama yang secara umum tetap berada pada level ekspansif.

Secara keseluruhan, perbaikan kinerja ekspor Sumatera Utara pada triwulan II 2026 ditopang oleh kombinasi faktor harga komoditas global yang mendukung, permintaan eksternal yang mulai pulih, serta dominasi sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan daerah, meskipun kendala di sisi pasokan domestik pada komoditas karet masih perlu menjadi perhatian ke depan.

Grafik 1.24. *Likert Scale* Permintaan Ekspor

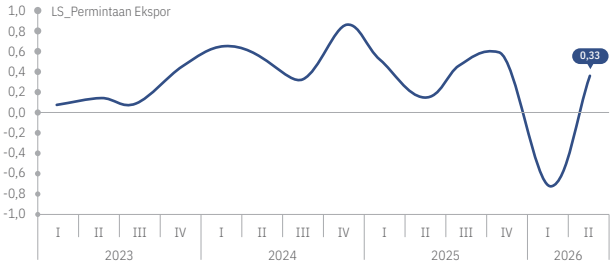

Sumber: Survei Liaison Bank Indonesia, diolah

Pertumbuhan impor yang positif pada triwulan II 2026 turut memberikan andil kontraktif terhadap kinerja net ekspor Sumatera Utara. Kinerja impor Sumatera Utara pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 11,68% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,92% (yoy). Dari segi nominal, nilai impor Sumatera Utara mencapai 1.235 juta USD, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan ini juga tecermin pada pertumbuhan volume impor yang turut meningkat menjadi 13,6% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya – (Grafik 1.25).

Grafik 1.25. Nilai dan Volume Impor

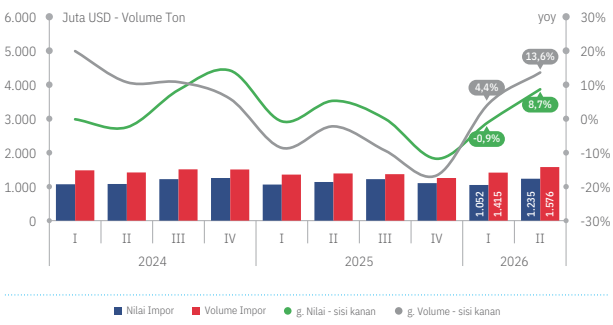

Sumber: Bea Cukai, diolah

Peningkatan impor terutama ditopang oleh impor bahan baku untuk industri (olahan) yang mendominasi struktur impor dengan pangsa 54,35%, serta tumbuh 15,88% (yoy) – (Grafik 1.26). Hal ini mengindikasikan masih kuatnya kebutuhan input industri pengolahan. Selain itu, impor makanan dan minuman olahan untuk industri meningkat signifikan (58,41% yoy), sementara impor suku cadang dan perlengkapan barang modal serta barang modal kecuali alat angkutan relatif stagnan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan impor lebih banyak didorong oleh kebutuhan bahan baku produksi dibandingkan ekspansi investasi barang modal.

Grafik 1.26. Pangsa Impor Berdasarkan Kelompok Barang

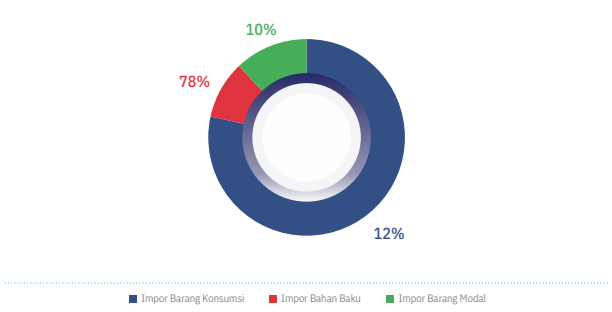

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.27. Nilai Impor Berdasarkan Kelompok Barang

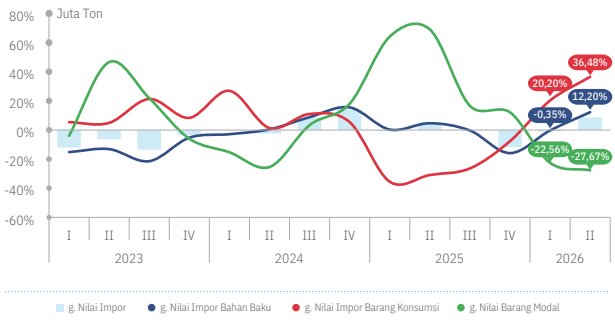

Sumber: Bea Cukai, diolah

1.5. Kinerja Lapangan Usaha Menunjukan Perbaikan

Kinerja LU Pertanian tumbuh solid pada triwulan II 2026. Kinerja LU Pertanian tumbuh meningkat pada triwulan II 2026 sebesar 1,10% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,41% (yoy), utamanya didorong oleh pulihnya lahan pasca bencana dan faktor musiman panen yang juga didukung dari meningkatnya harga komoditas perkebunan khususnya TBS.

Produksi padi sebagai komoditas utama relatif tertahan pada triwulan II 2026. Produksi padi Sumatera Utara pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 178 ribu ton, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 248 ribu Ton - (Grafik 1.28). Penurunan produksi ini dipengaruhi oleh telah selesainya panen raya di sebagian besar wilayah sentra produksi pada triwulan I 2026, sementara pada triwulan II 2026 sebagian wilayah memasuki periode masa tanam. Sejalan dengan kondisi tersebut, luas panen padi Sumatera Utara juga tercatat menurun menjadi sebesar 36 ribu hektar pada triwulan II 2026 seiring dengan berkurangnya lahan yang memasuki fase panen.

Tabel 1.5. Pertumbuhan PDRB Sisi Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara

	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
PDRB (%yoy)	4.88	4.95	5.20	5.10	4.67	4.69	4.55	4.23	4.98	5.06
Lapangan Usaha										
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.42	3.72	3.48	4.32	4.70	7.17	6.99	0.71	0.41	1.10
Industri Pengolahan	3.73	4.44	5.53	4.84	4.46	3.68	4.04	1.78	1.53	1.96
Konstruksi	6.43	6.45	6.44	6.71	0.87	0.02	0.01	-0.91	3.81	6.78
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.42	5.27	4.81	2.37	4.32	4.88	5.01	10.29	10.63	10.06
Transportasi dan Pergudangan	7.51	5.74	5.53	6.60	12.13	12.83	9.35	8.86	8.52	6.91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.63	9.75	12.65	13.74	6.42	5.14	-2.55	8.50	18.62	17.43
Informasi dan Komunikasi	7.85	6.71	7.52	7.54	5.29	6.08	6.36	8.24	11.35	6.96
Jasa Keuangan	4.25	6.06	1.95	3.29	3.26	0.54	3.20	5.42	4.28	4.71
Real Estate	3.03	3.32	7.90	7.42	5.45	5.29	10.69	12.95	8.79	2.05
Jasa Perusahaan	3.75	3.48	7.99	5.31	10.27	8.47	9.59	13.42	9.95	10.70
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.80	4.77	4.69	10.10	9.85	-1.51	-8.27	-2.12	0.10	5.04
Jasa Pendidikan	7.36	5.16	5.41	4.82	4.06	4.32	3.27	5.00	5.97	5.78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.69	5.49	5.59	5.61	6.63	4.59	8.84	12.99	7.78	5.36
Jasa lainnya	4.15	5.19	8.05	8.53	5.36	4.34	-1.21	5.20	14.91	10.57

Sumber: BPS

Grafik 1.28. Perkembangan Produksi Padi

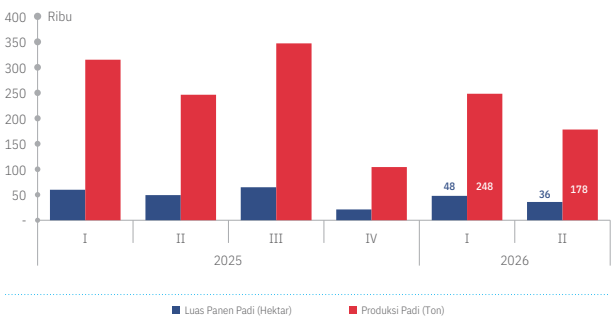

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, diolah

Grafik 1.29. Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit

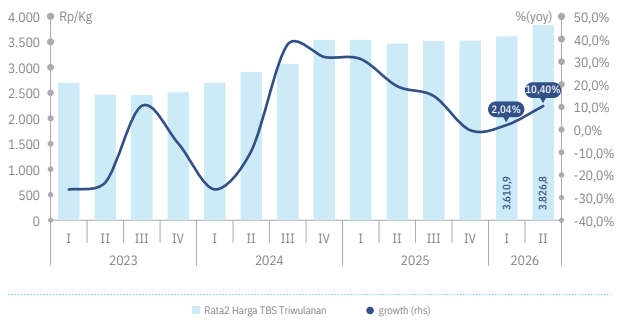

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, diolah

Di sisi lain, subsektor perkebunan menjadi penopang utama terhadap kinerja sektor pertanian, khususnya melalui komoditas kelapa sawit. Produksi sawit yang relatif meningkat pada triwulan II 2026, didukung oleh penguatan rata-rata harga Tandan Buah Segar (TBS) sebesar Rp3.826,8 per kg naik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp3.610,9 per kg – (Grafik 1.29). Peningkatan harga TBS ini memberikan insentif bagi pelaku usaha perkebunan untuk meningkatkan aktivitas produksi serta mendorong peningkatan pendapatan usaha.

Penguatan kinerja subsektor perkebunan tersebut juga sejalan dengan perbaikan harga komoditas CPO dan Karet di pasar global. Pertumbuhan harga CPO global meningkat signifikan dari sebelumnya terkontraksi sebesar -0,8% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 19,7% (yoy) pada triwulan II 2026 – (Grafik 1.30). Perbaikan serupa juga terjadi pada harga karet internasional yang tumbuh sebesar 32,8% (yoy) pada triwulan II 2026, setelah sebelumnya terkontraksi sebesar -0,5% (yoy) pada triwulan I 2026 (Grafik 1.30). Hal ini menunjukkan penguatan harga komoditas di pasar global turut memberikan dampak positif terhadap kinerja subsektor perkebunan di Sumatera Utara. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menopang pertumbuhan kinerja LU Pertanian pada Triwulan II 2026 di tengah tertahannya produktivitas padi.

Grafik 1.30. Perkembangan Harga Kelapa Sawit (CPO) dan Karet Dunia

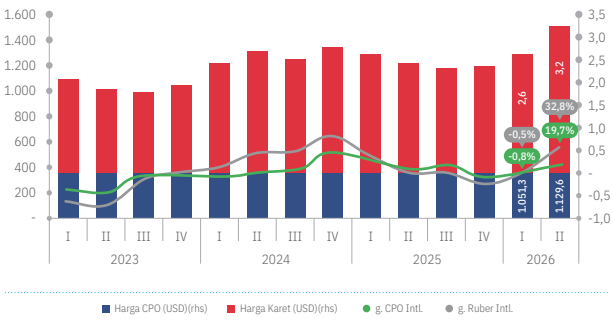

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.32. Kredit Pertanian

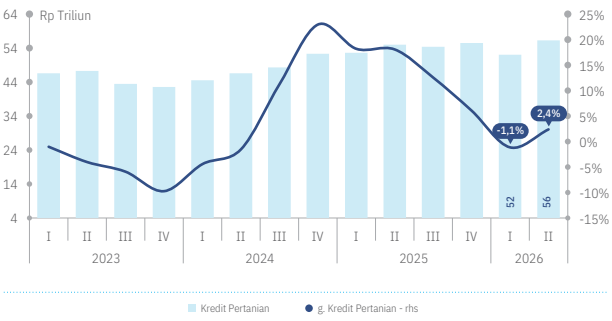

Sumber: LBU – Bank Indonesia, diolah

Dukungan terhadap kinerja LU Pertanian secara keseluruhan juga tecermin dari perbaikan indikator kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Utara pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 159,50, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1.31), menunjukkan daya beli petani relatif kuat. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh perbaikan NTP pada subsektor perkebunan rakyat (NTPR) dan tanaman pangan (NTPP).

NTPR pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 229,14, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 218,91. Perbaikan NTPR tersebut sejalan dengan penguatan harga komoditas perkebunan, terutama kelapa sawit dan karet, yang meningkatkan harga yang diterima petani. Sementara itu, NTPP tercatat sebesar 106,68, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 105,26. Peningkatan NTPP mengindikasikan perbaikan kondisi ekonomi petani tanaman pangan, sejalan dengan perkembangan harga yang diterima petani yang relatif lebih tinggi dibandingkan peningkatan harga yang dibayar petani.

Grafik 1.31. Nilai Tukar Petani

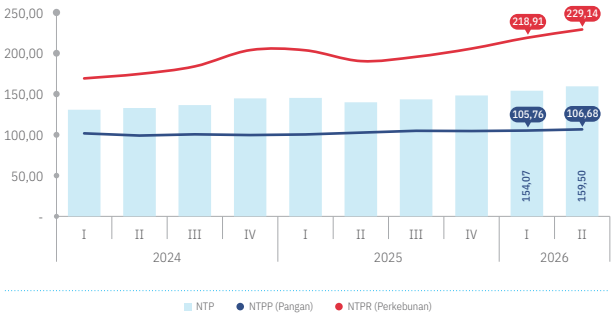

Sumber: BPS, diolah

Di sisi lain, dukungan pembiayaan terhadap sektor pertanian mengalami ekspansi. Kredit pertanian tercatat meningkat sebesar Rp56 triliun pada triwulan II 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp52 triliun, sejalan dengan laju pertumbuhan yang meningkat menjadi sebesar 2,4% (yoy) dari sebelumnya terkontraksi -1,1% (yoy) (Grafik 1.32).

Perkembangan tersebut mengindikasikan membaiknya akses pembiayaan pada sektor pertanian, sejalan dengan meningkatnya aktivitas usaha dan kebutuhan modal kerja pelaku usaha, serta turut mendukung kinerja LU Pertanian pada triwulan II 2026.

Secara keseluruhan, kinerja LU Pertanian Sumatera Utara pada triwulan II 2026 menunjukkan peningkatan didukung oleh penguatan harga komoditas pada subsektor perkebunan khususnya kelapa sawit dan karet. Peningkatan tersebut turut tecermin pada membaiknya NTP yang mengindikasikan perbaikan daya beli dan peningkatan pendapatan pelaku usaha.

Peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan II 2026 sejalan dengan menguatnya kinerja ekspor Sumatera Utara – (Grafik 1.17). LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 1,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,53% (yoy), utamanya didorong oleh meningkatnya nilai dan volume ekspor khususnya komoditas CPO dan produk turunannya, pertumbuhan kredit industri, serta peningkatan kapasitas produksi seiring dengan permintaan yang tinggi dari mitra dagang baik domestik maupun eksternal.

Dari sisi domestik, permintaan industri meningkat sejalan dengan aktivitas ekonomi dan lonjakan konsumsi masyarakat yang meningkat utamanya permintaan pada momentum libur panjang dan Iduladha. Peningkatan aktivitas ini turut terkonfirmasi oleh meningkatnya konsumsi listrik sektor industri (Grafik 1.33), yang mencerminkan penguatan aktivitas operasional dan produksi industri pengolahan.

Sementara dari sisi eksternal, peningkatan kinerja industri didorong oleh meningkatnya permintaan dari negara-negara mitra dagang utama, seperti Tiongkok, AS, Eropa, Korea Selatan, dan Singapura, yang dilaporkan berada pada level ekspansif – (Grafik 1.21).

Grafik 1.33. Konsumsi Listrik Bisnis dan Industri

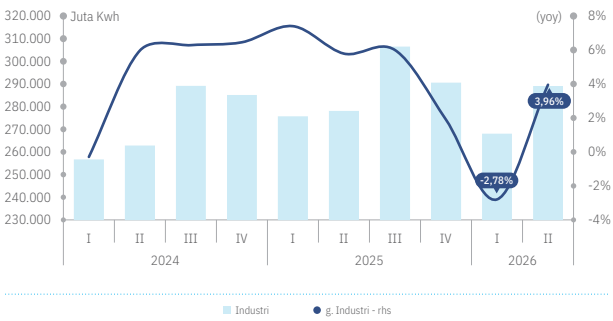

Sumber: PLN, diolah

Peningkatan kinerja LU industri pengolahan juga tecermin dari penguatan pembiayaan perbankan pada triwulan II 2026. Kredit industri pengolahan tercatat sekitar Rp85 triliun, dengan pertumbuhan yang terakselerasi menjadi 12,1% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat signifikan dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 5,1% (yoy) – (Grafik 1.34). Peningkatan pertumbuhan kredit tersebut mengindikasikan semakin kuatnya dukungan pembiayaan perbankan terhadap kebutuhan modal kerja dan investasi pelaku industri, sejalan dengan peningkatan aktivitas produksi dan kapasitas usaha.

Grafik 1.34. Kredit Industri Pengolahan

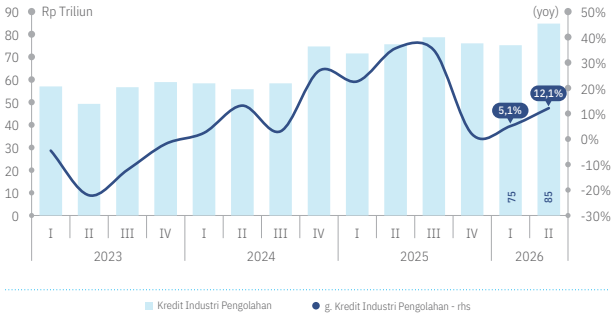

Sumber: LBU – Bank Indonesia, diolah

Selanjutnya, kinerja LU Konstruksi pada triwulan II 2026 menguat didorong pembangunan infrastruktur swasta dan pemerintah.

LU Konstruksi pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 6,78% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan sebesar 3,81% (yoy) pada triwulan I 2026. Akselerasi tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara. Peningkatan kinerja konstruksi antara lain didorong oleh realisasi **belanja modal gedung dan bangunan APBD Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota,** serta berlanjutnya pembangunan sejumlah ruas **Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)** di wilayah Sumatera Utara. Peningkatan aktivitas pembangunan pemerintah tersebut turut menjadi pendorong utama percepatan pertumbuhan LU Konstruksi pada triwulan II 2026.

Akselerasi kinerja konstruksi juga tecermin dari peningkatan nilai proyek konstruksi yang tercatat pada BCI Asia. Nilai proyek konstruksi menunjukkan akselerasi, pada triwulan II 2026 nilai proyek konstruksi mencapai 217,87 Juta USD, meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 100,56 Juta USD – (Grafik 1.35). Peningkatan nilai proyek tersebut mengindikasikan meningkatnya aktivitas dan realisasi proyek konstruksi pada triwulan II 2026. Penguatan tersebut didukung oleh **dimulainya pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang,** termasuk pembangunan halte dan berbagai infrastruktur pendukungnya. Realisasi proyek tersebut memberikan tambahan dorongan terhadap aktivitas konstruksi, khususnya pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan.

Grafik 1.35. Nilai Proyek BCI Asia

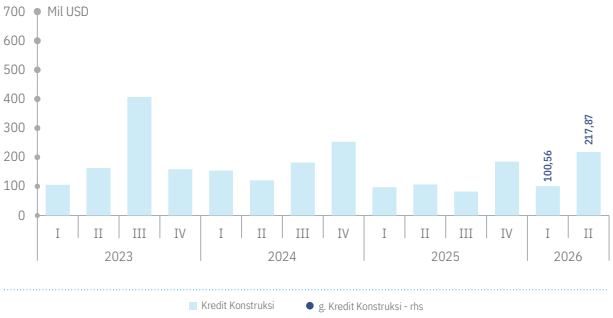

Sumber: BCI Asia, diolah

Sejalan dengan hal tersebut, indikator konsumsi semen juga mengalami perbaikan. Konsumsi semen pada triwulan II 2026 masih mengalami kontraksi -1,47% (yoy), namun mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sekitar -1,97% (yoy) – (Grafik 1.11). Perbaikan tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas pembangunan terus meningkat secara bertahap, meskipun belum sepenuhnya merata. Masih terbatasnya perbaikan konsumsi semen juga mengindikasikan bahwa sebagian proyek konstruksi masih berada pada tahap awal pembangunan atau belum memasuki fase yang membutuhkan material konstruksi dalam jumlah besar.

Di sisi lain, aktivitas konstruksi juga didukung oleh berlanjutnya pembangunan tenant di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) yang berada di Sumatera Utara. Pembangunan fasilitas produksi dan infrastruktur pendukung oleh tenant turut memperluas aktivitas konstruksi swasta di Sumatera Utara. Namun demikian, perkembangan konstruksi di kawasan industri masih menghadapi risiko tertahannya sebagian pipeline investasi konstruksi. Surat KADIN China yang diterbitkan pada awal 2026 menyebabkan sejumlah calon tenant asal China mengambil posisi *wait and see* untuk mengevaluasi kembali risiko dan keekonomian investasi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian *pipeline* investasi tertahan untuk melakukan konstruksi.

Grafik 1.36. Pertumbuhan Kredit di sektor Konstruksi

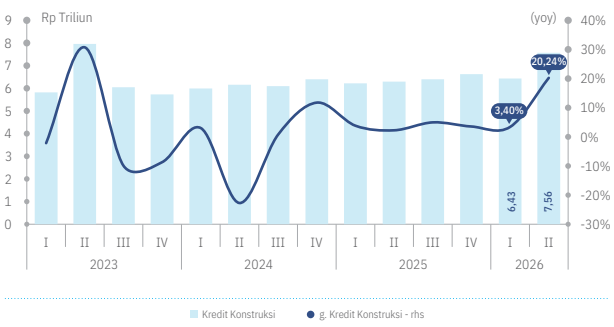

Sumber: LBU - Bank Indonesia, diolah

Perkembangan pembiayaan juga menunjukkan akselerasi. Kredit konstruksi tercatat berada pada Rp7,56 triliun dengan pertumbuhan sekitar 20,24% (yoy) terakselerasi dibandingkan 3,40% (yoy) pada triwulan I 2026 – (Grafik 1.37). Akselerasi tersebut mengindikasikan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan berbagai proyek konstruksi yang sedang berjalan. Peningkatan kebutuhan pembiayaan tersebut tecermin oleh pembangunan **Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)** yang berlangsung secara masif di Sumatera Utara. Hingga 30 Juni 2026, telah terbentuk **6.102 badan hukum koperasi,** dengan sebanyak **589 gerai koperasi telah rampung** (**sumber: Simkopdes**), sehingga pembangunan gerai dan fasilitas pendukungnya turut meningkatkan kebutuhan pembiayaan pada sektor konstruksi.

Grafik 1.37. Penambahan Pagu APBN Belanja Pemerintah Regional Sumut Juni 2026

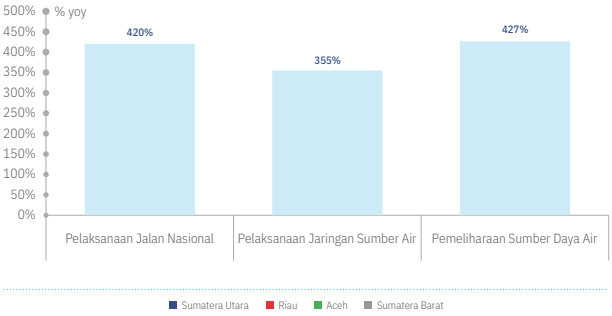

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Selain itu, akselerasi kinerja LU Konstruksi pada triwulan II 2026 turut didukung oleh meningkatnya aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Hal ini tecermin dari peningkatan pagu APBN untuk belanja pemerintah pada sejumlah satuan kerja pelaksana infrastruktur di Sumatera Utara, yang meningkat signifikan hingga sekitar 300–400% dibandingkan pagu anggaran triwulan I 2026 - (Grafik 1.37). Penambahan alokasi tersebut mendorong percepatan pelaksanaan berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya pada infrastruktur jalan, sumber daya air, prasarana strategis, serta kawasan permukiman yang terdampak bencana.

Sejalan dengan peningkatan pagu tersebut, realisasi anggaran juga menunjukkan percepatan yang signifikan pada triwulan II 2026, terutama menjelang Juni 2026. Peningkatan realisasi tersebut mengindikasikan bahwa tambahan anggaran telah mulai diterjemahkan ke dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, mulai dari perbaikan dan pemulihan infrastruktur yang terdampak hingga pembangunan kembali fasilitas pendukung.

Secara keseluruhan, kinerja LU Konstruksi Sumatera Utara pada triwulan II 2026 menunjukkan percepatan yang mencerminkan berlanjutnya aktivitas pembangunan infrastruktur pemerintah dan swasta. Penguatan tersebut didukung oleh peningkatan belanja modal gedung dan bangunan pemerintah, kelanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, dimulainya

pembangunan BRT Mebidang, pembangunan KDKMP, serta berlanjutnya pembangunan fasilitas tenant di KEK dan KI. Akselerasi nilai proyek konstruksi dan kredit konstruksi turut mengonfirmasi peningkatan aktivitas pembangunan. Meskipun demikian, masih terbatasnya perbaikan konsumsi semen dan tertahannya sebagian pipeline investasi asing menahan pertumbuhan kinerja konstruksi yang lebih tinggi.

Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan pada triwulan II 2026 tetap tumbuh tinggi meski menunjukkan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

LU Perdagangan tercatat tumbuh sebesar 10,06% (yoy) pada triwulan II 2026, sedikit termoderasi dibandingkan pertumbuhan sebesar 10,63% (yoy) pada triwulan I 2026. Tetap tingginya pertumbuhan tersebut didukung oleh perbaikan aktivitas perdagangan eksternal, penguatan aktivitas distribusi, serta peningkatan transaksi melalui kanal digital. Selain itu, tetap tingginya kunjungan wisatawan mancanegara dan berbagai momentum yang mendorong konsumsi dan mobilitas masyarakat turut menopang aktivitas perdagangan. Namun demikian, pertumbuhan sedikit tertahan oleh normalisasi konsumsi domestik setelah berakhirnya momentum Ramadan dan Idulfitri serta moderasi daya beli masyarakat.

Dari sisi ekspektasi, pelaku usaha ritel tetap menunjukkan optimisme yang cukup solid (Grafik 1.38), tecermin dari nilai Indeks Penjualan Riil yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, dari sisi ekspektasi, penjualan dan harga diprakirakan cenderung menurun dalam tiga bulan ke depan. Secara anekdotal, pelaku usaha mengindikasikan bahwa permintaan barang konsumsi mulai mengalami normalisasi utamanya didominasi konsumsi kebutuhan dasar, sementara konsumsi barang sekunder berlangsung secara lebih bertahap, sejalan dengan pola normalisasi permintaan domestik dan perilaku konsumsi masyarakat yang cenderung selektif (Grafik 1.2).

Dari sisi eksternal, kinerja perdagangan didukung oleh perbaikan permintaan ekspor. Hal ini tecermin dari indikator *Likert Scale* permintaan ekspor yang menunjukkan perbaikan menjadi sekitar 0,33 pada triwulan II 2026 – (Grafik 1.39), setelah sebelumnya masih berada pada zona negatif pada triwulan I 2026. Perbaikan tersebut sejalan dengan peningkatan nilai ekspor dan impor, yang mengindikasikan meningkatnya aktivitas perdagangan internasional dan turut mendorong aktivitas distribusi serta perdagangan barang secara keseluruhan. Selain itu, tetap tingginya kunjungan wisatawan mancanegara turut menjaga permintaan terhadap barang dan jasa sehingga menopang optimisme pelaku usaha ritel.

Peningkatan kinerja LU Perdagangan diikuti oleh penguatan aktivitas distribusi, yang tecermin dari perkembangan kredit perdagangan yang menunjukkan peningkatan. *Outstanding* kredit perdagangan tercatat meningkat menjadi Rp48,32 triliun pada triwulan II 2026, dengan pertumbuhan yang kembali positif sebesar 1,85% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,45% (yoy) pada triwulan I 2026 – (Grafik 1.40). Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas perdagangan dan distribusi barang tetap kuat, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk mendukung kelancaran arus barang dan pengelolaan persediaan. Penguatan aktivitas perdagangan

Grafik 1.38. Survei Penjualan Eceran

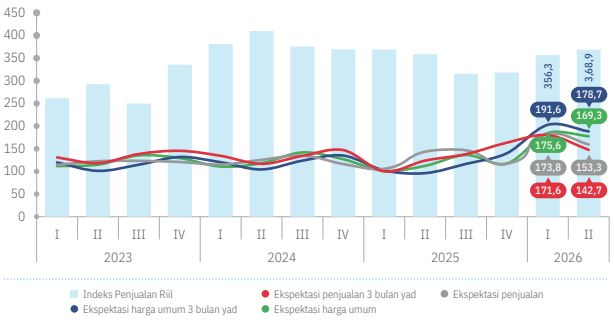

Sumber: Survey Penjualan Eceran, Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.39. *Likert Scale* Permintaan Ekspor

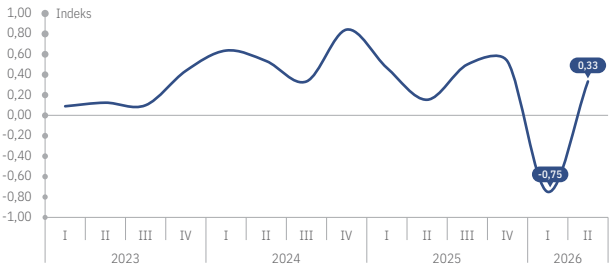

Sumber: Liaison, Bank Indonesia, diolah

internasional serta peningkatan transaksi melalui berbagai kanal turut mendorong kebutuhan pembiayaan perdagangan dan distribusi.

Tetap kuatnya aktivitas distribusi tersebut turut didukung oleh sejumlah momentum yang mendorong peningkatan konsumsi dan mobilitas masyarakat. Momentum **libur panjang dan Iduladha** mendorong peningkatan kebutuhan dan pergerakan barang untuk memenuhi permintaan masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan sejumlah kegiatan berskala besar, seperti Rakernas APEKSI, HUT APKASI, dan Piala AFF U-19, turut meningkatkan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah penyelenggaraan. Peningkatan aktivitas tersebut pada akhirnya mendorong kebutuhan penyediaan dan distribusi barang, baik untuk memenuhi konsumsi masyarakat maupun kebutuhan pendukung.

Grafik 1.40. Kredit Perdagangan

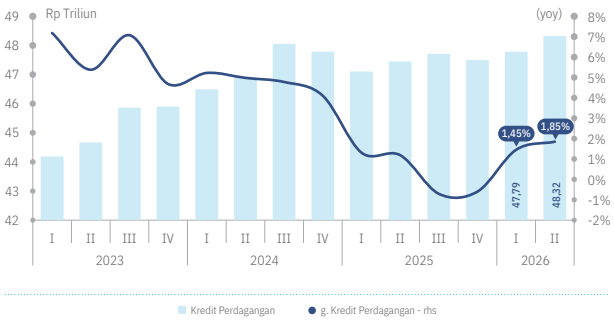

Sumber: LBU – Bank Indonesia, diolah

Di sisi lain, perkembangan transaksi *e-commerce* menunjukkan pertumbuhan yang meningkat pada triwulan II 2026 – (Grafik 1.2). Peningkatan transaksi digital ini mencerminkan adanya pergeseran perilaku konsumsi masyarakat ke kanal digital/daring yang semakin kuat, didukung oleh kemudahan akses, intensitas promosi, serta preferensi konsumen terhadap harga yang lebih kompetitif.

Tetap tingginya kinerja LU Perdagangan turut ditopang oleh terjaganya daya beli dan konsumsi masyarakat. Hal ini antara lain didukung oleh peningkatan realisasi **Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa, sejalan** dengan pembayaran **THR dan gaji ke-13, penambahan ASN baru, serta akselerasi pembayaran gaji tenaga pendidik** dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan aliran pendapatan dan belanja tersebut turut menjaga aktivitas konsumsi masyarakat, termasuk melalui kanal digital, sehingga mendukung pertumbuhan transaksi *e-commerce* dan menjaga kinerja perdagangan tetap tumbuh tinggi pada triwulan II 2026.

Grafik 1.41. Pertumbuhan Kredit Konsumsi

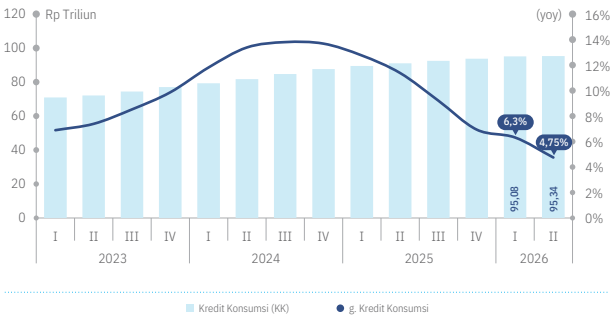

Sumber: LBU – Bank Indonesia, diolah

Namun dari sisi domestik, pertumbuhan kinerja LU Perdagangan yang lebih tinggi tertahan oleh perkembangan kredit konsumsi yang melambat. Pertumbuhan kredit konsumsi tercatat tumbuh sebesar 4,75% (yoy) pada triwulan II 2026, melambat dibandingkan 6,32% (yoy) pada triwulan sebelumnya – (Grafik 1.41). Sejalan dengan itu, berkurangnya aktivitas lembaga keagamaan setelah berakhirnya momentum Ramadan dan Idulfitri turut menyebabkan aktivitas perdagangan kembali ke pola yang lebih normal. Perlambatan pertumbuhan mengindikasikan konsumsi rumah tangga tetap tumbuh, namun lebih terbatas seiring masyarakat yang semakin selektif berbelanja dan normalisasi permintaan pasca periode konsumsi tinggi HBKN di triwulan I 2026.

Secara keseluruhan, kinerja LU Perdagangan pada triwulan II 2026 tetap tumbuh tinggi meskipun mengalami normalisasi dari pertumbuhan yang lebih tinggi pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan yang masih mencapai 10,06% (yoy) menunjukkan bahwa fundamental aktivitas perdagangan tetap kuat, didukung oleh perbaikan permintaan eksternal, peningkatan transaksi e-commerce, tetap tingginya kunjungan wisman, serta berbagai momentum yang mendorong konsumsi dan mobilitas masyarakat. Sementara itu, berakhirnya momentum Ramadan dan Idulfitri serta moderasi daya beli masyarakat menjadi faktor yang menahan pertumbuhan sehingga mengalami perlambatan secara terbatas dibandingkan triwulan I 2026.

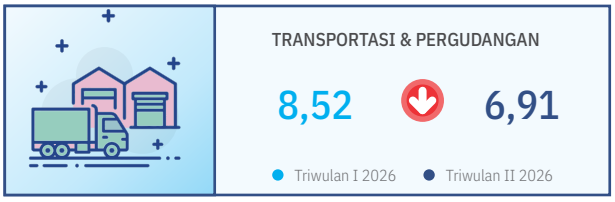

Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan mencatatkan pelemahan pada triwulan II 2026 sebesar 6,91% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,52% (yoy). Perlambatan ini mencerminkan normalisasi aktivitas mobilitas dan logistik setelah tingginya permintaan pada periode tahun baru, HBKN Idul fitri yang sebelumnya mendorong lonjakan pergerakan penumpang dan distribusi barang.

Sejalan dengan kondisi normalisasi tersebut, sisi logistik juga menunjukkan penurunan pada aktivitas bongkar dan muat. Pada triwulan II 2026, aktivitas bongkar dan muat termoderasi masing-masing menjadi -3,91% (yoy) dan -29,67% (yoy) – (Grafik 1.42). Penurunan tersebut mencerminkan moderasi arus masuk barang dan bahan baku seiring normalisasi permintaan domestik pascaperiode HBKN.

Grafik 1.42. Aktivitas Bongkar Muat Barang Luar Negeri di Pelabuhan Belawan

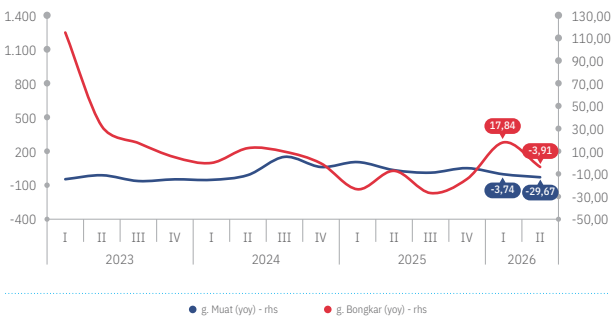

Sumber: BPS, diolah

Dari sisi mobilitas, kinerja Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami moderasi juga tecermin pada perkembangan jumlah penumpang angkutan udara, baik domestik maupun internasional. Pada triwulan II 2026, total penumpang angkutan udara domestik tercatat sekitar 337 ribu orang dan penumpang internasional sekitar 182 ribu orang – (Grafik 1.43). Meskipun masih

Grafik 1.43. Penumpang Angkutan Udara Kualanamu

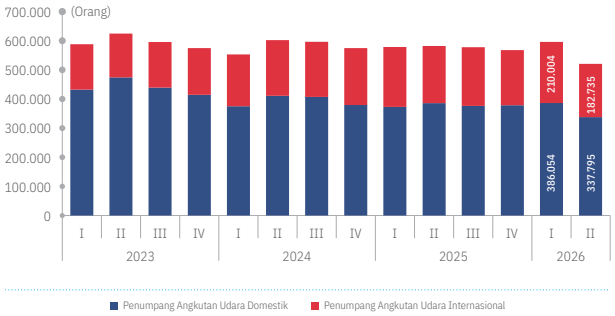

Sumber: BPS, diolah

berada pada level yang cukup tinggi, volume penumpang menunjukkan pola normalisasi setelah tingginya mobilitas pada triwulan I 2026. Pergerakan penumpang domestik tetap terjaga didukung oleh aktivitas rutin dan mobilitas selama berlangsungnya HBKN nasional dan momentum libur panjang sekolah, sementara penumpang internasional mulai menunjukkan peningkatan yang lebih gradual seiring pemulihan perjalanan luar negeri.

Selain itu aktivitas transportasi laut menunjukkan penurunan jumlah penumpang kedatangan di Pelabuhan dibandingkan triwulan I 2026 meskipun pertumbuhan secara yoy pada triwulan II 2026 menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah kedatangan penumpang melalui pelabuhan tumbuh sebesar 14,19% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan pada triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar -8,04% (yoy) – (Grafik 1.44). Penurunan jumlah penumpang sejalan dengan normalisasi perjalanan domestik dan distribusi regional.

Grafik 1.44. Perkembangan Kunjungan Kapal

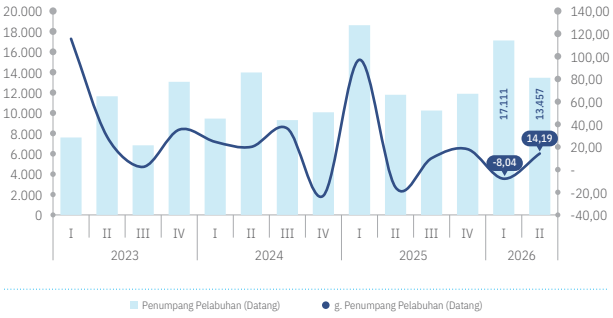

Sumber: BPS, diolah

Secara keseluruhan, kinerja LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan II 2026 masih tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan dari periode sebelumnya. Perlambatan tersebut terutama mencerminkan normalisasi aktivitas mobilitas dan logistik pasca peningkatan pada triwulan I 2026, sejalan dengan berlalunya momentum HBKN Idulfitri dan periode puncak perjalanan masyarakat. Meskipun demikian, aktivitas transportasi masih relatif terjaga, tecermin dari volume penumpang angkutan udara yang tetap tinggi serta pertumbuhan positif jumlah penumpang angkutan laut secara yoy. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permintaan terhadap jasa transportasi dan aktivitas distribusi barang tetap kuat, meskipun dengan intensitas yang lebih moderat dibandingkan triwulan sebelumnya.

BOKS 1

SUMATRA INVEST DAY 2026 : Upaya Akselerasi Investasi Sumatera

Perekonomian Sumatera pada triwulan II 2026 tumbuh 5,06% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan nasional. Realisasi investasi yang belum optimal serta terbatasnya integrasi ekonomi antarwilayah di Sumatera sebagai salah satu risiko yang berpotensi menghambat peningkatan nilai tambah, melemahkan efek pengganda (multiplier effect), dan memperlambat transformasi struktural ekonomi Sumatera.

Kinerja investasi Sumatera dalam tiga tahun terakhir tercatat konsisten tumbuh di bawah rata-rata nasional, dengan struktur perekonomian yang masih ditopang dominan oleh konsumsi rumah tangga. Kondisi ini terjadi di tengah potensi realisasi investasi yang cukup besar, tecermin dari capaian realisasi investasi Sumatera pada 2025 yang mencapai USD 20,31 miliar atau setara Rp326,98 triliun. Dengan demikian, tantangan utama bukan terletak pada rendahnya minat investor, melainkan pada belum optimalnya konsolidasi potensi proyek lintas provinsi menjadi portofolio investasi yang benar-benar siap ditawarkan

Merespons kondisi tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara selaku menginisiasi *Sumatra Investment Day* (SID) 2026 berkolaborasi dengan BKPM/Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Pariwisata, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-Sumatera. Inisiatif ini merupakan langkah transformasi pendekatan promosi investasi, dari yang semula bersifat parsial berbasis provinsi, menjadi kerangka promosi investasi yang terintegrasi pada level regional Sumatera.

Satu Dekade Dinamika Investasi Sumatera: Dari *Foreign-Led ke Domestic-Led*

Data realisasi investasi Sumatera sejak 2010 memperlihatkan pertumbuhan skala yang signifikan, dari Rp11,03 triliun (2010) menjadi Rp326,98 triliun (2025), meningkat hampir 30 kali lipat dalam 15 tahun. Sepanjang 2010–2018, Penanaman Modal Asing (PMA) konsisten mendominasi komposisi investasi Sumatera, dengan pangsa rata-rata di atas 55%. Namun, sejak 2019, polanya berbalik: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyalip PMA dan tidak pernah tergeser lagi, tumbuh dari Rp90,49 triliun (2019) menjadi Rp214,90 triliun (2025), sementara PMA relatif stagnan di kisaran Rp90–134 triliun pada periode yang sama.

Grafik 1. Realisasi Investasi Sumatera 2010–2025 (Rp triliun

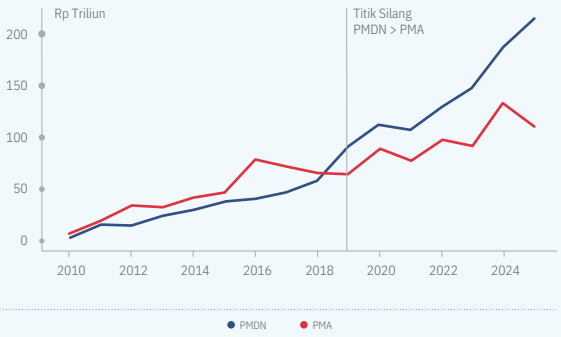

Sumber: BKPM, diolah

Pergeseran menjadi *domestic-led* ini positif dari sisi ketahanan terhadap gejolak eksternal, namun juga menyimpan implikasi lain: konsentrasi PMA yang semakin menajam pada satu provinsi, yakni Kepulauan Riau. Pangsa Kepulauan Riau terhadap total PMA Sumatera naik dari 17,2% (2015) menjadi 38,8% (2025), dan mencapai 45,4% pada semester I 2026 — hampir separuh dari seluruh PMA yang masuk ke Sumatera terserap satu provinsi, sejalan dengan momentum kawasan Batam, Rempang, dan Nongsa sebagai simpul investasi asing baru. Salah satu pendorong konkret konsentrasi ini tecermin dari investasi industri elektronik (KBLI 26 – Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik), yang pangsanya terhadap total investasi Sumatera naik dari 0,7% (2015) menjadi 2,1% (2025) dan terus terakselerasi menjadi 3,2% pada semester I 2026 (tumbuh 28,9%, yoy) — dengan lebih dari 99% realisasinya berasal dari PMA yang seluruhnya terserap di Kepulauan Riau.

Pergeseran Peta Sektoral: Konektivitas Naik, Pariwisata Tertinggal

Data sektoral investasi Sumatera memperkuat gambaran transformasi struktural yang tengah berlangsung. Pergeseran pangsa sektor terbesar dalam satu dekade terakhir terjadi pada Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi — naik dari 5,5% (2015) menjadi 15,0% (2025), dan kini menjadi sektor dengan pangsa terbesar yaitu sebesar 12,2% pada semester I 2026. Sebaliknya, dua sektor yang dahulu mendominasi justru menyusut tajam: Industri Kimia dan Farmasi turun dari 18,9% menjadi 6,6% dan Listrik, Gas, serta Air turun dari 18,2% menjadi 9,6%. Sementara itu, sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan — proksi terdekat hilirisasi berbasis kelapa sawit — naik pangsanya dari 5,3% (2015) menjadi 8,4% (2025), dan tumbuh 12,3% (yoy) pada semester I 2026, menunjukkan hilirisasi SDA sebagai salah satu fokus SID memang tengah menguat secara riil (BKPM, diolah).

Grafik 2. Pergeseran Pangsa Sektor Investasi Sumatera, 2015 vs 2025

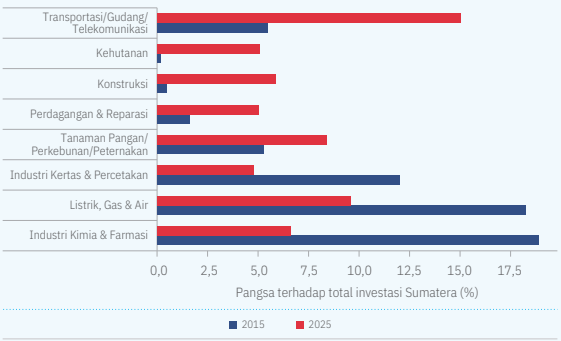

Sumber: BKPM, diolah

Namun, data yang sama juga memperlihatkan kesenjangan sektor Hotel dan Restoran sebagai proksi terdekat investasi fisik pariwisata yang justru menunjukkan tren berkebalikan. Pangsanya menyusut dari 2,7% (2015) menjadi 2,1% (2025), dan terkontraksi –15,9% (yoy) pada semester I 2026. Artinya, realisasi investasi fisik pada sektor ini belum menunjukkan akselerasi yang sepadan dengan ambisi tersebut sehingga menjadi salah satu sektor yang harus dikawal secara ketat.

Kedua sektor strategis tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama penetapan hilirisasi dan pariwisata sebagai sektor prioritas dalam penyelenggaraan SID 2026 sebagai upaya akselerasi untuk mendorong kinerja kedua sektor tersebut, dengan tujuan utama bukan sekadar mempercepat closing kesepakatan investasi dalam jangka pendek, melainkan membangun perspektif positif investor terhadap prospek investasi Sumatera secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pipeline proyek investasi yang benar-benar siap ditawarkan kepada investor.

Penguatan Kualitas *Pipeline* Melalui Kurasi Bertahap

Faktor yang membedakan SID dari forum promosi investasi pada umumnya terletak pada proses kurasi proyek yang dilakukan secara berjenjang sebelum forum utama diselenggarakan. Sepanjang semester I 2026, KPw BI Provinsi Sumatera Utara melaksanakan rangkaian penyaringan *pipeline* investasi secara bertahap: diawali dengan pemetaan awal terhadap proyek dari 10 provinsi di Sumatera, dilanjutkan dengan proses verifikasi bersama Kementerian Investasi/BKPM yang menyaring 36 usulan proyek menjadi beberapa *shortlist,* hingga tahap penajaman *business case* melalui simulasi *pitching* yang mengerucutkan *pipeline* menjadi 23 proyek final yang dinilai siap dipasarkan kepada investor.

Pendekatan ini perlu dipandang sebagai pilihan strategis untuk mengatasi persoalan struktural yang selama ini menghambat konversi potensi investasi daerah, yaitu minimnya kelengkapan dokumen fundamental proyek seperti studi kelayakan, dokumen lingkungan (AMDAL), dan masterplan kawasan. Tanpa kurasi yang ketat di tahap hulu, usulan proyek daerah cenderung berhenti pada tataran potensi tanpa kejelasan risiko komersial,

sehingga sulit ditransformasikan menjadi *Investment Project Ready to Offer* (IPRO).

Desain Forum sebagai Instrumen Akselerasi

Forum puncak SID 2026 yang diselenggarakan pada 22–23 Juli 2026 di Medan berhasil memfasilitasi interaksi antara 23 proyek unggulan dari 10 provinsi di Sumatera dengan 82 investor domestik dan internasional, disertai kehadiran jajaran Konsulat Jenderal dan Konsul Kehormatan negara sahabat, serta melibatkan sinergi bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Rangkaian SID juga tidak berdiri sendiri, melainkan disiapkan melalui *Sumatra Connect – Road to Sumatra Investment Day 2026* pada 18–19 Mei 2026 di Medan, yang mempertemukan pelaku industri pariwisata domestik dengan sekitar 40 perwakilan *international travel buyers* dari berbagai negara. Rangkaian bertahap ini memperlihatkan bahwa forum puncak SID merupakan puncak dari proses pembangunan kepercayaan dan jejaring yang telah dirintis sejak semester I 2026, bukan aktivitas satu kali yang berdiri sendiri — meskipun sebagaimana ditunjukkan data sektoral di atas, upaya membangun kepercayaan pada sektor pariwisata belum sepenuhnya terkonversi menjadi realisasi investasi fisik.

Struktur forum dibagi kedalam tiga sesi utama, yaitu forum investasi *(talkshow)* untuk memperkuat narasi dan kepercayaan investor pada level makro kawasan, *pitching* arena untuk mempertemukan pemilik proyek dengan investor institusional dan modal ventura, serta *deal room* sebagai ruang negosiasi langsung *(one-on-one meeting/O3M)* bagi investor yang telah menunjukkan minat spesifik terhadap proyek tertentu. Melalui desain ini, SID berfungsi sebagai instrumen akselerasi transisi kesepakatan dari tahap penjajakan menuju penerbitan *Letter of Intent* (LoI), proses uji kelayakan *(due diligence),* hingga realisasi investasi fisik.

Arah Tindak Lanjut dan Keberlanjutan Program

Guna menjamin keberlanjutan momentum yang terbentuk selama forum berlangsung, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) se-Sumatera akan menempuh tiga langkah strategis, yaitu mengawal secara ketat proses eskalasi hasil business matching menjadi LoI, due diligence, dan realisasi penanaman modal; memperluas program targeted investor engagement pada proyek prioritas dengan rekam jejak minat tertinggi; serta mengintensifkan kolaborasi teknis bersama Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait guna mengurai hambatan perizinan dan infrastruktur di lapangan.

Pada level wilayah, SID juga diposisikan bukan sebagai program berdiri sendiri, melainkan bagian dari sejumlah agenda tindak lanjut yang disusun untuk merespons risiko pertumbuhan Sumatera 2026, mencakup perluasan kurasi proyek investasi, perluasan pemasaran, dan perubahan perspektif investasi yang telah mendorong terlaksananya *one-on-one meeting* antarinvestor dan proyek se-Sumatera, dilengkapi agenda integrasi pariwisata melalui koridor pariwisata regional dan agrowisata, serta integrasi perdagangan melalui Kerja sama Antardaerah (KAD) Sumatera. Dengan mempertimbangkan dinamika data yang telah diuraikan, keberhasilan tindak lanjut ini sebaiknya diukur tidak hanya dari skala partisipasi forum, tetapi juga dari sejauh mana realisasi investasi pada sektor hilirisasi dan pariwisata benar-benar bergerak dari komitmen di atas kertas menjadi realisasi fisik pada triwulan-triwulan mendatang. Dengan demikian, SID 2026 dapat dimaknai bukan sebagai forum tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai simpul strategis dari kontinum inisiatif jangka panjang menuju Invest in Sumatra dan Visit Sumatra.

02.

Asesmen Inflasi

Inflasi Bulanan
Gabungan Kab/Kota IHK
Sumatera Utara

0,23%

Juni 2026, mtm

Rerata 3 Tahun
Inflasi Gabungan Kab/Kota
IHK Sumatera Utara

2,38%

Rata-rata 3 tahun, yoy

Inflasi Tahunan
Gabungan Kab/Kota
IHK Sumatera Utara

4,79%

Juni 2026, yoy

Inflasi Tahun Kalender
Gabungan Kab/Kota
IHK Sumatera Utara

0,90%

Juni 2026, ytd

02.

Inflasi Sumatera Utara pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 4,79% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,86% (yoy) serta berada di atas inflasi Nasional sebesar 3,34% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh meningkatnya mobilisasi dan permintaan masyarakat menjelang dan selama libur sekolah Juni 2026. Selain itu, penyesuaian harga BBM jenis Pertamax pada 10 Juni 2026 turut memberikan kontribusi terhadap tingginya inflasi, khususnya pada komoditas bensin. Di sisi lain, ketidakpastian geopolitik global mendorong peningkatan preferensi investor terhadap aset safe haven, yang meningkatkan permintaan emas dan berimbas pada kenaikan harga emas global.

Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta Kelompok Transportasi. Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau didorong oleh berakhirnya masa panen raya komoditas cabai merah dan cabai rawit, masih berlangsungnya masa tanam komoditas beras, dan perubahan harga Gabah Kering Giling (GKG). Sejalan dengan peningkatan harga emas dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global, harga emas perhiasan menjadi penyumbang utama inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Penyesuaian harga BBM Pertamax dan tingginya permintaan angkutan udara menjelang dan selama libur sekolah Juni 2026 turut menekan inflasi Kelompok Transportasi.

Secara spasial, wilayah di Sumatera Utara yang mengalami inflasi tertinggi, yaitu Kota Gunungsitoli (6,25%, yoy), Kabupaten Labuhanbatu (5,81% yoy), dan Kota Sibolga (5,79%, yoy). Inflasi terendah tercatat di Kabupaten Karo (4,47%, yoy). Mayoritas Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara mengalami inflasi yang disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Guna menahan laju inflasi lebih tinggi pada triwulan laporan, koordinasi TPID yang semakin baik dilakukan melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), seperti: (i) pelaksanaan pasar murah 4T (tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat komoditas); (ii) perluasan jangkauan distribusi barang, termasuk pelaksanaan sidak pasar yang masif; (iii) dukungan terhadap peningkatan produksi; (iv) dorongan prioritisasi pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara melalui KAD, serta (v) perluasan kemitraan UMKM dan SPPG dalam menjaga ketersediaan pasokan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan diversifikasi menu.

2.1. Kinerja Inflasi Triwulan II 2026

Inflasi Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 4,79% (yoy), relatif meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 3,86% (yoy). Realisasi tersebut juga masih lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 yang sebesar 1,25% (yoy), sehingga mengindikasikan tekanan harga tahunan yang cukup tinggi. Dibandingkan dengan inflasi Nasional yang sebesar 3,34% (yoy), inflasi Sumatera Utara juga tercatat lebih tinggi. Secara spasial di wilayah Sumatera, inflasi tahunan Sumatera Utara merupakan yang tertinggi kedua setelah Aceh (Grafik 2.2).

Tekanan inflasi pada periode laporan tidak terlepas dari meningkatnya mobilisasi dan kenaikan permintaan masyarakat menjelang dan selama libur sekolah Juni 2026. Peningkatan permintaan tersebut berlangsung di tengah pertumbuhan pasokan yang relatif lebih terbatas pada beberapa komoditas, sehingga mendorong kenaikan harga. Selain itu, peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax pada 10 Juni 2026 turut berdampak pada tingginya inflasi bensin triwulan II 2026. Di sisi lain, ketidakpastian geopolitik global meningkatkan minat masyarakat terhadap *safe haven assets.* Kondisi ini mendorong peningkatan permintaan emas dan berdampak pada kenaikan harga emas global.

Secara umum, inflasi Provinsi Sumatera Utara pada triwulan laporan bersumber dari kenaikan harga yang terjadi merata di seluruh kelompok pengeluaran. Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan sumbangan inflasi sebesar 2,70% (yoy), diikuti oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, Transportasi, serta Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran masing-masing dengan andil sebesar 0,60% (yoy), 0,46% (yoy), dan 0,30% (yoy).

Adapun komoditas utama penyumbang inflasi antara lain emas perhiasan, cabai merah, bensin, beras, dan cabai rawit yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,53% (yoy), 0,41% (yoy), 0,18% (yoy), 0,17% (yoy), dan 0,17% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan terjadi sejalan dengan naiknya permintaan dan tingginya harga komoditas emas internasional sebagai salah satu instrumen investasi safe haven di tengah konflik geopolitik dunia yang terjadi. Selanjutnya, peningkatan harga komoditas hortikultura yaitu cabai merah dan cabai rawit secara umum disebabkan oleh penurunan produksi akibat belum masuknya masa panen di daerah sentra produksi (e.g Kabupaten Batubara dan Kabupaten Deli Serdang). Sementara peningkatan harga beras disebabkan oleh baru masuknya musim tanam ke II dan naiknya harga Gabah Kering Giling (GKG) di kisaran Rp8.700-Rp9.300/kg di tingkat petani, serta terganggunya aktivitas panen akibat terbatasnya mesin panen *(combine harvester).* Di samping itu, peningkatan permintaan untuk program MBG dan libur sekolah turut mendorong peningkatan kebutuhan berbagai komoditas pangan baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun restoran. Selanjutnya, kenaikan harga bensin dipengaruhi oleh penyesuaian tarif BBM Pertamax sebesar 32% dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026.

Di sisi lain, inflasi tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas. Beberapa komoditas menunjukkan deflasi cukup dalam yang turut menahan tingkat inflasi Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan. Komoditas dengan andil deflasi tertinggi, antara lain detergen cair (-0,02%), popok bayi sekali pakai (-0,02%), daging babi (-0,02%), ketimun (-0,02%), dan kangkung (-0,01%). Penurunan harga komoditas tersebut disebabkan oleh membaiknya ketersediaan dan pasokan di pasar, khususnya pada komoditas sayur mayur (ketimun dan kangkung), serta relatif terjaganya permintaan masyarakat.

Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

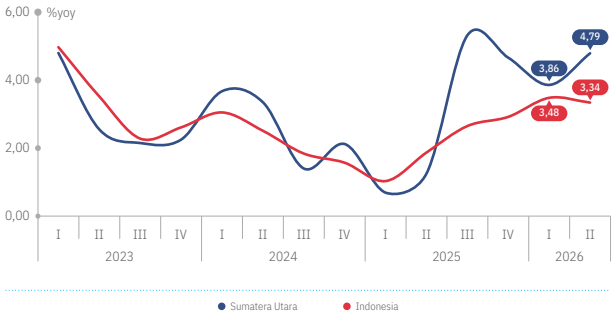

Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

Grafik 2.2. Perkembangan Inflasi Provinsi Sumatera Utara dan Daerah Lainnya

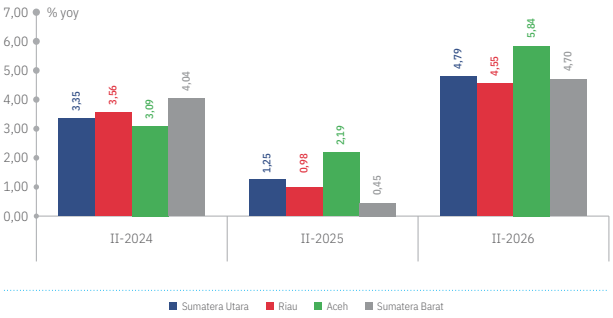

Sumber: BPS, diolah

Tabel 2.1. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan Triwulan II 2026

Inflasi Tw II 2026					
Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)
April		Mei		Juni	
Emas Pehiasan	0,59	Emas Perhiasan	0,57	Emas Perhiasan	0,53
Daging Ayam Ras	0,29	Tomat	0,29	Cabai Merah	0,41
Beras	0,28	Beras	0,24	Bensin	0,18
Ikan Dencis	0,21	Cabai Merah	0,18	Beras	0,17
Tomat	0,16	Ikan Dencis	0,16	Cabai Rawit	0,17

Deflasi Tw II 2026					
Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)
April		Mei		Juni	
Cabai Merah	-0,69	Bawang Putih	-0,10	Detergen Cair	-0,02
Bawang Putih	-0,13	Kentang	-0,03	Popok Bayi Sekali Pakai	-0,02
Bawang Merah	-0,09	Daging Babi	-0,01	Daging Babi	-0,02
Kentang	-0,09	Detergen Cair	-0,01	Ketimun	-0,02
Kelapa	-0,02	Celana Panjang Katun Pria	-0,01	Kangkung	-0,01

Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

2.2. Andil Inflasi Berdasarkan Kelompok

Grafik 2.3. Distribusi Andil Inflasi per Kelompok

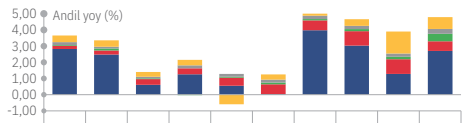

	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
	2024				2025				2026	
Lainnya	0,41	0,40	0,29	0,34	-0,59	0,32	0,44	0,41	1,36	0,73
Penyediaan Mamin/Restoran	0,18	0,11	0,10	0,18	0,17	0,18	0,21	0,20	0,20	0,30
Transportasi	0,05	0,12	0,05	-0,03	0,06	0,11	0,08	0,13	0,15	0,46
Perawatan Pribadi	0,20	0,25	0,35	0,37	0,50	0,60	0,61	0,89	0,91	0,60
Mamin Tembakau	2,82	2,48	0,61	1,26	0,55	0,04	3,98	3,03	1,28	2,70

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau memberikan andil inflasi terbesar sebesar 2,70% (yoy) pada triwulan laporan. Andil inflasi kelompok ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dengan andil inflasi sebesar 1,28% (yoy) (Grafik 2.3). Tekanan inflasi kelompok ini terutama bersumber dari kenaikan harga cabai merah, beras, dan cabai rawit yang memberikan andil masing-masing sebesar 0,41% (yoy), 0,17% (yoy), dan 0,17% (yoy). Kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit disebabkan oleh penurunan produksi akibat belum masuknya masa panen di daerah sentra produksi (e.g Kabupaten Batubara dan Kabupaten Deli Serdang). Sementara itu, peningkatan harga beras disebabkan oleh baru masuknya musim tanam ke II dan naiknya harga Gabah Kering Giling (GKG) di kisaran Rp8.700-Rp9.300/kg di tingkat petani, serta terganggunya aktivitas panen akibat terbatasnya mesin panen *(combine harvester).*

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya memberikan andil inflasi terbesar kedua sebesar 0,60% (yoy) pada triwulan laporan. Andil inflasi kelompok ini menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami andil inflasi sebesar 0,91% (yoy) - (Grafik 2.3). Tekanan inflasi kelompok ini terutama bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan yang memberikan andil sebesar 0,53% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan terutama dipengaruhi oleh masih tingginya harga emas dunia serta permintaan terhadap emas sebagai instrumen investasi safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. World Bank mencatat bahwa meskipun harga emas mengalami koreksi pada triwulan II 2026 setelah kenaikan tajam pada triwulan sebelumnya, rata-rata harga emas pada semester I 2026 masih 37% lebih tinggi dibandingkan rata-rata 2025. Kondisi tersebut turut meningkatkan harga emas di pasar domestik dan kemudian ditransmisikan pada harga emas perhiasan di tingkat konsumen.

Kelompok Transportasi

Kelompok Transportasi memberikan andil inflasi tertinggi ketiga sebesar 0,46% (yoy) pada triwulan laporan. Andil inflasi kelompok ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dengan andil inflasi sebesar 0,15% (yoy) (Grafik 2.3). Andil inflasi pada kelompok ini disumbang oleh kenaikan harga bensin dan angkutan udara dengan andil masing-masing sebesar 0,18% (yoy) dan 0,15% (yoy). Kenaikan harga bensin seiring dengan penyesuaian harga BBM Pertamax sebesar 32% dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara didorong oleh meningkatnya mobilisasi masyarakat dan permintaan perjalanan menjelang dan selama libur sekolah Juni 2026.

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran memberikan andil inflasi sebesar 0,30% (yoy) pada triwulan laporan. Andil inflasi tersebut sedikit meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,20% (yoy). Komoditas yang menjadi penyumbang inflasi dari kelompok ini adalah ayam goreng, mie, dan ketupat/lontong sayur dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,06% (yoy), 0,05% (yoy), dan 0,03% (yoy). Kenaikan harga makanan tersebut didorong oleh peningkatan biaya bahan baku antara lain daging ayam ras, beras, dan gandum. *Food Agriculture Organization* (FAO) juga telah memprakirakan pasokan gandum global relatif tertekan disebabkan oleh cuaca ekstrem di negara produsen utama. Proyeksi produksi gandum periode 2026-2027 turun hingga 3,8% menjadi 810,9 juta ton, yang dapat berdampak pada kenaikan harga produk turunan seperti mi instan dan roti. Selain itu, peningkatan kebutuhan bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan program MBG serta meningkatnya mobilitas dan konsumsi masyarakat menjelang dan selama libur sekolah, turut mendorong permintaan pada usaha penyediaan makanan dan minuman/restoran.

2.3. Inflasi Spasial

Enam dari delapan Kabupaten dan Kota IHK di Sumatera Utara mencatatkan kenaikan inflasi pada triwulan II 2026 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Adapun tekanan inflasi tertinggi terjadi di Kota Gunungsitoli dengan angka inflasi sebesar 6,25% (yoy), kemudian diikuti Kabupaten Labuhanbatu sebesar 5,81% (yoy), Kota Sibolga sebesar 5,78% (yoy), Kota Pematangsiantar sebesar 5,26% (yoy), Kabupaten Deli Serdang sebesar 4,73% (yoy), Kota Padangsidimpuan sebesar 4,69% (yoy), Kota Medan sebesar 4,65% (yoy), dengan inflasi terendah di Kabupaten Karo sebesar 3,46% (yoy) - (Tabel 3.2). Oleh karena itu, tingkat inflasi Provinsi Sumatera Utara pada triwulan laporan tercatat sebesar 4,79% (yoy).

Tabel 2.2. Perkembangan Inflasi Kota IHK Sumatera Utara, Sumatera, dan Nasional

Kota	2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II
Inflasi IHK, % mtm						
Sumatera Utara	0,68	-0,19	0,65	1,66	-0,13	0,23
Medan	0,65	-0,07	0,58	1,54	-0,01	0,18
Sibolga	1,44	-0,28	0,73	2,94	-0,20	0,18
Pematangsiantar	1,14	-0,18	0,47	1,24	-0,02	-0,07
Padangsidempuan	1,89	-0,23	1,43	1,47	-0,01	0,42
Gunung Sitoli	1,24	-0,33	0,98	6,94	-0,43	0,53
Karo	1,06	-0,43	0,44	1,39	-0,38	0,03
Deli Serdang	1,46	-0,32	0,67	1,72	-0,26	0,31
Labuhanbatu	1,25	-0,41	1,15	2,14	-0,57	0,50
Nasional	1,65	0,19	0,21	0,64	0,41	0,44
Inflasi IHK, % ytd						
Sumatera Utara	0,11	0,77	3,60	4,66	-0,66	0,90
Medan	-0,12	0,63	3,00	4,36	-0,31	0,91
Sibolga	0,03	0,92	3,29	5,62	0,20	1,08
Pematangsiantar	1,17	1,97	4,51	5,37	0,44	1,86
Padangsidempuan	0,83	1,81	4,12	5,46	-0,33	1,07
Gunung Sitoli	0,47	1,23	4,28	10,84	-3,64	-2,96
Karo	-0,23	0,20	3,23	3,15	-0,37	1,47
Deli Serdang	0,38	0,93	4,54	1,72	-1,64	0,51
Labuhanbatu	0,21	0,53	4,26	2,14	-0,61	1,56
Nasional	0,39	1,38	1,82	2,92	0,94	1,79
Inflasi IHK, % yoy						
Sumatera Utara	0,69	1,25	5,32	4,66	3,86	4,79
Medan	0,38	1,02	4,44	4,36	4,17	4,65
Sibolga	0,50	1,02	4,83	5,62	5,80	5,79
Pematangsiantar	2,18	3,15	5,84	5,37	4,60	5,26
Padangsidempuan	1,05	1,68	5,37	5,46	4,25	4,69
Gunung Sitoli	1,97	2,74	5,50	10,84	6,30	6,25
Karo	0,27	0,48	5,18	3,15	3,01	4,46
Deli Serdang	1,24	1,45	6,81	1,72	3,04	4,73
Labuhanbatu	0,16	1,43	6,38	2,14	3,87	5,81
Nasional	1,03	1,87	2,65	2,92	3,48	3,34

Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

2.3.1. Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli mencatatkan inflasi tertinggi di Sumatera Utara pada triwulan II 2026, yakni sebesar 6,25% (yoy). Sumber utama inflasi didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 3,54% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada kelompok ini utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga beras, cabai merah, dan minyak goreng dengan andil masing-masing sebesar 0,54% (yoy), 0,38% (yoy) dan 0,26% (yoy). Kenaikan harga beras pada triwulan II 2026 dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan dari luar daerah akibat masih baru masuknya musim tanam II dan naiknya harga Gabah Kering Giling (GKG) di kisaran Rp8.700-Rp9.300/kg di tingkat petani. Sementara itu, kenaikan harga cabai merah juga terjadi di Kota Gunungsitoli akibat berakhirnya musim panen raya cabai merah di daerah sentra seperti Karo, Simalungun, dan Batubara sehingga pasokan terbatas. Sementara itu, ketidakstabilan geopolitik global juga mendorong kenaikan harga komoditas minyak goreng yang bersumber dari kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) global dan harga plastik kemasan yang terus menguat.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua pada triwulan II 2026 dengan andil sebesar 0,76% (yoy). Komoditas utama yang mendorong inflasi pada kelompok ini antara lain emas perhiasan, sabun mandi, dan deodoran dengan andil masing-masing 0,77% (yoy), 0,04% (yoy), dan 0,02% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh peningkatan harga emas global yang mendorong penyesuaian harga di tingkat lokal. Sementara itu, kenaikan harga sabun mandi dan deodoran didorong oleh kenaikan biaya bahan baku dan kemasan yang berasal dari CPO global serta penyesuaian harga di tingkat ritel.

Selanjutnya, Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran memberikan andil inflasi terbesar ketiga dengan angka 0,66% (yoy), yang terutama disumbang oleh ketupat/lontong sayur dengan andil 0,18% (yoy), mie dengan andil 0,13% (yoy), dan nasi dengan lauk dengan andil 0,09% (yoy). Kenaikan harga terutama sejalan dari kenaikan harga bahan baku yang bersumber dari beras, minyak goreng, dan tepung.

Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi di Kota Gunungsitoli tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga, antara lain durian, ikan merah, dan ikan kakap putih.

2.3.2. Kabupaten Labuhanbatu

Inflasi Kabupaten Labuhanbatu pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,81% (yoy). Inflasi Kabupaten Labuhanbatu pada triwulan II 2026 terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencatatkan andil inflasi terbesar yakni 3,82% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, ikan kembung, dan beras dengan andil masing-masing sebesar 0,50% (yoy), 0,48% (yoy), 0,43% (yoy), dan 0,31% (yoy). Kenaikan harga komoditas cabai merah dan cabai rawit disebabkan berakhirnya musim panen raya cabai merah di daerah sentra seperti Karo, Simalungun, dan Batubara sehingga pasokan terbatas. Sementara itu, kenaikan harga ikan kembung seiring dengan terbatasnya pasokan sejalan dengan fluktuasi hasil tangkapan nelayan dan distribusi ikan dari daerah pemasok. Selain itu,

Grafik 2.4. Inflasi Kota Gunungsitoli per Kelompok

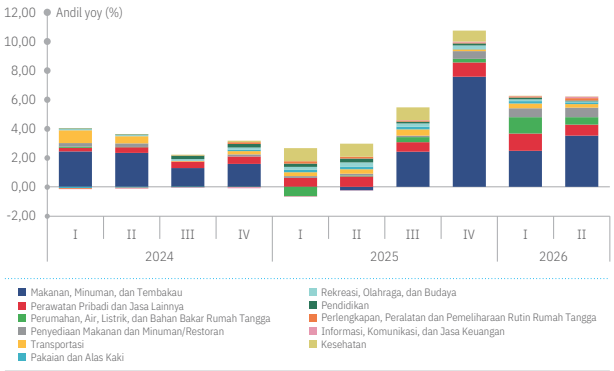

Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

Grafik 2.5. Inflasi Kabupaten Labuhanbatu per Kelompok

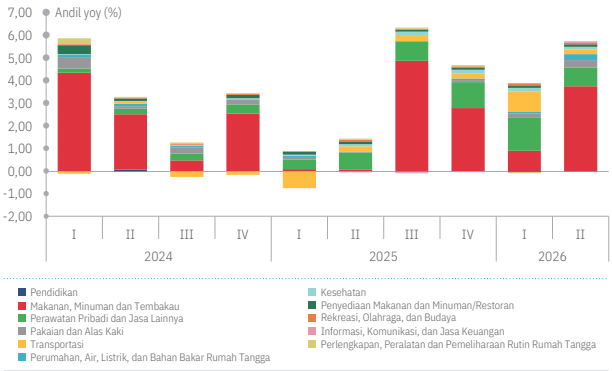

Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

kenaikan harga beras pada triwulan II 2026 terutama dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan dari luar daerah seiring berlangsungnya periode awal musim tanam II, serta meningkatnya harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani.

Selanjutnya Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan andil sebesar 0,84% (yoy). Inflasi pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan dengan andil 0,86% (yoy) seiring dengan kenaikan harga emas dunia sebagai safe haven asset akibat meningkatnya gejolak geopolitik dunia.

Kelompok Pakaian dan Alas Kaki menjadi penyumbang inflasi berikutnya dengan andil sebesar 0,33% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama bersumber dari seragam sekolah anak dengan andil 0,07% (yoy), seragam sekolah wanita dengan andil 0,03% (yoy), dan seragam sekolah pria dengan andil 0,02% (yoy) seiring dengan akan dimulainya tahun ajaran baru sekolah di bulan Juli 2026 sehingga meningkatkan permintaan seragam sekolah.

Di sisi lain, tekanan inflasi Kabupaten Labuhanbatu tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga, antara lain ikan dencis (-0,16%, yoy), bawang putih (-0,12%, yoy), kelapa (-0,08%, yoy), dan bahan bakar rumah tangga (-0,05%, yoy).

2.3.3. Kota Sibolga

Kota Sibolga mencatatkan inflasi tertinggi ketiga di Sumatera Utara. Pada triwulan II 2026, Kota Sibolga mengalami inflasi sebesar 5,78% (yoy). Sumber utama inflasi didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil sebesar 3,69% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada kelompok ini utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga beras, cabai merah, tomat dengan andil masing-masing sebesar 0,63% (yoy), 0,37% (yoy), dan 0,29% (yoy).

Kenaikan harga beras pada triwulan II 2026 terutama dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan dari luar daerah seiring berlangsungnya periode awal musim tanam II, serta meningkatnya harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani. Selain itu, berakhirnya musim panen raya di daerah sentra terutama Karo dan Simalungun turut mendorong kenaikan harga cabai merah dan tomat.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua pada triwulan II 2026 dengan andil sebesar 0,93% (yoy). Komoditas utama yang mendorong inflasi pada kelompok ini antara lain emas perhiasan dan tarif gunting rambut anak. Kenaikan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh peningkatan harga emas global yang mendorong penyesuaian harga di tingkat lokal. Sementara itu, tarif gunting rambut anak mengalami penyesuaian seiring dengan mulai naiknya permintaan menjelang tahun ajaran baru.

Selanjutnya, Kelompok Transportasi memberikan andil inflasi terbesar ketiga sebesar 0,32% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok ini bersumber dari kenaikan harga bensin dengan andil 0,15% (yoy) yang dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM Pertamax sebesar 32% dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Hal ini turut menyebabkan beberapa kenaikan harga angkutan/jasa transportasi lainnya sehingga turut menyumbang inflasi angkutan antarkota dengan andil 0,04% (yoy) dan tarif becak motor dengan andil 0,052% (yoy).

Di sisi lain, tekanan inflasi Kota Sibolga yang lebih tinggi tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga, antara lain durian, bawang putih, *hand body lotion,* dan jahe.

Grafik 2.6. Inflasi Kota Sibolga per Kelompok

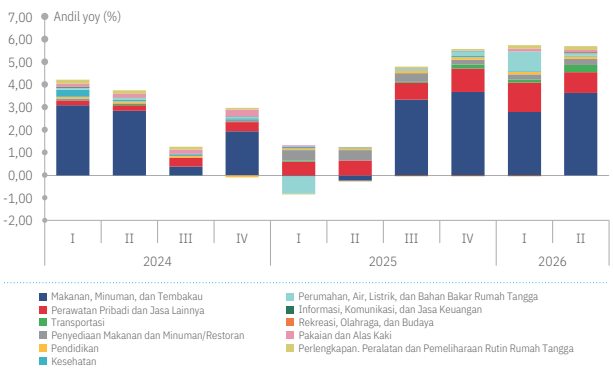

Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

2.3.4. Kota Pematangsiantar

Kota Pematangsiantar mencatatkan inflasi keempat terbesar pada triwulan laporan. Pada triwulan II 2026, Kota Pematangsiantar mengalami inflasi sebesar 5,26% (yoy). Sumber utama inflasi didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 2,59% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada kelompok ini utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak goreng, tomat, cabai merah, dan ikan dencis dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,22% (yoy), 0,21% (yoy), 0,19% (yoy), dan 0,17% (yoy). Kenaikan

harga minyak goreng turut dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) global dan harga plastik kemasan yang terus menguat. Selain itu, berakhirnya musim panen raya di daerah sentra terutama Karo dan Simalungun turut mendorong kenaikan harga cabai merah dan tomat. Harga ikan dencis meningkat seiring terbatasnya pasokan dari daerah pemasok terutama Tanjungbalai dan Aceh akibat fluktuasi hasil tangkapan nelayan, di tengah permintaan yang tetap kuat.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan andil sebesar 0,97% (yoy). Komoditas utama yang mendorong inflasi pada kelompok ini antara lain emas perhiasan, bedak, dan *hand body lotion*. Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tingginya kenaikan harga emas dunia. Sementara kenaikan harga pada bedak dan *hand body lotion* mencerminkan penyesuaian harga di tingkat ritel serta peningkatan biaya distribusi dan operasional.

Selanjutnya, Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran memberikan andil inflasi terbesar ketiga sebesar 0,35% (yoy). Inflasi pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga ketupat/lontong sayur dengan andil 0,06% (yoy) seiring dengan kenaikan harga bahan baku berupa beras, disusul dengan kopi siap saji dengan andil 0,05% (yoy) seiring dengan tingginya permintaan.

Di sisi lain, tekanan inflasi Kota Pematangsiantar tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga, antara lain kelapa, daging babi, tarif rumah sakit, susu bubuk, dan ketimun.

Grafik 2.7. Inflasi Kota Pematangsiantar per Kelompok

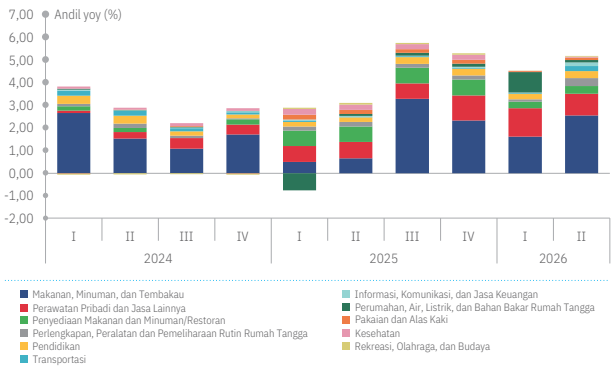

Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

2.3.5. Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang mencatatkan inflasi sebesar 4,73% (yoy) pada triwulan II 2026. Inflasi tersebut terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 3,35% (yoy). Kenaikan harga pada kelompok ini terutama bersumber dari komoditas cabai merah, cabai rawit, ikan tongkol, minyak goreng, dan ikan kembung dengan andil masing-masing sebesar 0,61% (yoy), 0,32% (yoy), 0,28% (yoy), 0,20% (yoy), dan 0,19% (yoy). Kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit didorong oleh berakhirnya musim panen raya di daerah sentra terutama Karo, Simalungun, dan Batubara. Ketidakpastian geopolitik global juga turut mendorong naiknya harga minyak mentah (CPO) dan plastik yang menyebabkan kenaikan harga minyak goreng. Sementara kenaikan harga komoditas perikanan didorong oleh volatilitas tangkapan nelayan pada beberapa daerah produsen seperti Tanjungbalai dan Aceh.

Kelompok Transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan andil inflasi sebesar 0,32% (yoy). Kenaikan kelompok transportasi didorong oleh kenaikan harga bensin dengan andil 0,18% (yoy) seiring dengan penyesuaian harga BBM Pertamax dan berimbas kepada kenaikan tarif kendaraan roda 2 online dengan andil sebesar 0,04% (yoy).

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua pada triwulan II 2026 dengan andil sebesar 0,27% (yoy). Komoditas utama yang mendorong inflasi pada kelompok ini antara lain emas perhiasan yang dipengaruhi oleh peningkatan harga emas global.

Grafik 2.8. Inflasi Kabupaten Deli Serdang per Kelompok

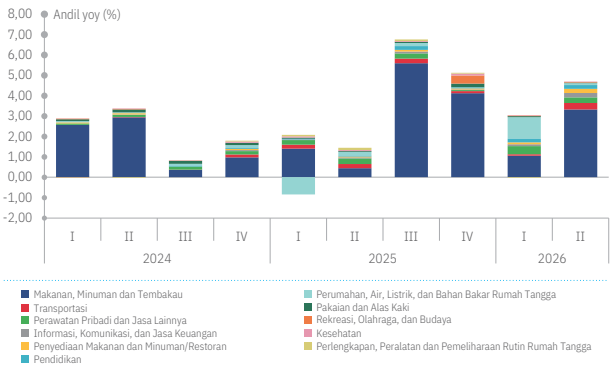

Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

Di sisi lain, laju inflasi Kabupaten Deli Serdang tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga, antara lain bayam, kangkung, jengkol, dan kentang seiring dengan musim panen serentak di daerah.

2.3.6. Kota Padangsidimpuan

Kota Padangsidimpuan mencatatkan inflasi tertinggi keenam di Sumatera Utara pada triwulan II 2026, yakni sebesar 4,70% (yoy). Sumber utama inflasi berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 2,50% (yoy). Komoditas utama yang mendorong inflasi pada kelompok ini antara lain cabai merah, beras, minyak goreng, bawang merah, dan ikan dencis dengan andil masing-masing sebesar 0,48% (yoy), 0,33% (yoy), 0,24% (yoy), 0,19% (yoy), dan 0,18% (yoy). Adapun kenaikan cabai merah yang terjadi serentak di hampir seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara disebabkan oleh berakhirnya musim panen raya pada bulan April 2026 di daerah sentra utama seperti Karo, Simalungun, dan Batubara. Sementara kenaikan harga beras juga didorong oleh baru masuknya musim tanam ke II dan naiknya harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani. Konflik geopolitik global yang menyebabkan kenaikan harga minyak mentah (CPO) dan plastik mendorong kenaikan harga minyak goreng.

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan andil sebesar 0,99% (yoy). Komoditas utama yang mendorong inflasi pada kelompok ini antara lain tarif air minum PAM dengan andil sebesar 0,66% (yoy) dan sewa rumah dengan andil 0,30% (yoy). Kenaikan tarif air minum PAM terutama dipengaruhi peningkatan nilai tagihan air kepada pelanggan, di tengah masih tingginya biaya operasional penyediaan layanan air bersih pascabencana banjir.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi penyumbang inflasi terbesar ketiga pada triwulan II 2026 dengan andil sebesar 0,92% (yoy). Inflasi pada kelompok ini utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan, bedak, dan pembalut wanita dengan andil masing-masing sebesar 0,84% (yoy), 0,03% (yoy), dan 0,01% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tingginya kenaikan harga emas dunia. Sementara kenaikan harga pada bedak dan *hand body lotion* mencerminkan penyesuaian harga di tingkat ritel serta peningkatan biaya distribusi dan operasional.

Di sisi lain, tekanan inflasi Kota Padangsidimpuan tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga, antara lain uang Sekolah Mengah Atas (SMA), kentang, angkutan dalam kota, pepaya, dan udang kering (ebi).

2.3.7. Kota Medan

Pada triwulan II 2026, Kota Medan mencatat inflasi 4,66% (yoy). Sumber utama peningkatan tekanan inflasi berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 2,16% (yoy). Inflasi pada kelompok ini utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai merah, beras, ikan tongkol, dan ikan dencis, dengan andil masing-masing sebesar 0,31% (yoy), 0,19% (yoy), 0,14% (yoy), dan 0,14% (yoy). Kenaikan cabai merah disebabkan oleh berakhirnya musim panen raya pada bulan April 2026 di daerah sentra utama seperti Karo, Simalungun, dan Batubara. Sementara kenaikan harga beras didorong oleh baru masuknya musim tanam ke II dan naiknya harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani. Sementara itu, kenaikan harga ikan tongkol dan ikan dencis seiring dengan terbatasnya pasokan sejalan dengan fluktuasi hasil tangkapan nelayan dan distribusi ikan dari daerah pemasok terutama Tanjungbalai dan Aceh.

Grafik 2.9. Inflasi Kota Padangsidimpuan per Kelompok

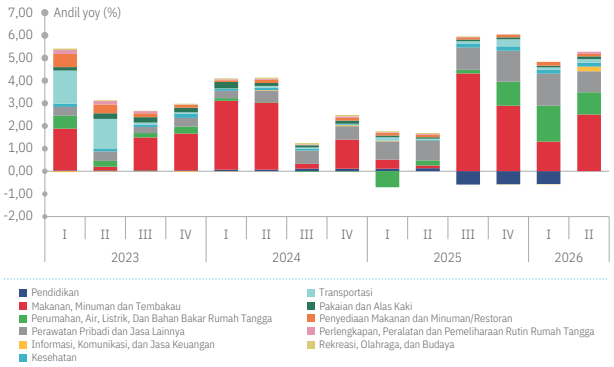

Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

Grafik 2.10. Inflasi Kota Medan per Kelompok

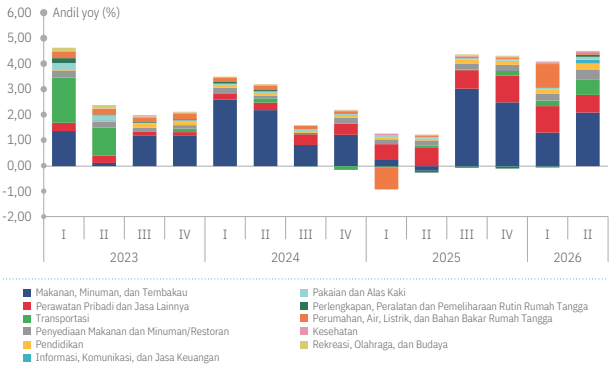

Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

Selanjutnya, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan andil sebesar 0,71% (yoy). Peningkatan inflasi pada kelompok ini terutama bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan kenaikan harga emas global.

Kelompok Transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar ketiga dengan andil sebesar 0,63% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok ini utamanya disumbang oleh angkutan udara dengan andil 0,25% (yoy) dan bensin dengan andil 0,22% (yoy). Tekanan tarif angkutan udara pada triwulan II 2026 dipengaruhi oleh meningkatnya biaya operasional maskapai seiring tingginya harga avtur, peningkatan permintaan pada periode libur sekolah, serta berlanjutnya implementasi kebijakan fuel surcharge pemerintah maksimal 50% dari Tarif Batas Atas (TBA) yang berlaku sejak 13 Mei 2026. Selain itu, kenaikan harga bensin dipengaruhi oleh penyesuaian tarif BBM Pertamax sebesar 32% dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter yang berlaku sejak 10 Juni 2026. Penyesuaian tarif BBM juga diikuti dengan kenaikan tarif kendaraan roda 2 online dengan andil inflasi 0,02% (yoy) dan tarif kendaraan roda 4 online dengan andil inflasi 0,01% (yoy) di Kota Medan.

Di sisi lain, tekanan inflasi Kota Medan tertahan oleh sejumlah komoditas yang mencatatkan penurunan harga, antara lain popok bayi sekali pakai/diapers, kemeja panjang katun pria, daging babi, ketimun, dan kacang panjang.

2.3.8. Kabupaten Karo

Kabupaten Karo mencatatkan inflasi yang terendah di antara delapan kabupaten/kota IHK di Sumatera Utara pada triwulan II 2026, yakni sebesar 4,47% (yoy). Kondisi ini mencerminkan daya tahan pasokan serta stabilitas harga yang lebih baik dibandingkan daerah lainnya pada periode laporan.

Grafik 2.11. Inflasi Kabupaten Karo per Kelompok

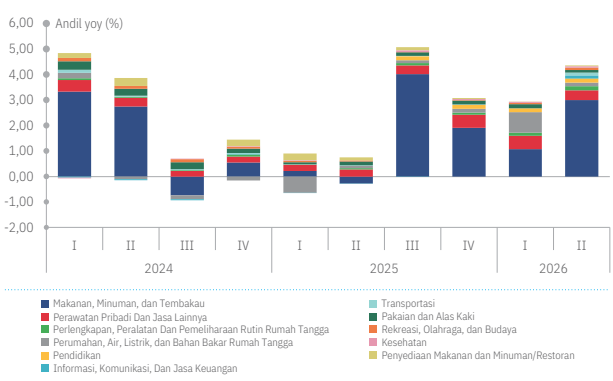

Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

Sumber utama tekanan inflasi di Kabupaten Karo berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 3,07% (yoy). Komoditas yang mendorong inflasi pada kelompok ini antara lain ikan dencis, cabai merah, bawang merah, tomat, dan minyak goreng dengan andil masing-masing 0,42% (yoy), 0,41% (yoy), 0,31% (yoy), 0,25% (yoy), 0,20% (yoy). Kenaikan harga ikan sejalan dengan terbatasnya pasokan sejalan dengan fluktuasi hasil tangkapan nelayan dan distribusi ikan dari daerah pemasok terutama Tanjungbalai dan Aceh. Sementara kenaikan komoditas hortikultura seperti cabai merah, bawang merah, dan tomat seiring dengan musim panen yang telah berakhir sehingga produksi cenderung terbatas. Ketidakstabilan geopolitik global juga mendorong kenaikan harga komoditas minyak goreng yang bersumber dari kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) global dan harga plastik kemasan yang terus menguat.

Tekanan inflasi selanjutnya bersumber dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang memberikan andil inflasi sebesar 0,39% (yoy). Inflasi pada kelompok ini dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan dengan andil sebesar 0,38% (yoy) seiring dengan kenaikan harga emas dunia serta kenaikan harga *hand body lotion* dan tarif gunting rambut pria.

Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga juga memberikan andil inflasi sebesar 0,16% (yoy). Kenaikan harga pada kelompok ini terutama dipengaruhi kenaikan harga sabun cuci batangan dengan andil 0,05% (yoy) dan ember dengan andil 0,04% (yoy). Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan biaya bahan baku plastik dan penyesuaian harga jual di tingkat ritel.

Di sisi lain, tekanan inflasi Kabupaten Karo semakin tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas, antara lain kelapa, daging babi, telur ayam ras, pasta gigi, dan tempe. Adapun penurunan harga paling dalam yakni kelapa dengan andil -0,08% (yoy) seiring dengan normalisasi permintaan pasca HBKN Idulfitri di triwulan I 2026 untuk olahan sajian makanan.

Tabel 2.3. Inflasi di Kota IHK Sumatera Utara Triwulan II 2026

Perkembangan Inflasi secara Spasial di Kota IHK Sumatera Utara

Lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya
Lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya

Kota	yoy Tw I'26		yoy Tw II'26
Medan	4,17%	↑	4,65%
Pematangsiantar	4,60%	↑	5,26%
Sibolga	5,80%	↓	5,79%
Padangsedempuan	4,25%	↑	4,69%
Gunungsitoli	6,30%	↓	6,25%
Karo	3,01%	↑	4,46%
Deliserdang	3,04%	↑	4,73%
Labuhanbatu	3,87%	↑	5,81%

Tabel 2.4. Komoditas Penyumbang Inflasi Kota dan Kabupaten Sampel

Andil Inflasi Tw II 2026 (yoy%)							
Medan		Sibolga		Pematang Siantar		Padangsidimpuan	
Emas Perhiasan	0,63	Emas Perhiasan	0,83	Emas Perhiasan	0,82	Emas Perhiasan	0,84
Cabai Merah	0,31	Beras	0,63	Minyak Goreng	0,22	Tarif Air Minum Pam	0,65
Angkutan Udara	0,25	Cabai Merah	0,37	Tomat	0,21	Cabai Merah	0,48
Bensin	0,22	Sigaret Kretek Mesin (Skm)	0,33	Cabai Merah	0,19	Beras	0,33
Beras	0,19	Tomat	0,29	Ikan Dencis	0,17	Minyak Goreng	0,24
Gunungsitoli		**Karo**		**Deli Serdang**		**Labuhanbatu**	
Emas Perhiasan	0,77	Ikan Dencis	0,42	Cabai Merah	0,61	Emas Perhiasan	0,86
Beras	0,54	Cabai Merah	0,41	Cabai Rawit	0,32	Cabai Merah	0,50
Cabai Merah	0,38	Emas Perhiasan	0,38	Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-ambu	0,28	Cabai Rawit	0,48
Minyak Goreng	0,26	Bawang Merah	0,31	Minyak Goreng	0,20	Ikan Kembung/Ikan Gembung/ Ikan Banyar/Ikan Gembolo/ Ikan Aso-Aso	0,43
Daging Babi	0,21	Tomat	0,25	Emas Perhiasan	0,19	Beras	0,31

Andil Deflasi Tw II 2026 (yoy%)							
Medan		Sibolga		Pematang Siantar		Padangsidimpuan	
Popok Bayi Sekali Pakai/Diapers	-0,03	Durian	-0,02	Kelapa	-0,05	Sekolah Menengah Atas	-0,63
Kemeja Panjang Katun Pria	-0,02	Bawang Putih	-0,02	Daging Babi	-0,04	Kentang	-0,10
Daging Babi	-0,02	Hand Body Lotion	-0,01	Tarif Rumah Sakit	-0,03	Angkutan Dalam Kota	-0,05
Ketimun	-0,02	Jahe	-0,01	Susu Bubuk	-0,03	Pepaya	-0,04
Kacang Panjang	-0,01	Ikan Kerapu/ Ikan Garopa	-0,01	Ketimun	-0,02	Udang Kering (Ebi)	-0,03
Gunungsitoli		**Karo**		**Deli Serdang**		**Labuhanbatu**	
Durian	-0,10	Kelapa	-0,08	Bayam	-0,09	Ikan Dencis	-0,15
Ikan Merah	-0,08	Daging Babi	-0,06	Kangkung	-0,08	Bawang Putih	-0,11
Parfum	-0,04	Telur Ayam Ras	-0,04	Detergen Cair	-0,05	Kelapa	-0,08
Ikan Kakap Putih	-0,03	Pasta Gigi	-0,03	Jengkol	-0,03	Bahan Bakar Rumah Tangga	-0,05
Sabun Cair/Cuci Piring	-0,03	Tempe	-0,02	Kentang	-0,02	Popok Bayi Sekali Pakai/Diapers	-0,05

Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

2.4. Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

Pengendalian inflasi pangan Sumatera Utara masih menghadapi tantangan struktural berupa tekanan terhadap kesejahteraan produsen, inefisiensi tata niaga, ketergantungan input impor, tingginya biaya distribusi, serta keterbatasan kapasitas *offtaker* dan jaringan ritel. Guna memperkuat stabilisasi harga dan menjaga kesinambungan pasokan, TPID Sumatera Utara gencar melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

2.4.1. Tantangan Pengendalian Inflasi di Daerah

Pengendalian inflasi di Sumatera Utara dan menjaga gejolak harga agar stabil dan berkelanjutan tidak terlepas dari berbagai tantangan di triwulan II 2026 sebagai berikut:

a. **Menjaga keseimbangan antara NTP, keberlanjutan produksi, dan keterjangkauan harga konsumen.**
   NTP Sumatera Utara pada Juli 2026 tercatat cukup tinggi sebesar 156,95, meningkat 0,52% (mtm). Namun, perkembangan tersebut tidak merata antar-subsektor, tecermin dari penurunan NTP hortikultura sebesar 3,73% (mtm) dan peternakan sebesar 1,06% (mtm). Kondisi tersebut menunjukkan adanya trade-off antara stabilisasi harga konsumen dan kesejahteraan produsen. Penurunan harga yang terlalu dalam di tingkat petani pada saat panen dapat menekan margin usaha dan mengurangi insentif untuk melakukan penanaman atau *restocking* pada periode berikutnya.
b. **Rantai tata niaga pangan yang panjang dan belum efisien.**
   Struktur produksi pangan Sumatera Utara yang relatif tersebar dan didominasi petani skala kecil menyebabkan keberadaan pedagang pengepul dan pedagang besar tetap dibutuhkan untuk fungsi agregasi, transportasi, pembiayaan, dan akses pasar. Namun demikian, rantai perdagangan yang panjang serta keterbatasan akses petani terhadap informasi harga dan pembeli alternatif dapat menciptakan asimetri informasi dan *bargaining power* yang lebih besar pada pedagang perantara. Penguatan kelembagaan petani, pasar lelang, *contract farming,* BUMD pangan, digitalisasi informasi harga, dan akses langsung kepada *offtaker* menjadi penting untuk memperpendek rantai transaksi.
c. **Ketergantungan terhadap bakalan sapi impor dan pakan ternak meningkatkan eksposur terhadap *imported inflation.***
   Per Juni 2026, realisasi impor sapi Australia oleh *feedloter* Sumatera Utara hanya sebesar 7.500 ekor, jauh dari target impor sebesar 16.000 ekor. Tingginya biaya distribusi dan nilai tukar serta terbatasnya ruang untuk meningkatkan harga di level konsumen menahan feedloter untuk menambah pasokan sapi di dalam negeri. Akibatnya, harga sapi tetap pada level *all time high* di atas HAP Rp140.000,-/kg. Ketergantungan terhadap pakan dan pupuk impor juga turut menimbulkan biaya bahan baku impor dan tekanan terhadap harga ayam dan komoditas hortikultura.
d. **Kesiapan *offtaker* dan jaringan ritel masih rendah untuk efektivitas Kerja Sama Antardaerah (KAD).**
   Efektivitas KAD sangat ditentukan oleh kapasitas offtaker atau pedagang besar dalam menjamin volume pembelian, kontinuitas transaksi, kapasitas penyimpanan, hingga jaringan distribusi menuju pasar. Namun, identifikasi *offtaker*/pedagang besar dan jaringan ritel yang memiliki kapasitas penyerapan memadai, serta komitmen pelaku usaha di Sumatera Utara, masih memerlukan peningkatan kapasitas dan fasilitasi lebih lanjut.

2.4.2. Upaya Pengendalian Inflasi

Tingkat inflasi di Sumatera Utara yang menunjukkan tren peningkatan, direspons dengan langkah pengendalian inflasi yang didukung oleh berbagai program pengendalian inflasi TPID Provinsi Sumatera Utara, terutama melalui GPIPS dengan mengacu pada pedoman 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Selama triwulan II 2026, dengan upaya yang telah dilakukan oleh TPID 33 Kab/Kota se-Sumatera Utara meliputi kegiatan sebagai berikut:

Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, TPID Provinsi Sumatera Utara melakukan beberapa upaya diantaranya:

a. Secara konsisten, mendukung pelaksanaan GPM dan KAD melalui pemberian subsidi ongkos angkut atau fasilitasi distribusi pangan guna meningkatkan distribusi beras SPHP Bulog dan KAD Bawang Merah. Pelaksanaan GPM dilakukan sesuai prinsip 4T (Tepat Lokasi, Tepat Waktu, Tepat Komoditas, dan Tepat Sasaran).

b. Secara keseluruhan, telah terlaksana lebih dari 733 kali kegiatan pasar murah pada Semester I 2026 di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus pada komoditas pangan utama yaitu beras, minyak goreng, gula pasir, dan bawang merah;
c. Untuk menjaga stabilitas tarif transportasi menjelang HBKN, dilakukan pendataan harian tarif angkutan udara domestik oleh otoritas bandara dari seluruh maskapai penerbangan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap potensi kenaikan tarif yang melebihi Tarif Batas Atas (TBA), dan dilaksanakan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah Sumatera Utara;
d. Inspeksi/sidak pasar yang dilakukan oleh TPID Provinsi Sumatera Utara dan TPID Kabupaten/Kota guna memastikan stabilisasi harga terjaga sesuai dengan HAP/HET.

Ketersediaan Pasokan

KPw BI Provinsi Sumatera Utara dan TPID Sumatera Utara terus melakukan pelatihan kepada kelompok tani dalam penguatan *Good Agricultural Practice,* penguatan sarana prasarana kelompok tani, penguatan kapasitas BUMD, dan upaya lainnya untuk menjamin ketersediaan pasokan, diantaranya:

a. *Capacity Building Good Agricultural Practice* Bawang Merah kepada kelompok tani di Kab. Karo dan Tebing Tinggi dengan narasumber petani pakar lokal (Bp. Bujurkin - Poktan Matahari);
b. Pendampingan & Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Produksi Pakan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok kepada Pokdakan Gule Jaya, Kab. Serdang Bedagai;
c. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Demplot Penangkaran Benih Padi di Gapoktan Mulia Tani Kab. Langkat dengan narasumber petani pakar (Bp. Parlan Sibarani);
d. *Demonstration Plot* Uji Varietas dan Pendampingan Budidaya Bawang Merah di Poktan Mutiara, Kab. Dairi;
e. Sinergi program tumpang sari jagung dengan kelapa sawit di Serdang Bedagai dan Deli Serdang melalui *demonstration plot* seluas 19 Ha serta pendampingan dengan tenaga ahli bekerja sama dengan PT. BISI guna meningkatkan produktivitas jagung sebagai sumber pakan ayam peternak;
f. Penguatan sarana dan prasarana pertanian/alsintan kepada 11 kelompok tani berupa saprodi (benih, pupuk, pestisida, pembasmi hama), *hand tractor, transplanter, bed dryer, combine hervester,* dan alat pencacah pupuk organik (APPO);
g. Penguatan sarana prasarana kelompok tani dalam memitigasi El Nino, seperti sumur bor, mesin pompa air, dan mesin genset;
h. Fasilitasi kerja sama/ kemitraan BUMD Sumatera Utara (PD Aneka Industri dan Jasa dan PT. Dhirga Surya) dengan 20 (dua puluh) kelompok tani di Sumatera Utara dengan komoditas cabai merah, gabah/padi, dan jagung pada 29 Mei 2026. Penandatanganan MoU akan dilaksanakan pada 15 Juli 2026;
i. *Capacity Building* Kelembagaan, Pengelolaan *Rice Milling Unit,* dan Pemasaran bagi BUMD Pangan Dhirga Surya dengan Gapoktan Sidomulyo pada 25 Juni 2026;
j. Dukungan Pembentukan BUMD Pangan Kab. Karo pada 10 Juni 2026 bersama Kementerian Dalam Negeri;
k. Fasilitasi Kerja Sama BUMD Pangan, kelompok tani, dan PUD pasar tradisional dengan *offtaker* Rumah Tani Nusantara (RTN) pada 26 Juni 2026;
l. *Business matching* komoditas daging sapi dari NTT, NTB, dan Bali melibatkan ASPEDA (Asosiasi Pedagang Sapi) Kota Medan, Rumah Potong Hewan, dan *Feedloter* untuk pemenuhan stok daging sapi di Sumatera Utara.
m. Memfasilitasi kemitraan antara KPPG dan produsen pangan strategis (daging ayam ras, telur ayam ras, ikan, dan daging sapi) melalui sinkronisasi data kebutuhan bahan baku SPPG, guna menjaga kelancaran pasokan serta stabilitas harga dalam mendukung keberlanjutan Program MBG.
n. Pengembangan *urban farming* untuk memenuhi kebutuhan pangan di tingkat Rumah Tangga khususnya di wilayah perkotaan defisit pangan seperti Kota Sibolga dan Kota Padangsidimpuan melalui Program HORAS Pangan – Hortikultura Rakyat Stabilkan Harga dan Pangan.

Kelancaran Distribusi

Beberapa kegiatan untuk mendorong kelancaran distribusi adalah:

a. Perluasan distribusi beras SPHP dari Bulog ke toko pantau inflasi atau toko tani (termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) mitra atau rekomendasi pemerintah daerah;
b. Percepatan penyaluran Bantuan Pangan Beras dan penyaluran beras SPHP Bulog di beberapa wilayah di Sumatera Utara melalui Pasar Murah;
c. Pembentukan NIB bagi UMKM dan Toko Pantau Inflasi untuk mendorong mitra Bulog guna mengakselerasi penyaluran beras SPHP dan Minyakita;

d. Fasilitasi Distribusi Pangan oleh Bank Indonesia di 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara;
e. Melaksanakan Kerja Sama Antardaerah intrawilayah untuk memperkuat pasokan pangan di wilayah defisit, antara lain Tapanuli Selatan dengan Sibolga-Tapanuli Utara-Humbang Hasundutan; Karo dengan Medan; Deli Serdang dengan Medan;
f. Melaksanakan Kerja Sama Antardaerah antarwilayah untuk memperkuat pasokan pangan di wilayah defisit melalui KAD Regional Sumatera Bagian Utara (Sumut, Sumbar, Aceh, Riau, Kepri). Adapun KAD telah terealisasi a.l Karo-Aceh untuk komoditas kol sebanyak 2 ton, Karo-Palangkaraya untuk komoditas hortikultura sebanyak 32 ton, Karo-Balikpapan untuk komoditas hortikultura, Deli Serdang-Aceh untuk komoditas cabai merah sebanyak 19,85 ton.
g. Pelaksanaan Survei Perdagangan Antarwilayah untuk memetakan jalur pasokan masuk dan keluar komoditas beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan tomat di pasar besar *(price maker)* Sumatera Utara.

Koordinasi dan Komunikasi Efektif

Dalam hal koordinasi dan komunikasi efektif, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TPID Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan koordinasi, serta membangun persepsi positif masyarakat diantaranya:

a. *High Level Meeting* (HLM) TPID Pengendalian inflasi di Kota Medan pada 20 Mei 2026 dengan topik "Fenomena Inflasi Beruntun *year on year* Kota Medan";
b. *High Level Meeting* (HLM) TPID dan *Business Matching* Kemitraan SPPG dan Pelaku Usaha Potensial di Kota Medan pada 29 Mei 2026;
c. *High Level Meeting* (HLM) TPID dan *Business Matching* Kemitraan SPPG dan Pelaku Usaha Potensial di Kabupaten Deli Serdang pada 4 Juni 2026;
d. *High Level Meeting* (HLM) TPID dan *Business Matching* Kemitraan SPPG dan Pelaku Usaha Potensial di Kabupaten Karo pada 15 Juni 2026;
e. *High Level Meeting* (HLM) TPID Kota Tebing Tinggi dirangkaikan dengan gerakan tanam bawang merah bersama dan pemberian bibit cabai pada 9 Juni 2026;
f. Rapat Koordinasi TPID se-Sumatera Utara terkait:
    - Persiapan mitigasi dampak musim kemarau panjang (El Nino) terhadap produktivitas pangan bersama BMKG Sumut (7 Mei 2026)
    - Koordinasi tindak lanjut pengawasan distribusi MinyaKita dan akselerasi bantuan pangan (19 Mei 2026)
    - Kolaborasi sinergi pengendalian inflasi dan Program MBG bersama BGN (13 April 2026);
    - Rencana kolaborasi dan inovasi pertanian Sumatera Utara bersama Universitas Sumatera Utara (29 April 2026)
    - *Focus Group Discussion* (FGD) Penguatan Kualitas Data dan Informasi Pangan Sumatera Utara (5 Mei 2026);
    - Pengembangan Aplikasi Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam *Roadshow Business Matching* Fasilitasi Kemitraan SPPG dan Pelaku Usaha se-Sumatera.
g. Digitalisasi Data Pangan melalui pemanfaatan *Dashboard* SIHORAS untuk pengendalian inflasi.
h. Penjajakan kemitraan antara KPPG dan produsen pangan strategis (daging ayam ras, telur ayam ras, ikan, dan daging sapi) melalui sinkronisasi data kebutuhan bahan baku SPPG, guna menjaga kelancaran pasokan serta stabilitas harga dalam mendukung keberlanjutan Program MBG.

BOKS 2

El Nino dan Risiko Inflasi Sumatera Utara: Pentingnya Menjaga Keseimbangan Pasokan Pangan Antarwilayah

Latar Belakang

Fenomena El Nino merupakan salah satu faktor risiko eksternal yang perlu diantisipasi dalam menjaga stabilitas inflasi Sumatera Utara, khususnya pada kelompok makanan bergejolak (volatile food). Dampak El Nino terhadap inflasi pada umumnya tidak terjadi secara langsung, melainkan ditransmisikan melalui perubahan kondisi cuaca yang memengaruhi produksi pertanian, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan pada akhirnya perkembangan harga pangan.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan adanya hubungan antara El Nino dan inflasi di Indonesia. Marpaung, Siregar, dan Anggraeni dalam penelitian *Analysis of El Niño Impact and the Price of Food Commodities on Inflation* menggunakan data panel 25 provinsi selama periode 2008–2015 dan menemukan bahwa El Nino serta kenaikan harga komoditas pangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa gangguan iklim dapat menjadi sumber tekanan inflasi terutama melalui kenaikan harga komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang, kedelai, dan jagung.

Dalam konteks Sumatera Utara, risiko El Nino perlu dipahami secara lebih luas karena ketahanan pasokan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi domestik. Sumatera Utara memiliki keterkaitan perdagangan yang kuat dengan berbagai wilayah lain, baik sebagai daerah penerima pasokan maupun sebagai salah satu daerah pemasok komoditas pangan. Oleh karena itu, gangguan produksi akibat El Nino di wilayah lain juga berpotensi memengaruhi ketersediaan pangan dan perkembangan harga di Sumatera Utara.

Dengan demikian, asesmen risiko El Nino terhadap inflasi perlu mempertimbangkan tidak hanya kondisi cuaca dan produksi di dalam wilayah Sumatera Utara, tetapi juga dinamika produksi, kebutuhan, dan perdagangan pangan antarwilayah.

El Nino Menguat, Namun Dampak Iklim di Sumatera Utara Tidak Seragam

Kewaspadaan terhadap perkembangan El Nino perlu ditingkatkan pada paruh kedua tahun 2026. Berdasarkan Buletin Iklim Sumatera Utara Edisi Agustus 2026 yang bersumber dari BMKG Provinsi Sumatera Utara, indeks Nino 3.4 pada Juli 2026 mencapai +2,19 atau berada pada kategori El Nino kuat, serta diprakirakan menguat dan bertahan hingga awal tahun 2027 (Gambar 1).

Meskipun demikian, perkembangan El Nino tidak serta-merta menyebabkan seluruh wilayah Sumatera Utara mengalami kondisi kering. Pada Juli 2026, sebagian besar wilayah Sumatera Utara masih mengalami kondisi Normal hingga Basah, dengan sifat hujan yang umumnya berada pada kategori Normal hingga Atas Normal. Bahkan, hujan lebat hingga sangat lebat masih terjadi di sejumlah wilayah (Gambar 2).

Gambar 1. Sea Surface Temperature (SST)

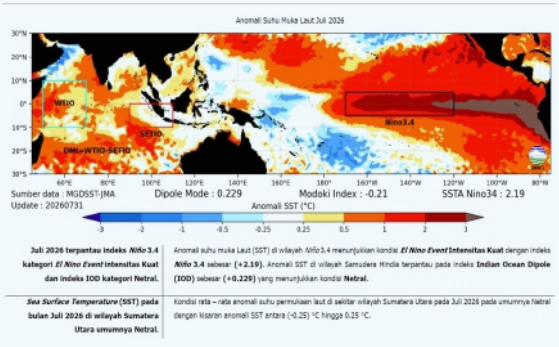

Sumber: Buletin Iklim Sumut, BMKG Sumut

Gambar 2. Analisis Curah Hujan dan Sifat Hujan Bulan Juli 2026

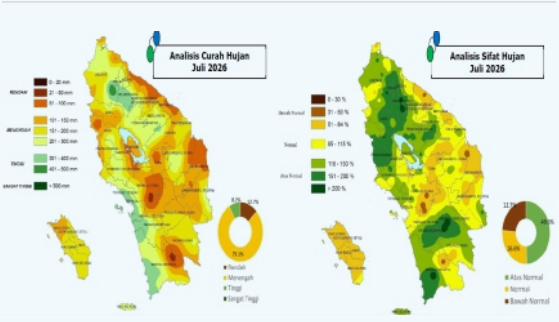

Sumber: Buletin Iklim Sumut, BMKG Sumut

Gambar 3. Sea Surface Temperature (SST)

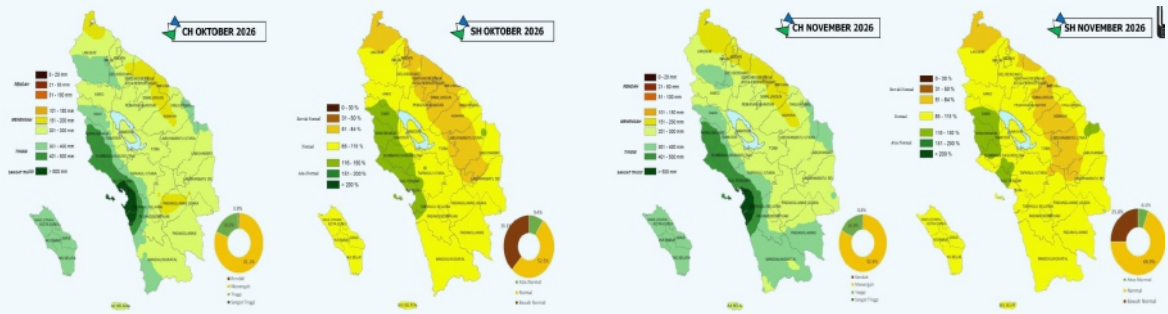

Sumber: Buletin Iklim Sumut, BMKG Sumut

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak El Nino di Sumatera Utara dimodifikasi oleh berbagai dinamika iklim lokal dan regional. Dengan kata lain, kekuatan El Nino di tingkat global tidak secara otomatis menghasilkan dampak yang sama di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Risiko kekeringan diperkirakan perlu mendapat perhatian lebih besar memasuki periode Oktober–November 2026, ketika sebagian wilayah diprakirakan mengalami sifat hujan Bawah Normal hingga Normal. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko defisit curah hujan, menekan ketersediaan air, dan mengganggu aktivitas pertanian, terutama di wilayah yang sebelumnya telah menunjukkan kondisi relatif kering (Gambar 3).

Di sisi lain, El Nino tidak menghilangkan risiko terjadinya banjir. Sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi, terutama di kawasan Tapanuli Tengah, pesisir Tapanuli Selatan, dan Sibolga. Dengan demikian, tantangan utama Sumatera Utara bukan semata-mata risiko kekeringan, tetapi juga ketimpangan kondisi iklim antarwilayah, di mana sebagian daerah berpotensi mengalami defisit hujan sementara wilayah lainnya masih menghadapi hujan ekstrem serta risiko banjir dan longsor.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa langkah mitigasi perlu dilakukan secara lebih spesifik berdasarkan karakteristik wilayah, melalui penguatan pemantauan kondisi kekeringan dan ketersediaan air, antisipasi gangguan terhadap produksi pertanian, serta tetap menjaga kesiapsiagaan terhadap risiko banjir dan longsor.

Risiko Inflasi Tidak Hanya Berasal dari Produksi Domestik

Relatif terjaganya kondisi produksi di sebagian wilayah Sumatera Utara tidak serta-merta menghilangkan risiko inflasi akibat El Nino. Hal ini disebabkan oleh tingginya keterkaitan perdagangan pangan antara Sumatera Utara dengan daerah lain.

Gangguan produksi di sentra pangan Pulau Jawa, Sumatera Barat, maupun wilayah lainnya dapat ditransmisikan ke Sumatera Utara melalui perubahan arus perdagangan antarwilayah. Perbedaan intensitas dampak El Nino antarwilayah berpotensi menimbulkan guncangan pasokan regional (regional *supply shock*).

Dalam konteks tersebut, risiko terhadap pasokan pangan Sumatera Utara dapat muncul melalui dua arah. Pertama, berkurangnya pasokan komoditas dari daerah pemasok *(inflow shock)*. Kedua, meningkatnya pengiriman komoditas dari Sumatera Utara ke daerah lain yang mengalami defisit produksi *(outflow shock)*. Kedua mekanisme tersebut memiliki konsekuensi yang sama, yaitu menurunkan ketersediaan pasokan relatif terhadap kebutuhan domestik dan meningkatkan risiko tekanan harga.

Risiko Pertama: Penurunan Pasokan Masuk *(Inflow Shock)*

Risiko pertama yang perlu mendapat perhatian adalah terganggunya pasokan masuk akibat penurunan produksi di daerah pemasok. Sumatera Utara masih bergantung pada pasokan sejumlah komoditas pangan dari luar wilayah (Tabel 1).

Apabila El Nino menyebabkan gangguan produksi di sentra pemasok utama, volume komoditas yang tersedia untuk dikirim ke Sumatera Utara berpotensi mengalami penurunan. Risiko tersebut dapat semakin besar apabila daerah pemasok juga mengalami peningkatan kebutuhan domestik, sehingga sebagian produksi yang sebelumnya diperdagangkan ke luar wilayah harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Dalam kondisi tersebut, tekanan inflasi di Sumatera Utara dapat muncul meskipun tidak terdapat gangguan produksi yang signifikan di dalam wilayah. Dengan kata lain, stabilitas produksi domestik belum tentu menjamin stabilitas pasokan apabila terjadi gangguan pada rantai pasok dari luar daerah.

Salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian adalah bawang merah. Pasokan bawang merah di Sumatera Utara masih didominasi oleh pasokan dari luar daerah, termasuk dari sentra produksi di Sumatera Barat. Berdasarkan informasi lapangan, terdapat indikasi penurunan produksi bawang merah di sejumlah sentra produksi Sumatera Barat sekitar 30% dibandingkan kondisi normal akibat dampak El Nino. Apabila kondisi tersebut berlanjut, ketersediaan bawang merah yang dapat dipasok ke Sumatera Utara berpotensi mengalami penurunan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga bawang merah di Sumatera Utara dapat berasal dari gangguan produksi di daerah lain. Oleh karena itu, perkembangan produksi di daerah pemasok perlu menjadi bagian dari indikator peringatan dini *(early warning indicator)* dalam pengendalian inflasi Sumatera Utara.

Tabel 1. Sebaran Sumber Komoditas Strategis Luar Sumatera Utara

Komoditas Strategis	Sumber Pasokan Luar Sumut	Persentase terhadap Total Pasokan Sumut
Beras	Aceh	8-10%
	Sumatera Barat	3-7%
Cabai Merah	Aceh	2-5%
	Jawa	1-3%
Bawang Merah	Sumatera Barat	55-60%
	Jawa Timur	5-10%
	NTB	2-5%

Sumber: Kajian Perdagangan Antar Wilayah (2026)

Risiko Kedua: Peningkatan Arus Keluar *(Outflow Shock)*

Sumatera Utara sebagai Sumber Pasokan Regional

Selain risiko penurunan pasokan masuk, Sumatera Utara juga berpotensi menghadapi risiko peningkatan arus keluar komoditas pangan. Risiko ini dapat terjadi apabila El Nino menimbulkan gangguan produksi yang lebih besar di wilayah lain, seperti Pulau Jawa atau daerah sentra produksi lainnya. Ketika produksi pangan di wilayah tersebut mengalami penurunan, kebutuhan terhadap pasokan dari daerah lain akan meningkat. Dalam kondisi tersebut, Sumatera Utara yang memiliki produksi relatif lebih baik dapat menjadi salah satu sumber pasokan bagi daerah yang mengalami defisit. Peningkatan kebutuhan dari luar daerah dapat mendorong pelaku usaha meningkatkan pengiriman komoditas dari Sumatera Utara, terutama apabila harga di daerah tujuan lebih tinggi dibandingkan harga domestik.

Dampak terhadap Ketersediaan Pasokan Domestik

Peningkatan arus keluar tidak selalu menjadi masalah apabila produksi dan stok tersedia dalam jumlah memadai. Namun, apabila peningkatan pengiriman ke luar daerah tidak diimbangi dengan tambahan produksi atau stok, pasokan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Utara dapat berkurang.

Dengan asumsi permintaan domestik relatif tetap atau meningkat, berkurangnya pasokan tersebut dapat menciptakan kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan *(supply gap).* Kondisi inilah yang selanjutnya berpotensi mendorong kenaikan harga pangan dan meningkatkan tekanan inflasi. Risiko ini terutama perlu diperhatikan pada komoditas yang memiliki surplus produksi atau berperan sebagai sumber pasokan bagi daerah lain, seperti beras dan cabai merah.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Mempertimbangkan potensi dampak El Nino yang bersifat lintas wilayah, strategi pengendalian inflasi Sumatera Utara perlu diarahkan tidak hanya untuk menjaga produksi dan pasokan domestik, tetapi juga mengamankan *net supply* Sumut dengan memastikan ketersediaan pasokan masuk, mengantisipasi peningkatan arus keluar, serta memperkuat koordinasi perdagangan antarwilayah. Langkah strategis yang dapat ditempuh meliputi:

a. **Memperkuat Pemetaan Risiko dan Sistem Informasi Pasokan**
TPID Sumut perlu menyusun pemetaan risiko pasokan pangan untuk mengidentifikasi komoditas dan daerah prioritas berdasarkan ketergantungan pasokan dari luar daerah, potensi *outflow,* serta sensitivitas produksi terhadap El Nino. Pemetaan tersebut perlu didukung oleh informasi/*dashboard* yang mengintegrasikan informasi mengenai cuaca, produksi, stok, harga, serta arus komoditas antarwilayah. Sistem ini menjadi dasar penetapan prioritas dan pengambilan keputusan intervensi secara lebih cepat.

b. **Mengamankan dan Mendiversifikasi Sumber Pasokan**
Untuk komoditas dengan risiko pasokan tinggi, pengamanan perlu dilakukan melalui KAD atau kesepakatan pasokan berbasis volume dan periode *(contract farming),* disertai diversifikasi sumber pasokan dari daerah alternatif. KAD juga perlu dikembangkan sebagai mekanisme pasokan timbal balik antarwilayah, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai transaksi perdagangan, tetapi sebagai instrumen mitigasi risiko *supply shock.* Untuk komoditas dengan *lead time* panjang, langkah tersebut dapat didukung dengan penyediaan stok penyangga *(supply buffer)* sesuai tingkat risiko dan kebutuhan daerah.

c. **Melakukan Intervensi Secara Dini dan *Targeted***
Intervensi seperti GPM, SPHP, subsidi distribusi, dan operasi pasar perlu dilakukan berdasarkan *trigger* risiko, khususnya ketika terjadi kombinasi penurunan produksi dan *inflow,* peningkatan *outflow,* penurunan stok, serta kenaikan harga.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pengendalian inflasi dapat bergeser dari pola **reaktif terhadap kenaikan harga** menjadi **preventif berbasis risiko dan kondisi *net supply.***

BOKS 3

Perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD) *Bottom Up* Hortikultura Ke Wilayah Kalimantan: Perkuat Stabilitas Pangan Antarwilayah

Grafik 1. Perkembangan Inflasi Sumut vs Nasional (*ytd*)

Setelah sebelumnya sukses mengimplementasikan *Pilot Project* Kerja Sama Antardaerah (KAD) Kabupaten Karo dengan Kota Palangkaraya untuk cabai merah sebanyak 19 ton dan berhasil membantu mengangkat nilai jual cabai merah di Sumatera Utara saat pasokan berlebih, kali ini KAD juga diperluas antara Kabupaten Karo pedagang lainnya di Kalimantan. KAD didorong dengan mekanisme *bottom up* yakni mempertemukan langsung para pelaku usaha (e.g pedagang besar, BUMD) dengan para petani dan pelaku usaha lainnya. Hal ini mendorong berlangsungnya transaksi KAD secara *business-to-business* dan berkelanjutan dibandingkan transaksi aksidental. Akselerasi KAD secara *bottom up* ini juga didorong oleh rendahnya inflasi secara *year-to-date* dibandingkan dengan nasional pada triwulan II 2026 yang menandakan jatuhnya harga beberapa komoditas di bawah harga acuan tingkat petani pada periode panen raya sehingga diperlukan perluasan pasar. Pada Juni 2026, inflasi *year-to-date* Sumatera Utara tercatat sebesar 0,90% (ytd), jauh lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 1,79% (ytd) dan menjadi provinsi terendah kedua.

KAD Kabupaten Karo dengan Kota Palangkaraya

Sebagai tindak lanjut keberhasilan pilot project KAD cabai merah sebanyak 1.05 ton antara Kabupaten Karo dan Kota Palangka Raya pada April 2026 dan site visit produk horitultura daerah produsen, Kabupaten Karo melakukan pengiriman 15,5 ton produk hortikultura. Keberhasilan pengiriman perdana ini menjadi milestone dalam transformasi KAD dari skema transaksi insidentil menjadi kemitraan perdagangan hortikultura yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan mampu menjadi model penguatan ketahanan pangan antarwilayah.

Gambar 1. Pelaksanaan *Site Visit* dan Pengiriman KAD 15,5 ton Komoditas Hortikultura ke Palangka Raya

Implementasi KAD dilakukan melalui kemitraan antara kelompok tani di Kabupaten Karo yang bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Karo meliputi komoditas cabai merah keriting (300 kg), cabai rawit merah (100 kg), cabai rawit hijau (100 kg), jeruk (500 kg), kentang (3 ton), wortel (4 ton), kol (3 ton), jeruk (500 kg), sawi putih (2 ton), dan jipang (2,5 ton).

KAD Kabupaten Karo dengan Balikpapan dan Penajam Paser Utara

Perluasan KAD ke wilayah Kalimantan lainnya juga dilakukan bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan dan TPID Balikpapan

yang memfasilitasi pertemuan kemitraan antarpelaku usaha Balikpapan dan Karo secara *Business to Business* (B2B). Sebagai tindak lanjut, Bank Indonesia turut menfasilitasi pengiriman sampel hortikultura ke Kota Balikpapan guna memastikan kualitas produk sesuai dengan preferensi pedagang dan konsumen. Adapun pada Juni 2026, para pelaku usaha ketiga Kabupaten/Kota tersebut telah sepakat untuk memperluas kerja sama tidak terbatas pada komoditas cabai merah, melainkan turut mencakup cabai rawit, wortel, buah-buahan, dan sayuran. Sebagai tindak lanjut, pelaku usaha Kabupaten Karo juga telah mengirimkan sampel komoditas cabai merah, cabai rawit, wortel, kubis, dan lainnya ke Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk uji kelayakan pasar.

Gambar 2. Pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) TPID Kota Balikpapan

Gambar 3. Peninjauan komoditas pangan yang sudah tiba dari Kabupaten Karo

Gambar 4. Proses Penandatanganan MoU dan PKS KAD Kabupaten Karo dan Kota Balikpapan

MoU antara Pemerintah Kabupaten Karo dan Pemerintah Kota Balikpapan (G2G) selanjutnya diturunkan kepada PKS antara APINDO Kabupaten Karo dan CV Karya Mutiara Kota Balikpapan. Komoditas yang menjadi objek kerja sama antara lain cabai merah, cabai rawit, bawang merah, kentang, kubis, wortel, tomat, jeruk, buncis, serta komoditas hortikultura lainnya yang disepakati para pihak. Dalam pelaksanaannya, APINDO Kabupaten Karo berperan memfasilitasi ketersediaan pasokan, memastikan kualitas dan ketepatan waktu pengiriman, serta menyediakan informasi produksi dan masa panen. Sementara itu, CV Karya Mutiara berperan dalam penyerapan dan pemasaran komoditas, dukungan distribusi dan logistik, serta menyampaikan kebutuhan pasar secara berkala. Selanjutnya, mekanisme teknis terkait volume, harga, kualitas, jadwal pengiriman, dan teknis lainnya turut dituangkan lebih lanjut dalam *Implementation Agreement* atau *Purchase Order*. Setiap pengiriman juga dilengkapi dokumen pengiriman dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Adapun PKS direncanakan berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Grafik 2. Pergerakan harga cabai merah konsumen Balikpapan dengan produsen Karo

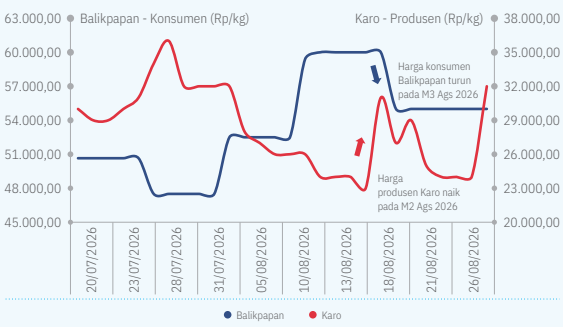

Grafik 3. Pergerakan harga cabai rawit konsumen Balikpapan dengan produsen Karo

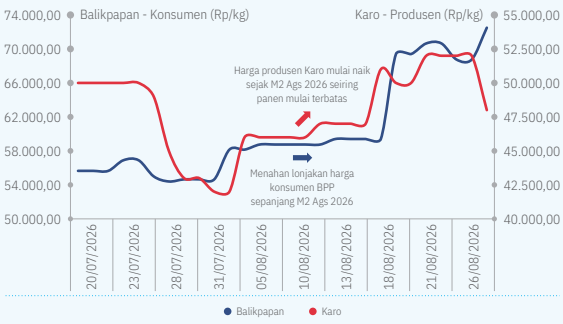

Grafik 4. Pergerakan harga bawang merah konsumen Balikpapan dengan produsen Karo

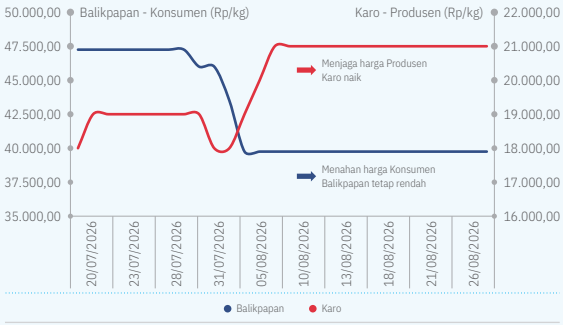

Penguatan Hulu-Hilir untuk Kontinuitas KAD

Agar KAD tidak berhenti pada transaksi sporadis, diperlukan penguatan kelembagaan dari sisi hulu maupun hilir. Kelompok tani/Gapoktan di Kabupaten Karo akan terus diperkuat agar mampu memenuhi standar volume, kualitas, kontinuitas, dan ketepatan waktu pengiriman sesuai kebutuhan pasar. Pemerintah Kabupaten Karo turut mendorong pembangunan *cold storage* berskala besar yang diharapkan dapat memperpanjang masa simpan komoditas hingga 6 bulan. Langkah ini sangat penting untuk menjaga pasokan di luar musim panen. Selain itu, terdapat skema penghapusan pajak/retribusi tertentu selama 1 (satu) tahun bagi pelaku usaha yang berkontribusi membantu petani melalui dukungan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sementara itu, di sisi hilir, koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah, KPwBI Balikpapan, dan pelaku usaha juga terus diperkuat melalui penyusunan besarnya kebutuhan dan jadwal pengiriman secara berkala.

Dengan dukungan infrastruktur logistik yang memadai, penguatan peran *offtaker,* serta peningkatan sinergi antarpemangku kepentingan, KAD Kabupaten Karo–Kota Balikpapan-Kabupaten Penajam Paser Utara berpotensi menjadi model penguatan konektivitas pangan antardaerah yang tidak hanya mendukung pengendalian inflasi, tetapi juga memperluas akses pasar petani, meningkatkan efisiensi distribusi, dan memperkuat ketahanan pangan Nasional.

03.

Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan, Serta UMKM

YOY
Pertumbuhan Kredit*

4,07%
7,69%

*Lokasi Proyek

YOY
Pertumbuhan Kredit UMKM

-0,81%
-1,44%

*Lokasi Proyek

Non-Performing Loan*

1,94%
1,91%

*Lokasi Proyek

YOY
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga**

4,58%
4,49%

**Perbankan Sumut

Loan-To-Deposit Ratio**

90,27%
96,28%

**Perbankan Sumut

- Triwulan I 2026
- Triwulan II 2026

03.

Kinerja pembiayaan Sumatera Utara pada triwulan II 2026 menunjukkan kondisi yang tetap resilien di tengah proses pemulihan aktivitas ekonomi yang masih berlangsung pascabencana akhir tahun 2025. Fungsi intermediasi perbankan mengalami peningkatan, tecermin dari akselerasi pertumbuhan kredit menjadi 7,69% (yoy), terutama didorong oleh percepatan kredit modal kerja dan pertumbuhan kredit investasi yang tetap tinggi. Perkembangan tersebut mengindikasikan meningkatnya permintaan pembiayaan produktif seiring dengan penguatan aktivitas ekonomi di Sumatera Utara. Di sisi lain, risiko kredit tetap terkendali, tecermin dari rasio NPL sebesar 1,91%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 2,1%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran pembiayaan tetap diikuti dengan kualitas kredit yang terjaga.

Secara keseluruhan, akselerasi pembiayaan yang disertai dengan risiko kredit yang tetap terkendali mencerminkan terjaganya ketahanan sistem keuangan di Sumatera Utara. Kondisi ini turut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya pembiayaan bagi dunia usaha dan rumah tangga, khususnya untuk mendorong aktivitas produksi, investasi, dan konsumsi di tengah proses pemulihan ekonomi pascabencana.

Ke depan, prospek pembiayaan perbankan Sumatera Utara diperkirakan terus meningkat seiring dengan semakin stabilnya aktivitas ekonomi pascabencana dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk mendukung berbagai program strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan risiko kredit yang tetap terkendali, peningkatan kapasitas intermediasi perbankan diharapkan dapat terus memperkuat pemulihan dan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ke depan.

3.1. Pembiayaan Daerah

Kendati perekonomian regional masih menghadapi tantangan akibat kondisi eksternal global, kinerja pembiayaan di Sumatera Utara pada triwulan II 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang kuat dan turut menopang pemulihan ekonomi Sumatera Utara.

Penyaluran kredit di Sumatera Utara pada triwulan II 2026 mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,69% (yoy), meningkat cukup signifikan dari 4,07% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh akselerasi kredit modal kerja, dari -4,53% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 5,29% (yoy) pada triwulan II 2026, serta meningkatnya kredit korporasi dari 3,11% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 8,93% (yoy) pada triwulan II 2026. Sementara itu, kredit investasi juga masih tumbuh tinggi meski lebih moderat dibanding triwulan sebelumnya dengan angka 15,17% (yoy).

Penguatan pembiayaan produktif tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sebesar 5,06% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 4,98% (yoy). Akselerasi kredit modal kerja memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, memenuhi kebutuhan bahan baku, memperlancar distribusi, serta menjaga kesinambungan operasional. Sementara itu, masih tingginya pertumbuhan kredit investasi menunjukkan pembiayaan terhadap penambahan kapasitas produksi dan investasi dunia usaha yang masih cukup baik. Adapun berdasarkan lapangan usaha, akselerasi kredit juga didorong oleh meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar Eceran, Transportasi, dan Pertanian.

Meski demikian, kredit konsumsi masih tertahan pada triwulan II 2026 dengan pertumbuhan 4,75% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 6,32% (yoy). Perlambatan ini terjadi di seluruh komponen kredit konsumsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akselerasi intermediasi perbankan pada periode laporan lebih banyak bersumber dari pembiayaan produktif dibandingkan pembiayaan konsumtif.

Selanjutnya, rasio Non-Performing Loan (NPL) pada triwulan II 2026 sebesar 1,91% relatif menurun dari 1,94% pada triwulan sebelumnya. Penurunan NPL tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kualitas kredit dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan peningkatan kinerja dunia usaha.

Ke depan, prospek intermediasi perbankan Sumatera Utara diperkirakan tetap positif, didukung oleh berlanjutnya aktivitas ekonomi dan penguatan kinerja sektor utama Sumatera Utara. Kondisi likuiditas perbankan yang memadai dan kualitas kredit yang terjaga memberikan ruang bagi perbankan untuk melanjutkan ekspansi, khususnya pada kredit modal kerja dan investasi. Penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter juga menjadi penting untuk memastikan ketersediaan pembiayaan berjalan searah dengan stimulus perekonomian daerah. Dengan transmisi pembiayaan yang semakin kuat ke sektor produktif, intermediasi perbankan diharapkan tidak hanya menopang pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat aktivitas usaha Sumatera Utara sehingga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026.

3.1.1. Perkembangan Penyaluran Kredit

Likuiditas perbankan pada triwulan laporan masih memadai untuk mendukung peningkatan fungsi intermediasi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dunia usaha dan aktivitas ekonomi produktif. Transmisi likuiditas ke sektor riil mulai berjalan lebih optimal, dengan tetap didukung oleh kualitas kredit yang relatif terjaga.

Pertumbuhan kredit perbankan di Sumatera Utara pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 7,69% (yoy), meningkat dibandingkan capaian 4,07% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan mulai membaiknya permintaan kredit produktif, sejalan dengan penguatan aktivitas ekonomi daerah dan meningkatnya kebutuhan modal kerja maupun pembiayaan ekspansi usaha.

Grafik 3.1. Perkembangan Kredit dan NPL Sumatera Utara

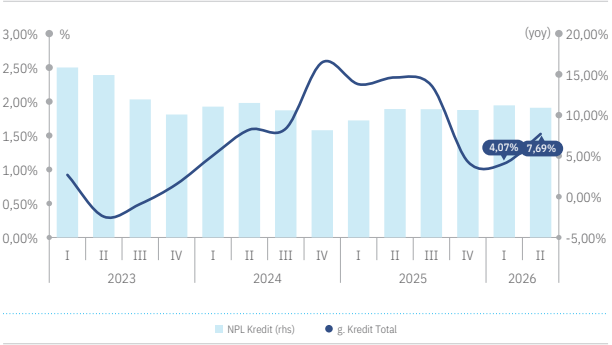

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Di tengah peningkatan penyaluran kredit tersebut, kualitas kredit tecermin dari rasio NPL pada triwulan II 2026 relatif terjaga sebesar 1,91%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 1,94% dan masih jauh di bawah ambang batas 5%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan intermediasi perbankan masih diikuti dengan kualitas aset yang relatif baik serta kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang tetap terjaga –(Grafik 3.1).

Berdasarkan jenis usahanya, pertumbuhan kredit konvensional menunjukkan peningkatan, sementara kredit syariah tetap tumbuh tinggi meski sedikit melambat. Kredit konvensional tumbuh sebesar 7,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 3,32% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Selanjutnya, kredit syariah masih tumbuh tinggi sebesar 12,49% (yoy) pada triwulan II 2026 – (Grafik 3.2).

Peningkatan kredit pada triwulan II 2026 terutama didorong oleh akselerasi kredit modal kerja dari -4,53% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 5,29% (yoy) pada triwulan II 2026) – (Grafik 3.3). Kredit investasi juga masih tumbuh tinggi di angka 15,17% (yoy). Kondisi ini mengindikasikan mulai pulihnya permintaan pembiayaan produktif setelah sebelumnya relatif tertahan sejalan dengan penguatan aktivitas ekonomi di Sumatera Utara.

Di sisi lain, kredit konsumsi masih tertahan pada triwulan II 2026 dengan pertumbuhan 4,75% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 6,32% (yoy). Hal ini seiring dengan masih terbatasnya permintaan pembiayaan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga serta kecenderungan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pengeluaran dan pengambilan kredit.

Selanjutnya pada triwulan II 2026, struktur kredit masih didominasi oleh kredit modal kerja dengan pangsa 43,43%, diikuti kredit konsumsi sebesar 28,82% dan kredit investasi sebesar 27,75% – (Grafik 3.4). Adapun porsi untuk kredit modal kerja dan investasi menunjukkan peningkatan dibanding triwulan sebelumnya, sementara porsi kredit konsumsi mengalami penurunan. Secara ringkas, struktur pertumbuhan kredit pada triwulan II 2026 menunjukkan pergeseran yang lebih kuat ke arah pembiayaan produktif, tecermin dari akselerasi pertumbuhan dan porsi pembiayaan modal kerja dan tetap tingginya pertumbuhan kredit investasi, sejalan dengan membaiknya aktivitas dunia usaha.

Kinerja penjualan lapangan usaha turut menunjukkan perkembangan yang cukup baik, tecermin dari *Likert Scale* permintaan domestik yang relatif stabil di angka 0,52 pada triwulan II 2026 – (Grafik 3.5). Selanjutnya, *Likert Scale* permintaan ekspor juga meningkat dari 0,07

Grafik 3.2. Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenis Usaha Bank

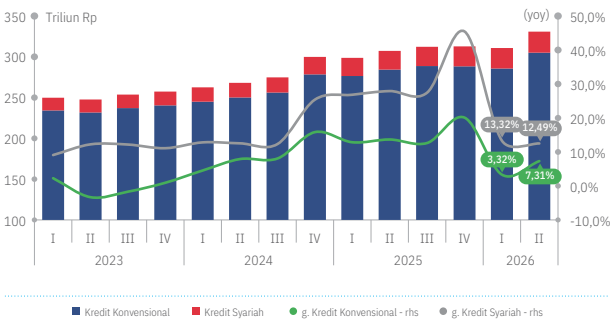

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.3. Perkembangan Kredit Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Penggunaan

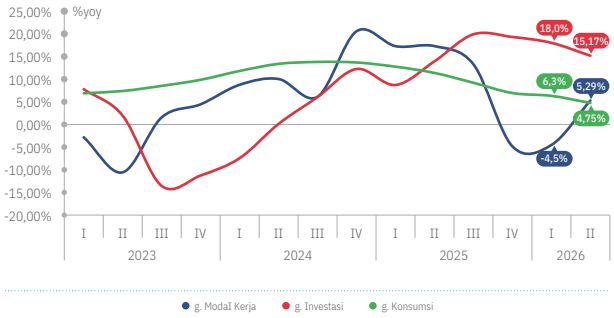

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.4. Pangsa Kredit Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Penggunaan

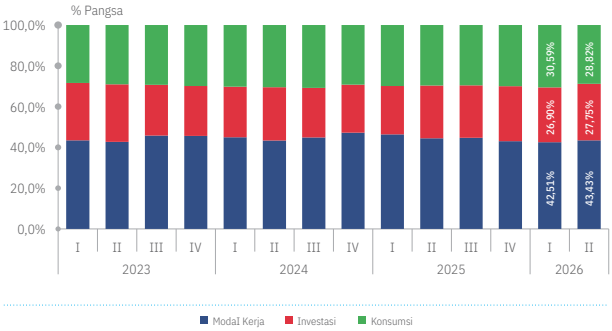

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.5. *Likert Scale* Permintaan Domestik dan Permintaan Ekspor – Liaison Bank Indonesia

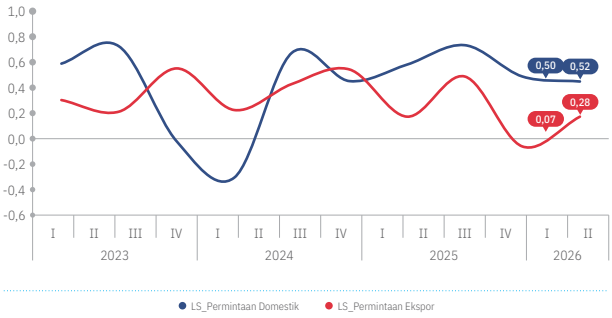

Sumber: Bank Indonesia, diolah

pada triwulan I 2026 menjadi 0,28 pada triwulan II 2026. Hal ini mengindikasikan bahwa intensitas aktivitas ekonomi sektor usaha di triwulan II mulai terakselerasi, didukung oleh penguatan permintaan baik dari pasar domestik maupun eksternal. Peningkatan permintaan ekspor juga berpotensi mendorong peningkatan produksi dan aktivitas usaha pada periode mendatang. Secara keseluruhan, perkembangan tersebut mengindikasikan momentum pemulihan aktivitas dunia usaha yang semakin menguat.

Secara spasial, penyaluran kredit pada triwulan II 2026 masih didominasi oleh Kota Medan dengan pangsa terbesar mencapai 48,23%, meningkat dibandingkan 47,34% pada triwulan sebelumnya. Posisi berikutnya ditempati oleh Kabupaten Deli Serdang dengan pangsa 14,07%, diikuti Kabupaten Simalungun (4,41%), Kabupaten Labuhan Batu (4,05%), dan Kabupaten Asahan (3,60%) – (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Perkembangan Kredit Sumatera Utara Berdasarkan Kabupaten/ Kota

Kab/ Kota	Pangsa (%)		Growth (%,yoy)	
	I-26	II-26	I-26	II-26
Kota Medan	47,34	48,23	-0,58	6,99
Kab. Deli Serdang	13,29	14,07	2,74	13,62
Kab. Labuhan Batu	5,02	4,05	40,97	-17,25
Kab. Asahan	3,88	3,60	1,51	-0,13
Kab. Simalungun	3,71	4,41	54,35	67,65

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Dari sisi pertumbuhan, dinamika antarwilayah menunjukkan pergeseran sumber ekspansi kredit. Beberapa Kabupaten/Kota mengalami akselerasi diantaranya Kota Medan (6,99% yoy), Kabupaten Deli Serdang (13,62% yoy), dan Kabupaten Simalungun (67,65% yoy). Hal ini menunjukkan bahwa sumber pertumbuhan kredit mulai bergeser ke wilayah yang didukung oleh dominasi sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar Eceran, dan Pertanian (subsektor Perkebunan).

Sementara itu, penurunan pembiayaan terjadi di Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Asahan masing-masing sebesar -17,25% (yoy) dan -0,13% (yoy). Kondisi ini mengindikasikan bahwa wilayah tersebut masuk dalam fase normalisasi aktivitas ekonomi setelah tumbuh cukup tinggi pada triwulan sebelumnya.

Ditinjau menurut sektornya, sebagian besar pembiayaan sektor utama di Sumatera Utara

Grafik 3.6. Perkembangan Kredit Sektoral

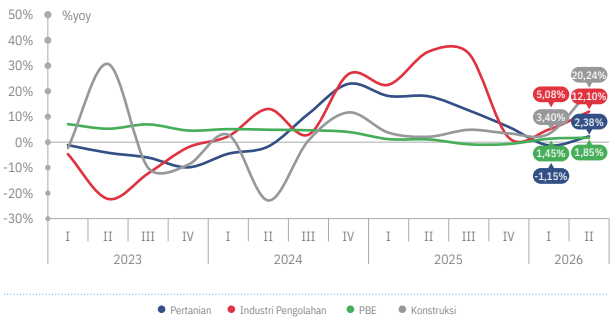

Sumber: Bank Indonesia, diolah

menunjukkan kinerja yang baik – (Grafik 3.6). Kredit sektor Konstruksi dan Industri Pengolahan tumbuh tinggi masing-masing sebesar 20,24% (yoy) dan 12,10% (yoy) sejalan dengan percepatan pembangunan program Pemerintah (sekolah rakyat, Bus Rapid Transit, dapur Makan Bergizi Gratis) serta peningkatan aktivitas investasi khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Simalungun.

Selanjutnya, sektor Pertanian dan Perdagangan Besar Eceran juga mencatatkan akselerasi pembiayaan didorong oleh meningkatnya kebutuhan modal kerja seiring dengan penguatan aktivitas produksi, distribusi, dan perdagangan komoditas unggulan Sumatera Utara. Secara umum, perbaikan pembiayaan mulai meluas pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan kuat dengan aktivitas ekonomi daerah, baik dari sisi produksi maupun distribusi, mengindikasikan semakin kuatnya dukungan pembiayaan perbankan terhadap ekspansi aktivitas ekonomi dan investasi di Sumatera Utara.

3.1.2. Risiko Perbankan

Dari sisi kualitas, risiko kredit pada triwulan II 2026 tetap terjaga pada level yang relatif rendah. NPL kredit modal kerja dan kredit investasi masing-masing mengalami penurunan dibandingkan triwulan I 2026, berada pada level 1,92% dan 1,44%, masih jauh di bawah ambang batas 5% – (Grafik 3.7). Di sisi lain, NPL kredit konsumsi tercatat sebesar 2,34%, sedikit lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya dan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,17%, mencerminkan masih adanya tekanan risiko pada pembiayaan rumah tangga. Dari total keseluruhan, NPL kredit menunjukkan penurunan berada pada level 1,91% dibandingkan 1,94% pada triwulan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko kredit masih terkendali di tengah akselerasi penyaluran kredit, dengan kualitas kredit yang cukup baik.

Dari perspektif sektoral, risiko kredit sektor Pertanian mencatat penurunan NPL dari 1,30% menjadi 1,26%. Beberapa sektor lainnya juga mengalami penurunan risiko kredit, yaitu Konstruksi dari 5,87% menjadi 4,74%, Perdagangan Besar Eceran dari 3,67% menjadi 3,57%, Transportasi dari 3,68% menjadi 1,45%, dan Akomodasi Makan Minum dari 3,32% menjadi 3,20%. Hal ini seiring dengan meningkatnya aktivitas usaha dan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

Di sisi lain, risiko kredit sektor Industri Pengolahan terpantau sedikit meningkat dengan NPL 0,83%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 0,73%. Meski demikian, angka NPL tersebut masih berada jauh di bawah ambang batas 5% sehingga risiko kredit Industri Pengolahan masih dinilai relatif terkendali.

Secara umum, pertumbuhan kolektibilitas kredit di Sumatera Utara pada triwulan II 2026 masih terjaga, tecermin dari meningkatnya pertumbuhan Kol 1 restrukturisasi (lancar) dari 52,29% (yoy) menjadi 65,01% (yoy) dan Kol 2 restrukturisasi yang masih terkontraksi sebesar 22,83% – (Grafik 3.8). Meski demikian, total LaR menunjukkan peningkatan pada triwulan II 2026 menjadi 7,18%. Kondisi ini menunjukkan

Grafik 3.7. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Penggunaan Kredit

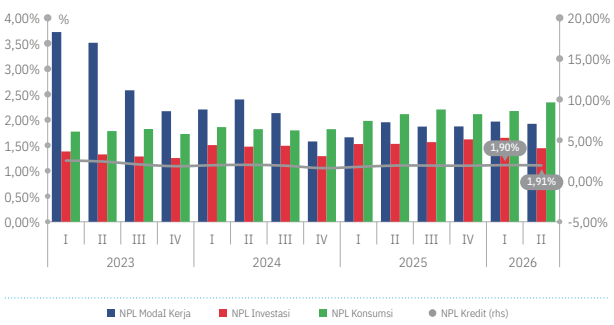

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.8. Perkembangan *Loan at Risk* di Sumatera Utara

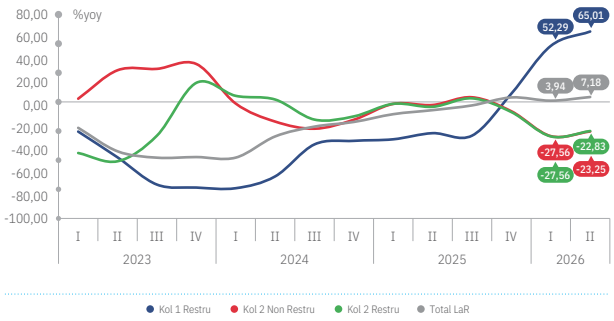

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.9. Perkembangan Suku Bunga Kredit, Suku Bunga DPK, dan BI-Rate

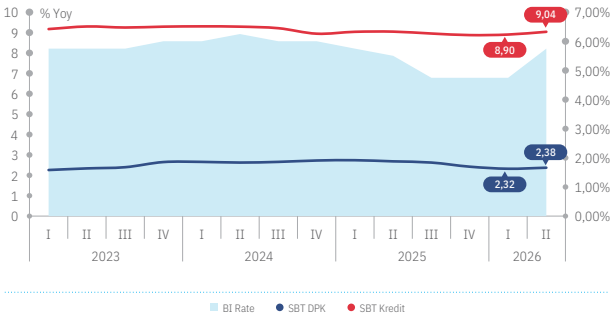

Sumber: Bank Indonesia, diolah

bahwa perbaikan kualitas kredit belum sepenuhnya merata, dengan peningkatan pada Kol 1 restrukturisasi yang mengindikasikan masih adanya upaya menjaga kualitas debitur, sementara kenaikan LaR perlu menjadi perhatian karena mencerminkan potensi risiko kredit yang dapat meningkat ke depan.

Risiko suku bunga perbankan Sumatera Utara tetap perlu dicermati di tengah kenaikan suku bunga acuan yang direspons lebih cepat oleh perbankan melalui penyesuaian suku bunga kredit dibandingkan suku bunga DPK (Grafik 3.9). Perkembangan tersebut mengindikasikan adanya perbedaan kecepatan penyesuaian *(repricing)* antara aset dan liabilitas perbankan. Risiko utama yang perlu diperhatikan adalah potensi ketidaksesuaian repricing antara aset dan liabilitas, terutama apabila kenaikan biaya dana berlangsung lebih cepat atau lebih besar dibandingkan peningkatan imbal hasil aset, yang dapat menekan margin bunga bersih (*net interest margin*/NIM) dan profitabilitas perbankan.

Di sisi lain, kenaikan suku bunga kredit juga berpotensi meningkatkan beban pembayaran utang bagi sektor korporasi dan rumah tangga, khususnya debitur dengan skema suku bunga mengambang *(floating rate)*. Kondisi tersebut dapat menekan kapasitas pembayaran debitur, mengurangi ruang ekspansi dan konsumsi, serta pada akhirnya meningkatkan risiko kredit perbankan apabila tekanan terhadap kemampuan pembayaran berlangsung secara berkelanjutan.

3.1.3. Asesmen Ketahanan Korporasi

Penyaluran kredit korporasi di Sumatera Utara terakselerasi pada triwulan II 2026 dengan pertumbuhan 13,25% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 5,32% – (Grafik 3.10). *Outstanding* kredit korporasi meningkat sebesar Rp166,02 triliun dari

Grafik 3.10. Pertumbuhan Kredit Korporasi

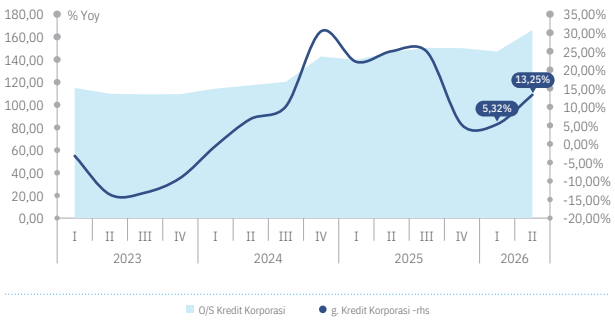

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.12. Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha

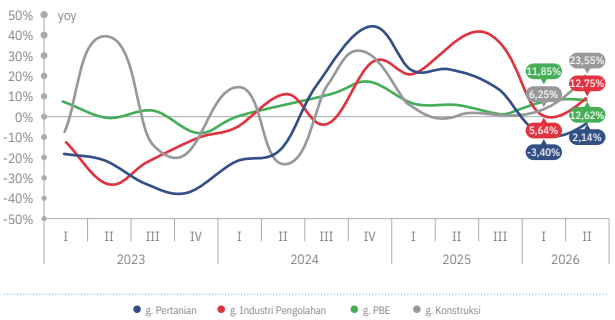

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Rp147,03 triliun pada triwulan I 2026, disebabkan oleh penggunaan kredit untuk pemenuhan modal kerja.

Akselerasi kredit korporasi utamanya didorong oleh akselerasi kredit modal kerja. Kredit modal kerja meningkat sebesar 10,94% (yoy), dari sebelumnya terkontraksi 3,28% (yoy), sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk mendukung aktivitas operasional, pengadaan bahan baku, serta pemulihan dan ekspansi kegiatan usaha – (Grafik 3.11) . Di sisi lain, kredit investasi masih tumbuh tinggi meski sedikit termoderasi dari 23,00% (yoy) menjadi 17,17% (yoy), mencerminkan keberlanjutan ekspansi kapasitas usaha dan investasi korporasi, meskipun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan periode sebelumnya. Penguatan kredit korporasi dan kredit modal kerja pada triwulan laporan menunjukkan optimisme pelaku usaha yang semakin solid terhadap prospek ekonomi regional, sementara risiko kredit korporasi tetap terjaga dengan rasio NPL 1,02% pada triwulan II 2026.

Kredit korporasi berdasarkan sektor utama di Sumatera Utara tumbuh meningkat pada triwulan II 2026. Kondisi ini utamanya didorong dari meningkatnya pertumbuhan kredit sektor Konstruksi dan Industri pengolahan dengan pertumbuhan masing-masing mencapai 23,55% (yoy) dan 12,75% (yoy) – (Grafik 3.12). Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur dan proyek strategis di Sumatera Utara, antara lain pembangunan BRT Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) yang memasuki tahap pembangunan fisik pada triwulan II 2026 yang ditargetkan rampung pada 2027. Proyek tersebut memiliki nilai sekitar Rp1,9 triliun dan mencakup pembangunan koridor serta halte transportasi publik. Selain itu, akselerasi berbagai kegiatan pembangunan daerah turut mendukung peningkatan kebutuhan pembiayaan konstruksi, salah satunya pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Padangsidimpuan yang ditargetkan mulai menerima siswa pada Juli 2026.

Selanjutnya, sektor Perdagangan Besar Eceran dan Pertanian turut menunjukkan peningkatan masing-masing sebesar 12,62% (yoy) dan 2,14% (yoy) pada triwulan II 2026, sejalan dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dan kebutuhan pembiayaan modal kerja untuk mendukung distribusi barang serta aktivitas produksi dan pengadaan sarana pertanian.

Selanjutnya, dilihat berdasarkan risiko kreditnya, risiko kredit korporasi di Sumatera Utara pada triwulan II 2026 tetap terjaga. NPL total tercatat sebesar 1,02%,

Grafik 3.11. Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan

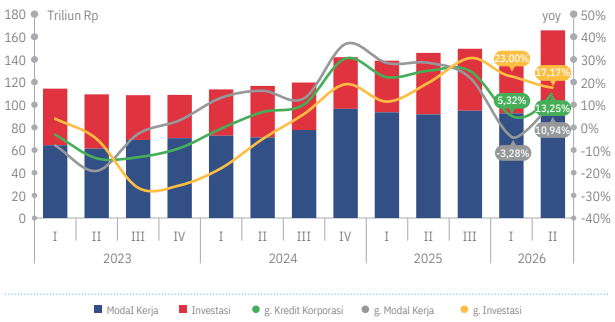

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.13. NPL Kredit Korporasi

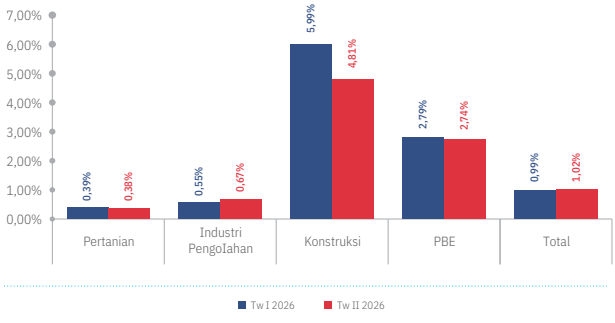

Sumber: Bank Indonesia, diolah

relatif stabil dan berada pada level yang rendah dan terkendali – (Grafik 3.13). Beberapa sektor utama justru menunjukkan penurunan risiko kredit antara lain Kontruksi, Perdagangan Besar Eceran, dan Pertanian. Di sisi lain, NPL sektor Industri Pengolahan tercatat sedikit meningkat dari 0,55% ke 0,67%. Meski demikian, keseluruhan risiko kredit korporasi yang bergerak di sektor utama Sumatera Utara berada di bawah ambang batas 5% dan diprakirakan relatif terkendali ke depan.

3.1.4. Penghimpunan DPK Korporasi

Pada triwulan II 2026, pertumbuhan simpanan menurut jenis nasabah di Sumatera Utara menunjukkan perkembangan yang beragam. **Simpanan segmen korporasi menunjukkan peningkatan menjadi 4,17% (yoy) di tengah perlambatan simpanan segmen Pemerintah dan perorangan – (Grafik 3.14).** Hal ini sejalan dengan membaiknya aktivitas usaha dan meningkatnya kebutuhan pengelolaan likuiditas perusahaan.

Berdasarkan kelompok deposan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada segmen dana besar (>Rp5 miliar) yang meningkat dari 11,04% (yoy) menjadi 11,48% (yoy), didorong oleh peningkatan penempatan dana oleh nasabah korporasi yang masih menjaga likuiditas pada sistem perbankan – (Grafik 3.15). Selanjutnya, segmen ritel (Rp0–Rp500 juta) turut meningkat dari 0,76% (yoy) menjadi 1,86% (yoy). Sementara itu, segmen dana menengah (Rp500 juta–Rp5 miliar) relatif menurun dari 1,53% (yoy) menjadi -0,57% (yoy). Penurunan pada segmen dana menengah mengindikasikan bahwa pelaku usaha skala menengah cenderung memanfaatkan dana yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan modal kerja tahun berjalan.

Grafik 3.14. Proporsi DPK Sumatera Utara Berdasarkan Pemilik

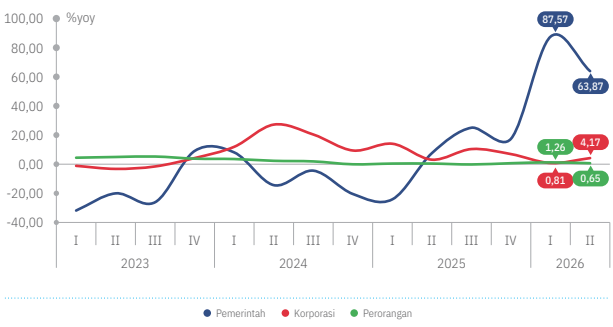

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.15. Pertumbuhan DPK Berdasarkan Kelompok Deposan

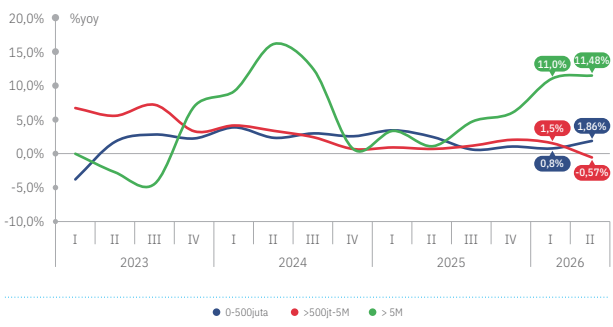

Sumber: Bank Indonesia, diolah

3.1.5. Asesmen Ketahanan Rumah Tangga

Pada triwulan II 2026, keyakinan rumah tangga di Sumatera Utara terhadap kondisi ekonomi relatif menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang menurun dari 102,98 pada triwulan I 2026 menjadi 94,60 pada triwulan II 2026, didorong oleh penurunan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dari 108,11 menjadi 99,08 – (Grafik 3.16). Perkembangan ini mengindikasikan menurunnya optimisme rumah tangga terhadap prospek ekonomi ke depan, termasuk ketersediaan lapangan kerja di daerah, kegiatan usaha kedepan, dan penghasilan kedepan. Selain itu, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) juga tercatat menurun dari 97,85 ke 90,12 pada triwulan laporan. Adapun posisi IKK, IEK, maupun IKE berada di bawah level 100 menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga masih menilai kondisi ekonomi aktual dan ke depan secara hati-hati (di bawah level optimis).

Selain indikator persepsi dan ekspektasi konsumen, perkembangan harga properti residensial primer turut menjadi indikator penting dalam menilai ketahanan finansial rumah tangga. Pada triwulan II 2026, harga properti residensial primer di Sumatera Utara tumbuh lebih tinggi sebesar 1,05% (yoy). Secara segmentasi, harga rumah tipe kecil tercatat stagnan (0,00% yoy), sementara tipe menengah dan besar masing-masing tumbuh sebesar 1,22% dan 1,91% (yoy) – (Grafik 3.17).

Pertumbuhan harga tersebut mengindikasikan bahwa permintaan dan aktivitas pasar properti residensial masih terjaga, terutama pada segmen rumah tipe menengah dan besar. Namun, stagnasi harga properti pada tipe kecil menunjukkan bahwa daya beli masyarakat pada kelompok ekonomi kelas bawah masih relatif terbatas, sehingga penguatan pasar properti ke depan tetap bergantung pada perkembangan pendapatan rumah tangga, daya beli, serta aksesibilitas pembiayaan perumahan.

Grafik 3.16. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia Sumatera Utara: Indeks Ekspektasi

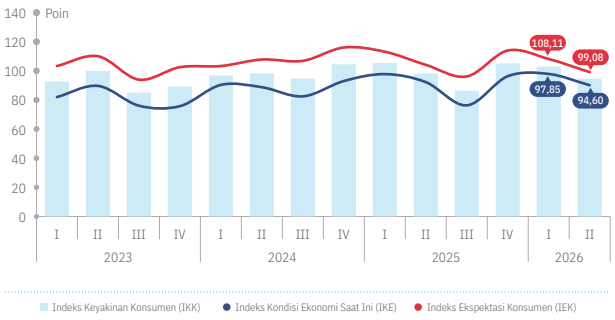

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.17. Hasil Survei Perkembangan Harga Properti Residensial Primer Sumatera Utara

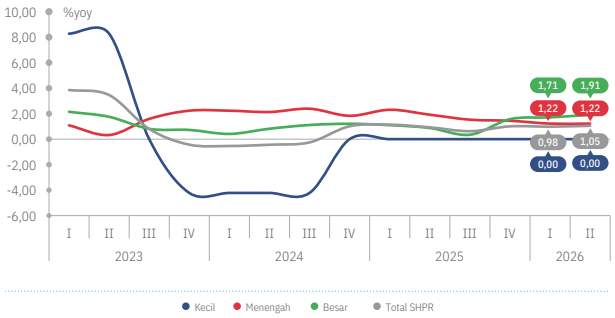

Sumber: Bank Indonesia, diolah

3.1.6. Penghimpunan DPK Rumah Tangga

Menurunnya IKK dan IEK pada triwulan II 2026 menunjukkan menurunnya optimisme rumah tangga terhadap prospek ekonomi ke depan. Kondisi tersebut sejalan dengan pola pengelolaan keuangan rumah tangga melalui penghimpunan DPK. Pada triwulan II 2026, DPK rumah tangga tumbuh sebesar 0,65% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,26% (yoy) – (Grafik 3.18). Moderasi tersebut terutama didorong oleh perlambatan pertumbuhan tabungan dari 6,48% (yoy) menjadi 5,38% (yoy), serta kontraksi pada giro sebesar 13,45% (yoy) dan deposito sebesar 6,13% (yoy).

Perkembangan ini mengindikasikan adanya kecenderungan rumah tangga untuk lebih berhati-hati dalam mengelola likuiditas, dengan pertumbuhan simpanan yang melambat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan penggunaan dana untuk memenuhi konsumsi dan kebutuhan rumah tangga. Namun, perlambatan DPK juga perlu dicermati sebagai indikasi bahwa ruang finansial rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi maupun menyimpan tabungan masih relatif terbatas, sejalan dengan moderasi keyakinan terhadap prospek ekonomi.

Grafik 3.18. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Sektor Rumah Tangga di Sumatera Utara

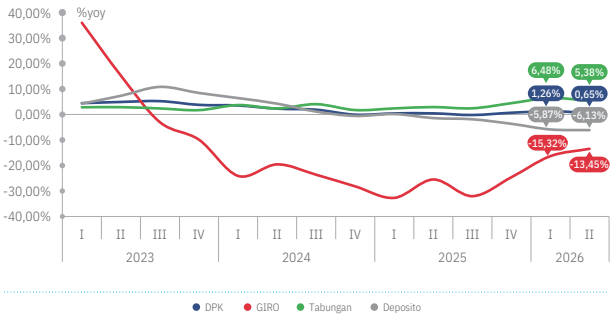

Sumber: Bank Indonesia, diolah

3.1.7. Eksposur Perbankan pada Sektor Rumah Tangga

Pertumbuhan kredit rumah tangga di Sumatera Utara pada triwulan II 2026 melanjutkan tren perlambatan. Pada periode laporan, kredit rumah tangga (RT) tumbuh sebesar 4,75% (yoy), lebih rendah dibandingkan 6,32% (yoy) pada triwulan I 2026 – (Grafik 3.19). Moderasi pertumbuhan ini terjadi di tengah menurunnya keyakinan dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan, serta pertumbuhan DPK rumah tangga yang turut melambat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa menurunnya ekspektasi konsumen mulai tertransmisikan pada perilaku pembiayaan rumah tangga, khususnya melalui kredit konsumsi, sehingga permintaan pembiayaan cenderung lebih terbatas dan ekspansi kredit berlangsung secara lebih selektif. Perkembangan ini juga menunjukkan bahwa rumah tangga masih cenderung berhati-hati dalam mengambil kewajiban baru, sejalan dengan upaya menjaga ketahanan keuangan di tengah dinamika pendapatan dan prospek ekonomi.

1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Kinerja KPR di Sumatera Utara pada triwulan II 2026 tumbuh terbatas. Pada triwulan II 2026, KPR tumbuh sebesar 2,25% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan 2,47% (yoy) pada triwulan sebelumnya – (Grafik 3.19). Sedikit melambatnya pertumbuhan agregat tersebut mencerminkan moderasi permintaan pembiayaan perumahan sejalan dengan melemahnya keyakinan dan ekspektasi konsumen, meskipun kebutuhan kepemilikan rumah dan daya beli pada segmen tertentu masih tetap terjaga.

Secara struktur, pertumbuhan KPR masih didominasi oleh rumah tinggal tipe menengah (22–70 m²) yang memiliki pangsa terbesar dalam portofolio pembiayaan dengan

Grafik 3.19. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga

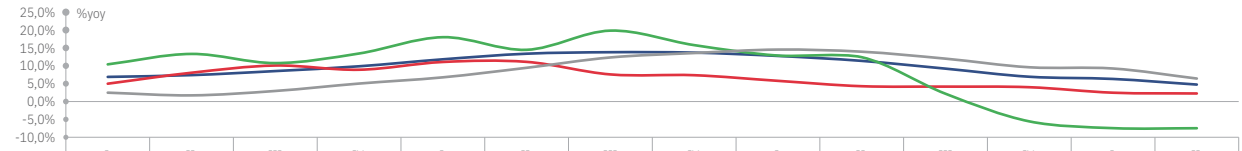

	2023 I	2023 II	2023 III	2023 IV	2024 I	2024 II	2024 III	2024 IV	2025 I	2025 II	2025 III	2025 IV	2026 I	2026 II
Kredit RT	6,9%	7,4%	8,5%	9,9%	11,8%	13,4%	13,8%	13,7%	12,75%	11,38%	9,20%	6,93%	6,32%	4,75%
KPR	5,0%	8,1%	10,1%	8,9%	11,1%	11,1%	7,6%	7,4%	5,79%	4,29%	4,17%	4,01%	2,47%	2,25%
KKB	10,4%	13,3%	10,8%	13,4%	18,0%	14,5%	19,8%	15,8%	12,85%	12,40%	2,18%	-5,55%	-7,45%	-7,47%
Multiguna	2,5%	1,7%	3,0%	5,0%	6,8%	9,4%	12,3%	13,6%	14,54%	13,94%	12,00%	9,59%	9,24%	6,43%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

peningkatan pertumbuhan mencapai 4,19% (yoy) pada triwulan II 2026 – (Tabel 3.2). Rumah tipe besar (di atas tipe 70 m2) mengalami perlambatan pertumbuhan meski tetap menjadi penopang utama kinerja KPR pada triwulan II 2026. Sementara itu, tipe kecil (≤ 21 m²) masih berada dalam fase kontraksi. Pola ini mengindikasikan bahwa permintaan properti lebih terkonsentrasi pada segmen rumah tipe menengah dengan kemampuan daya beli yang relatif lebih tinggi dan kebutuhan hunian masyarakat, sementara permintaan pada segmen rumah tipe kecil masih menghadapi keterbatasan daya beli dan pada segmen tipe besar cenderung lebih selektif.

Pada segmen *flat*/apartemen, pertumbuhan tetap tinggi meskipun dengan pangsa yang masih terbatas sehingga dampaknya terhadap kinerja agregat belum signifikan. Sementara itu, pembiayaan rumah toko/rukan relatif menurun seiring penurunan aktivitas usaha. Dari sisi kebijakan, Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran rasio Loan to Value (LTV) dan *Financing to Value* (FTV) hingga 100% atau uang muka 0% untuk pembelian rumah sampai dengan akhir tahun 2026.

Selain itu, insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah dengan batas harga tertentu turut menjaga akses pembiayaan sektor properti hingga akhir tahun 2026. Namun demikian, pada triwulan II 2026, rumah tangga cenderung bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil kewajiban kredit jangka panjang.

2. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) di Sumatera Utara pada triwulan II 2026 masih mengalami kontraksi, terutama dipengaruhi pelemahan pada segmen mobil roda empat. Pada triwulan II 2026, KKB terkontraksi sebesar 7,47% (yoy) – (Grafik 3.19). Terkontraksinya KKB terutama disebabkan oleh penurunan pada kredit mobil roda empat yang memiliki pangsa dominan dalam portofolio KKB – (Tabel 3.3). Pelemahan pada segmen ini memberikan tekanan signifikan terhadap kinerja agregat pembiayaan kendaraan bermotor.

Kontraksi pada kredit mobil mencerminkan masih tertahannya permintaan kendaraan roda empat, di mana rumah tangga cenderung menunda pembelian barang tahan lama di tengah sikap kehati-hatian dalam pengeluaran berbasis kredit. Perkembangan ini menunjukkan bahwa faktor non-harga, seperti ekspektasi kondisi ekonomi dan prioritas konsumsi, turut memengaruhi keputusan pembelian kendaraan.

Tabel 3.2. Pertumbuhan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah

KPR	Growth (%,yoy)		Pangsa (%)		Kontribusi (%)		Delta
	I-26	II-26	I-26	II-26	I-26	II-26	Kontribusi
Rumah Tinggal s.d Tipe 21	-13,77%	-15,50%	2,39%	2,27%	-0,33%	-0,35%	0,0%
Rumah Tinggal Tipe 22 s.d 70	3,64%	4,19%	53,86%	54,35%	1,96%	2,28%	0,3%
Rumah Tinggal Tipe Diatas 70	1,74%	0,85%	34,75%	34,36%	0,60%	0,29%	-0,3%
Flat atau Apartment s.d Tipe 21	68,98%	53,46%	0,26%	0,26%	0,18%	0,14%	0,0%
Flat atau Apartment Tipe 22 s.d 70	11,66%	10,69%	1,50%	1,54%	0,18%	0,16%	0,0%
Flat atau Apartment Tipe Diatas 70	8,22%	4,06%	1,32%	1,34%	0,11%	0,05%	-0,1%
Rumah Toko atau Rumah Kantor	-1,03%	-2,48%	5,91%	5,88%	-0,06%	-0,15%	-0,1%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tabel 3.3. Pertumbuhan Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor

KKB	Growth (%,yoy)		Pangsa (%)		Kontribusi (%)		Delta
	I-26	II-26	I-26	II-26	I-26	II-26	Kontribusi
Mobil Roda Empat	-11,97%	-11,11%	80,39%	79,76%	-9,62%	-8,86%	0,8%
Sepeda Motor	27,12%	17,65%	16,81%	17,65%	4,56%	3,11%	-1,4%
Truk dan Kendaraan Bermotor Roda Enam	-47,35%	-50,90%	0,57%	0,45%	-0,27%	-0,23%	0,0%
Kendaraan Bermotor Lainya	-7,97%	-11,90%	2,23%	2,14%	-0,18%	-0,25%	-0,1%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Di sisi lain, kredit sepeda motor masih mencatat pertumbuhan positif, meskipun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Permintaan terhadap kendaraan roda dua yang lebih terjangkau tetap menjadi penopang, namun peningkatan tersebut belum mampu mengimbangi kontraksi pada pembiayaan mobil. Sementara itu, kredit truk dan kendaraan bermotor lainnya masih terkontraksi dengan pangsa yang relatif kecil terhadap total KKB.

Dari sisi kebijakan, berbagai insentif fiskal untuk kendaraan listrik, termasuk PPN Ditanggung Pemerintah serta dukungan kebijakan transisi energi, tetap berpotensi menjadi katalis jangka menengah bagi permintaan kendaraan ramah lingkungan. Namun demikian, pada triwulan II 2026 dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja KKB secara agregat masih relatif terbatas di tengah tekanan konsumsi rumah tangga.

3. Kredit Multiguna

Kinerja penyaluran kredit multiguna pada triwulan II 2026 turut termoderasi, namun masih menjadi penopang utama kredit rumah tangga di Sumatera Utara. Pada triwulan II 2026, kredit multiguna tumbuh sebesar 6,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan 9,24% (yoy) pada triwulan sebelumnya – (Grafik 3.19). Meskipun mengalami moderasi, pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan komponen konsumsi lainnya, sehingga segmen ini tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja kredit rumah tangga secara keseluruhan.

Kredit multiguna di Sumatera Utara umumnya disalurkan kepada individu dengan penghasilan tetap, seperti pegawai negeri sipil (PNS), calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pegawai tetap, tenaga honorer, kepala desa dan kepala lingkungan, serta pegawai di berbagai institusi termasuk dinas, lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), koperasi pegawai, dan perusahaan swasta. Skema pengembalian berbasis pemotongan gaji bulanan *(payroll)* menjadi faktor utama yang menjaga stabilitas kualitas kredit pada segmen ini.

Moderasi pertumbuhan pada triwulan II 2026 mencerminkan proses melandainya permintaan pembiayaan konsumtif serta kecenderungan rumah tangga untuk lebih selektif dalam menambah kewajiban kredit di tengah dinamika perekonomian. Namun demikian, dengan struktur debitur yang memiliki pendapatan relatif tetap dan terukur, kredit multiguna masih memiliki ruang pertumbuhan yang stabil ke depan, khususnya apabila perbaikan sentimen konsumen dan daya beli menunjukkan perbaikan seiring stabilisasi perekonomian daerah.

Kualitas kredit rumah tangga tetap terjaga, tecermin dari rasio NPL yang masih berada di bawah ambang batas 5%. Pada triwulan II 2026, NPL kredit rumah tangga tercatat 2,34%, sedikit meningkat dari 2,17% pada triwulan sebelumnya. Kenaikan juga terjadi di seluruh segmen: KKB 2,74% (dari 2,57%), KPR 3,33% (dari 3,28%), dan multiguna 1,69% (dari 1,47%). Seluruh rasio NPL tetap rendah, menandakan kualitas kredit rumah tangga di Sumatera Utara masih terjaga di tengah perlambatan pertumbuhan – (Grafik 3.20).

Grafik 3.20. NPL Kredit Rumah Tangga

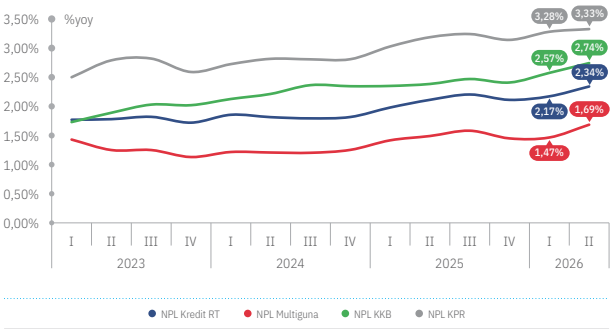

Sumber: Bank Indonesia, diolah

3.2. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Pada triwulan II 2026, kredit UMKM di Sumatera Utara mencatatkan kontraksi. Kredit UMKM skala mikro tetap menjadi penopang utama meskipun melambat dibandingkan periode sebelumnya. Kredit usaha mikro pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sekitar 1,42% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 2,56% (yoy). Sementara itu, kredit usaha kecil dan kredit usaha menengah masih menunjukkan kontraksi masing-masing sebesar -4,43% (yoy) dan -4,38% (yoy) – (Grafik 3.21).

Grafik 3.21. Perkembangan Kredit Berdasarkan Segmen UMKM

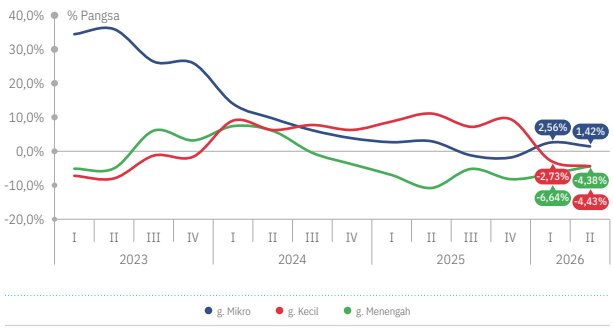

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Secara agregat, pertumbuhan kredit UMKM juga menunjukkan perbedaan dibandingkan dengan pertumbuhan total kredit perbankan di Sumatera Utara. Pada triwulan I, kredit total tumbuh sebesar 4,07% (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh negatif -0,81% (yoy). Memasuki triwulan II 2026, pertumbuhan kredit total mengalami peningkatan menjadi 7,69% (yoy), sementara kredit UMKM mengalami kontraksi semakin dalam sebesar -1,44% (yoy). Perbedaan laju pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa ekspansi kredit perbankan pada triwulan II 2026 lebih ditopang oleh segmen non UMKM – (Grafik 3.22).

Penyaluran kredit UMKM di Sumatera Utara masih terkonsentrasi pada segmen mikro, sejalan dengan struktur pelaku usaha daerah yang didominasi oleh skala usaha mikro dan kecil. Di sisi lain, pertumbuhan yang tertahan pada segmen kecil dan menengah mengindikasikan bahwa ekspansi pembiayaan dengan nominal lebih besar masih berlangsung secara selektif.

Beberapa tantangan dalam penyaluran kredit UMKM ditemukan, antara lain:

(1) Sebagian besar UMKM masih dalam fase pemulihan pascabencana. Hingga semester I 2026, restrukturisasi kredit perbankan akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara mencapai sekitar Rp1,4 triliun kepada 45.230 debitur UMKM;
(2) UMKM yang bergerak di sektor utama Sumatera Utara belum seluruhnya menunjukkan geliat ekspansi kredit. Pertanian memiliki pangsa 25,32% PDRB Sumatera Utara, tetapi hanya tumbuh sekitar 1,10% (yoy) pada triwulan II 2026;
(3) *Cash flow* pelaku pertanian melemah pada akhir triwulan II 2026. Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Utara pada Juni 2026 melemah menjadi 156,14 dari triwulan sebelumnya sebesar 157,16.

Ke depan, meskipun likuiditas perbankan masih memadai dan aktivitas ekonomi domestik relatif terjaga, akselerasi kredit UMKM masih perlu didorong. Dukungan berkelanjutan untuk memperluas akses pembiayaan, termasuk melalui penguatan kapasitas usaha, peningkatan literasi dan pencatatan keuangan, serta optimalisasi skema pembiayaan yang dapat meminimalisir risiko kredit UMKM masih tetap diperlukan.

Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit di Sumatera Utara pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 24,32%, sedikit menurun dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 25,88% – (Grafik 3.23). Penurunan pangsa ini sejalan dengan pertumbuhan kredit UMKM yang terkontraksi dibandingkan pertumbuhan kredit secara keseluruhan. Penurunan pangsa UMKM juga mencerminkan tantangan struktural dalam meningkatkan akses pembiayaan untuk pelaku usaha kecil, khususnya di tengah karakter UMKM yang mayoritas skala mikro dan kebutuhan modal yang relatif kecil.

Grafik 3.22. Pertumbuhan Kredit UMKM

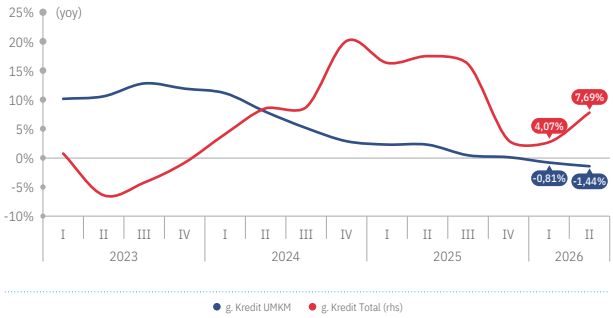

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.23. Rasio Kredit UMKM di Sumatera Utara

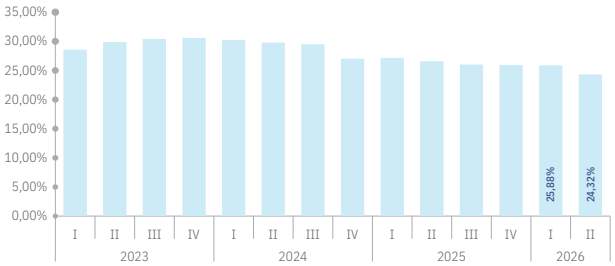

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.24. Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi

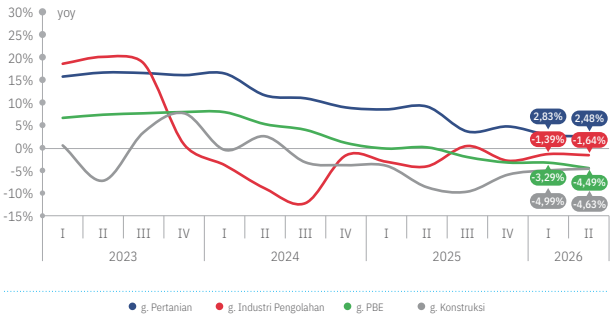

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Berdasarkan data komersial, hingga awal 2026, total kredit UMKM di Sumatera Utara mencapai sekitar Rp80–Rp81 triliun, dengan mayoritas disalurkan kepada usaha mikro dan kecil yang berkontribusi 81,8% dari total kredit UMKM. Selain itu, tantangan lain bagi UMKM di Sumatera Utara adalah tingkat akses pembiayaan yang masih terbatas secara struktural. Gubernur Sumatera Utara menyebutkan hanya sekitar 7,7% pelaku UMKM yang berhasil mengakses pembiayaan formal, sementara pemanfaatan teknologi dan koneksi digital UMKM juga masih rendah di tingkat regional.

Di sisi lain, upaya perluasan akses pembiayaan terus dilakukan melalui instrumen kebijakan dan skema penjaminan kredit. Sebagai contoh, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Utara telah direalisasikan mencapai lebih dari Rp8,44 triliun untuk 128.552 debitur, menunjukkan kolaborasi Pemerintah Daerah dan perbankan dalam memperluas inklusi finansial. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Perkembangan kredit UMKM di Sumatera Utara menurut sektor ekonomi pada triwulan II 2026 menunjukkan dinamika yang bervariasi. Kredit UMKM sektor Pertanian masih tumbuh positif sebesar 2,48% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,83% (yoy). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan UMKM sektor Pertanian masih terjaga, terutama untuk mendukung modal kerja, pengadaan sarana produksi, serta aktivitas budidaya dan pascapanen. Sebaliknya, sektor Industri Pengolahan mengalami kontraksi lebih dalam sebesar -1,64% (yoy). Kondisi ini mengindikasikan bahwa ekspansi pembiayaan UMKM di sektor Industri Pengolahan masih terbatas. Pelaku usaha cenderung menahan penambahan kredit di tengah tantangan biaya produksi, keterbatasan modal, serta permintaan yang belum sepenuhnya kuat. Dari sisi perbankan, kondisi tersebut juga dapat mencerminkan penyaluran kredit yang lebih selektif kepada UMKM sektor Industri Pengolahan, khususnya usaha dengan kapasitas produksi, arus kas, dan kemampuan agunan yang relatif terbatas.

Di sektor Konstruksi, kredit UMKM masih terkontraksi sebesar 4,63% (yoy), namun membaik dari triwulan sebelumnya -4,99% (yoy). Perbaikan tersebut mengindikasikan mulai meningkatnya kebutuhan pembiayaan UMKM yang bergerak dalam sektor Konstruksi, sejalan dengan kembali menguatnya aktivitas pembangunan di Sumatera Utara, termasuk pengerjaan proyek serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Meski demikian, pertumbuhan kredit yang masih negatif menunjukkan bahwa pemulihan pembiayaan UMKM sektor Konstruksi belum berlangsung secara penuh.

Sementara itu, kredit UMKM sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mengalami kontraksi sebesar -4,49% (yoy), lebih dalam dibandingkan -3,29% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pelemahan ini menunjukkan bahwa UMKM sektor Perdagangan masih menghadapi tantangan dari sisi permintaan dan perputaran usaha. Pelaku usaha cenderung menahan ekspansi dan tambahan pembiayaan di tengah penjualan yang belum meningkat secara optimal. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mengingat sektor Perdagangan memiliki peran penting dalam aktivitas UMKM dan penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara – (Grafik 3.24).

Secara keseluruhan, pergeseran dinamika sektoral menunjukkan bahwa meskipun beberapa sektor seperti Pertanian masih menunjukkan ketahanan, akses pembiayaan UMKM masih bersifat selektif dan dipengaruhi oleh kondisi permintaan serta risiko

operasional di tiap sektor. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian perbankan dalam mengatur eksposur kredit UMKM secara sektoral untuk menjaga kualitas intermediasi dan mengurangi risiko gagal bayar.

Sejalan dengan dinamika penyaluran kredit tersebut, kualitas kredit UMKM juga perlu menjadi perhatian, tecermin dari NPL UMKM per sektor dan skala usaha. Secara keseluruhan, NPL kredit UMKM pada triwulan II 2026 tercatat 3,93%, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 3,99%, menunjukkan perbaikan kualitas kredit secara umum. Berdasarkan skala usaha, NPL usaha mikro dan kecil masing-masing tercatat 3,20% dan 4,22%, menunjukkan kualitas kredit pada segmen ini relatif terjaga. Sementara itu, NPL usaha menengah cenderung stabil pada level 5,60% dan tetap menjadi segmen dengan risiko tertinggi di antara skala usaha lainnya.

Selanjutnya, jika dilihat menurut sektor, sebagian besar sektor menunjukkan perbaikan NPL antara lain sektor Industri Pengolahan (4,07%), Perdagangan Besar Eceran (4,23%), dan Konstruksi (13,78%). Meski demikian, sektor Konstruksi masih menjadi sektor dengan NPL tertinggi sehingga diperlukan kewaspadaan terhadap risiko gagal bayar. Di sisi lain, NPL sektor Pertanian tercatat sedikit meningkat dari 2,53% ke 2,64%, namun masih di bawah ambang batas NPL 5% – (Grafik 3.25).

Dengan demikian, meskipun sebagian besar sektor menunjukkan kualitas kredit yang terjaga dan mengalami perbaikan risiko, beberapa sektor seperti Konstruksi dan Pertanian masih memerlukan pengawasan lebih lanjut. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya manajemen risiko perbankan secara sektoral untuk menjaga kualitas intermediasi UMKM dan mendorong keberlanjutan pembiayaan.

Grafik 3.25. Perkembangan NPL Kredit UMKM

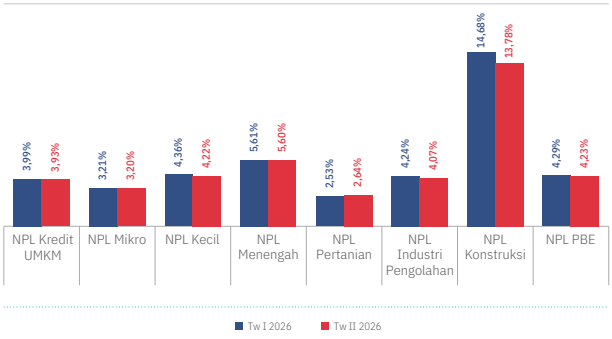

Sumber: Bank Indonesia, diolah

BOKS 4

Strategi Perluasan Akses Pasar UMKM Melalui Penyelenggaraan Karya Kreatif Sumatera Utara (KKSU) 2026

Dinamika dan Keterbatasan Pengembangan UMKM di Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM sebagai pilar utama perekonomian daerah. Saat ini, jumlah UMKM di Sumatera Utara mencapai 1.485.080 unit, di mana sekitar 99% masih berada dalam kategori usaha mikro. Meskipun secara legalitas sebanyak 77,8% unit usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) formal, penetrasi akses terhadap pembiayaan masih sangat terbatas pada kisaran 7% hingga 8%.

Kesenjangan ini dipengaruhi oleh sejumlah permasalahan (bottleneck) dari sisi permintaan (demand side). Pertama, rendahnya tingkat literasi keuangan menyebabkan mayoritas usaha mikro belum memiliki laporan keuangan sederhana maupun proyeksi usaha yang terstruktur. Pengelolaan keuangan usaha yang masih bercampur dengan keuangan pribadi menyulitkan perbankan dalam menganalisis arus kas. Kedua, keterbatasan agunan menjadi kendala utama karena banyak UMKM tidak memiliki aset bernilai ekonomis tinggi, status aset yang belum bersertifikat, atau nilai agunan yang tidak memenuhi rasio kredit minimum kelayakan bank.

Tantangan serupa turut terefleksi pada profil UMKM Binaan KPwBI Prov. Sumut. Berdasarkan data Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKEPANG) Triwulan II Tahun 2026, 100% dari 89 UMKM binaan memang telah melakukan onboarding digital di berbagai *platform* (media sosial dan *e-commerce*) dan 61,70% di antaranya telah menggunakan QRIS. Namun dari sisi bankability, 62,8% dari total 94 UMKM binaan terpantau belum memperoleh pembiayaan formal dari lembaga keuangan. Selain itu, dari sisi ekspansi pasar global, baru 15,96% UMKM yang berhasil menembus pasar ekspor, sementara sisanya masih terhambat oleh standar sertifikasi produk, kapasitas produksi, dan literasi ekspor.

Akselerasi Akses Pasar dan Pembiayaan Melalui KKSU 2026

Merespons berbagai keterbatasan akses pembiayaan dan pasar tersebut, KPwBI Prov. Sumut terus memperkuat sisi penawaran dan permintaan UMKM, salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan Karya Kreatif Sumatera Utara (KKSU) 2026. Digelar pada 15 hingga 26 Juli 2026 di Delipark Mall, Medan, KKSU merupakan wujud nyata sinergi strategis antara KPwBI Prov. Sumut dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mengusung tema "Dari Lokal ke Global: Mendorong UMKM yang Inovatif, Inklusif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Internasional", KKSU bertransformasi dari sekadar ajang pameran menjadi *platform* ekosistem pemberdayaan menyeluruh agar produk UMKM dapat terjual, terbiayai, dan terhubung dengan rantai pasok global.

Penyelenggaraan tahun 2026 mencatatkan eskalasi partisipasi yang masif dengan memfasilitasi lebih dari 552 UMKM unggulan se-Sumatera, meningkat tajam dibandingkan rata-rata 300-350 peserta pada periode 2023-2025. Dari sisi pencapaian ekonomi, total transaksi penjualan ritel selama pameran berhasil menembus angka lebih dari Rp1,4 miliar. Lebih strategis lagi, realisasi business matching perdagangan mencapai Rp83 miliar yang secara langsung menghubungkan UMKM lokal dengan *global buyer,* agregator, serta pelaku industri Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka).

Guna mengatasi *bottleneck* pembiayaan, ekosistem KKSU 2026 juga memfasilitasi business matching pembiayaan yang sukses mencetak komitmen penyaluran kredit baru sebesar Rp22 miliar dari perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Keberhasilan pencapaian ini turut didukung oleh strategi integratif KPwBI Prov. Sumut dari sisi *supply,* yakni mendorong perbankan untuk mengimplementasikan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan fleksibel, seperti transisi dari *collateral-based lending* menuju *cash flow-based lending.*

Penguatan Daya Saing dan Dampak Makroekonomi

Dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekspor produk unggulan daerah, KKSU 2026 menghadirkan etalase strategis berskala internasional. Di antaranya melalui program Sumatra Coffee Journey sebagai wadah promosi dan edukasi industri kopi, serta Medan *Fashion Trend* (berkolaborasi dengan *Indonesia Fashion Chamber*) yang mengangkat wastra Nusantara asal Sumatera Utara (seperti ulos, tenun, dan songket) ke panggung mode modern tanpa menghilangkan identitas sejarahnya.

Secara makroekonomi, penguatan kapasitas dan daya saing UMKM melalui penyelenggaraan KKSU sejalan dengan implementasi strategi utama Bank Indonesia, yakni mendorong penyaluran kredit ke sektor prioritas, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan perluasan digitalisasi. Pengembangan ekosistem UMKM yang komprehensif ini merupakan investasi jangka panjang yang krusial untuk membuka lapangan kerja baru, mempercepat laju roda ekonomi lokal, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang inklusif serta berkelanjutan.

Bazar UMKM di KKSU 2026

Bazar Wastra KKSU 2026 kolaborasi Medan Fashion Trend

Selebrasi Pembiayaan UMKM di KKSU 2026

Bussines Matching KKSU 2026

04.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

04.

Secara umum, transaksi sistem pembayaran non-tunai di triwulan II 2026 tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif. Secara agregat, pertumbuhan kartu ATM/Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik tercatat menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,59% (yoy) dari sisi nominal dan sebesar 6,86% (yoy) dari sisi volume. Selain APMK, inovasi pembayaran berbasis QRIS semakin diterima luas oleh masyarakat, ditunjukkan oleh pertumbuhan volume transaksi QRIS yang tumbuh sebesar 90,5% (yoy), sejalan dengan peningkatan nominal transaksi QRIS yang juga tumbuh sebesar 82% (yoy). Perluasan akseptasi QRIS juga ditunjukkan melalui jumlah pengguna QRIS yang tumbuh sebesar 11,5% (yoy) dan sejalan dengan jumlah merchant QRIS yang juga tumbuh sebesar 18,3% (yoy). Peningkatan ini menunjukkan bahwa akseptasi QRIS di Sumatera Utara terus meluas, baik dari sisi masyarakat sebagai pengguna maupun pelaku usaha sebagai penyedia kanal pembayaran digital.

Sementara itu, ekosistem pasar valuta asing domestik juga mencatat kinerja positif, yang tecermin dari pertumbuhan transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) sebesar 75% (yoy) dan transaksi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) sebesar 25% (yoy).

Seiring dengan semakin menguatnya digitalisasi sistem pembayaran di Sumatera Utara, kinerja penerimaan daerah juga menunjukkan tren yang positif. Kondisi tersebut tecermin dari realisasi PAD total Sumatera Utara yang meningkat di tahun 2026 sebesar Rp16 Triliun, dengan porsi transaksi melalui kanal non tunai mencapai 88,4% yang menunjukkan tingginya adopsi transaksi digital dalam pengelolaan penerimaan daerah. Untuk mengakselerasi digitalisasi penerimaan daerah, telah dikembangkann inovasi *split payment* pajak untuk Hotel, Restoran, dan Kafe (HOREKA) untuk meningkatkan transparansi dan optimalisasi PAD. Selain itu, implementasi split payment pajak didorong dengan adanya insentif pada merchant dan konsumen.

Pada triwulan II, Kabupaten Deli Serdang dipilih sebagai lokasi implementasi Inovasi Split Payment Pajak Daerah, karena memiliki realisasi PAD terbesar kedua di Sumatera Utara serta tingkat pemanfaatan kanal non tunai yang relatif tinggi, yakni sebesar 79% dari total PAD.

4.1. Sistem Pembayaran Menguat

Secara umum, transaksi sistem pembayaran non-tunai pada triwulan II 2026 tetap menunjukkan pertumbuhan yang moderat. Pada periode tersebut, secara agregat nominal kartu ATM/Debit, Kartu Debit, dan Uang Elektronik tumbuh sebesar 0,59% (yoy). Peningkatan nominal transaksi terutama didorong oleh pertumbuhan transaksi kartu kredit dan uang elektronik, yang mencerminkan semakin meningkatnya adopsi instrumen pembayaran digital oleh masyarakat. Di sisi lain, pertumbuhan transaksi kartu ATM/Debit menunjukkan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. (Grafik 4.1).

Sejalan dengan pertumbuhan nominal, volume transaksi sistem pembayaran non-tunai menunjukkan kinerja yang positif. Pada triwulan II-2026, secara agregat volume transaksi Kartu ATM/Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik mencapai 135,8 juta transaksi, atau mengalami pertumbuhan sebesar 6,86% (yoy) (Grafik 4.2). Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh meningkatnya penggunaan kartu kredit dan uang elektronik. Sementara itu, volume transaksi kartu ATM/Debit mengalami perlambatan, sejalan dengan menurunnya pertumbuhan nominal transaksi. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran preferensi masyarakat ke instrumen pembayaran digital yang lebih praktis.

Pada triwulan II 2026, penggunaan Kartu ATM/Debit menunjukkan perlambatan pertumbuhan. Pertumbuhan kartu ATM/Debit mencatat kontraksi dari sisi volume dan nominal masing-masing sebesar 7,7% (yoy) dan 1,18% (yoy). Penurunan tersebut terutama tecermin pada berkurangnya transaksi online menggunakan kartu ATM/Debit. Penurunan tersebut dapat disebabkan perubahan preferensi masyarakat untuk transaksi bernominal kecil melalui QRIS dan Transfer melalui BI-FAST. (Grafik 4.3).

Pertumbuhan transaksi kartu kredit di Sumatera Utara mengalami pertumbuhan dari sisi volume dan nominal. Nominal transaksi kartu kredit tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 6,17% (yoy). Hal ini sejalan dengan volume transaksi kartu kredit yang tumbuh sebesar 13% (yoy). (Grafik 4.4). Pertumbuhan kartu kredit tetap menunjukkan tren positif meskipun terjadi penurunan pada penggunaan kartu kredit untuk transaksi online, seiring dengan meningkatnya preferensi masyarakat untuk melakukan transaksi *online* melalui kartu QRIS atau transfer melalui BI-FAST.

Grafik 4.1. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM Debit, Kartu Kredit, dan UE

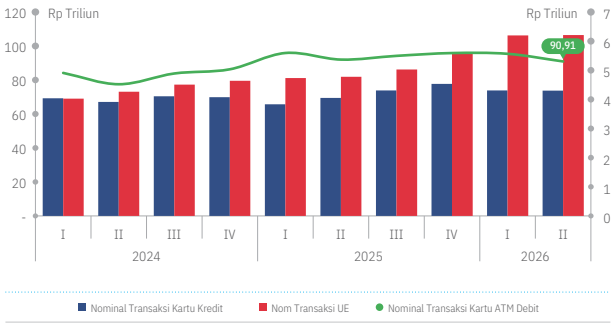

Sumber: BI, diolah

Grafik 4.2. Perkembangan Volume Transaksi Kartu ATM/Debit, Kartu Kredit, dan UE

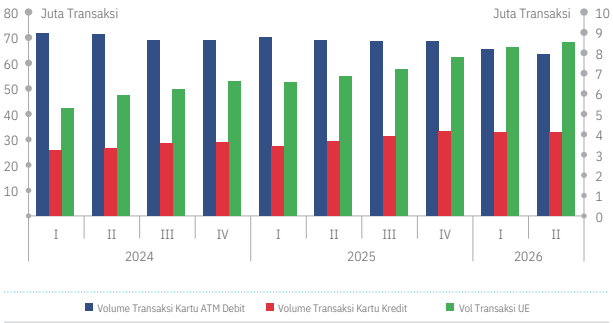

Sumber: BI, diolah

Grafik 4.3. Alokasi Penggunaan Kartu ATM/Debit

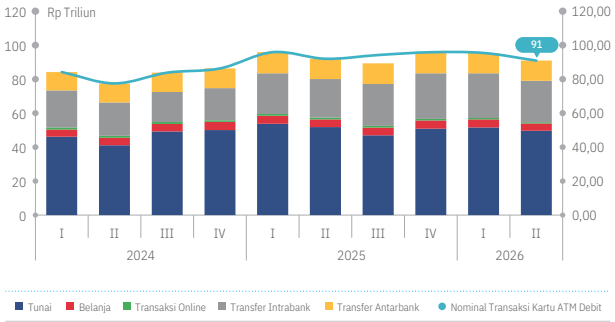

Sumber: BI, diolah

Grafik 4.4. Alokasi Penggunaan Kartu Kredit

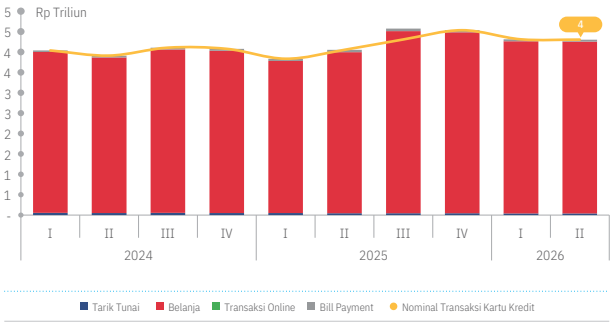

Sumber: BI, diolah

Penggunaan Uang Elektronik terus menunjukkan pertumbuhan positif, tecermin dari peningkatan nominal transaksi sebesar 29,9% (yoy), sejalan dengan pertumbuhan volume transaksi yang mencapai 24,7% (yoy). Pertumbuhan nominal ini terutama berasal dari penggunaan kartu berbasis chip, dengan kontribusi terbesar berasal dari transaksi belanja, transfer, dan initial load. Tren pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan preferensi dalam menggunakan Uang Elektronik sebagai alat pembayaran (Grafik 4.5).

Pada triwulan II 2026 transaksi *e-commerce* meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kemudahan dalam penggunaan instrumen pembayaran nontunai mendorong pertumbuhan baik dari sisi volume maupun nominal transaksi. Berdasarkan metode pembayaran yang digunakan, preferensi masyarakat Sumatera didominasi oleh pembayaran tunai di tempat (*Cash on Delivery*/COD) sebesar 40,67%, diikuti oleh Kios/Minimarket 17,46%, Kredit tanpa kartu 14,81%, Transfer Bank 12,79%, Metode lainnya 10,57%, dan Kartu Kredit/ Debit *online* 3,52%. (Grafik 4.6).

Dari sisi pertumbuhan masing-masing metode pembayaran *e-commerce,* COD/tunai, *e-money,* pembayaran melalui kios/minimarket, dan Kredit Tanpa Kartu mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat pada transaksi COD/tunai sebesar 40,7% (yoy). Kondisi ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan instrumen non-tunai dalam bertransaksi *e-commerce,* meskipun transaksi tunai masih mendominasi pertumbuhannya.

Sejalan dengan peningkatan penggunaan metode pembayaran non-tunai lainnya, kinerja transaksi RTGS pada triwulan II 2026 menunjukkan pertumbuhan yang tetap solid. Pada periode tersebut, volume transaksi RTGS mengalami pertumbuhan dari sisi volume yaitu sebesar 5,82% (yoy), sejalan dengan hal tersebut, dari sisi nominal mencapai Rp 256T atau meningkat sebesar 9,58% (yoy) (Grafik 4.8). Pertumbuhan pada kedua indikator tersebut mencerminkan masih terjaganya aktivitas transaksi bernilai besar di perekonomian serta tingginya pemanfaatan layanan RTGS sebagai sarana penyelesaian transaksi dana secara *real time.*

Penggunaan infrastruktur Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) menunjukkan pertumbuhan yang moderat. Pada triwulan II 2026, volume transaksi SKNBI mengalami penurunan sebesar 2,66% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 15,9% (yoy). Namun, di sisi lain, nominal transaksi menunjukkan pertumbuhan yang moderat yaitu sebesar 3,10% (yoy) (Grafik 4.9).

Grafik 4.5. Alokasi Penggunaan Uang Elektronik

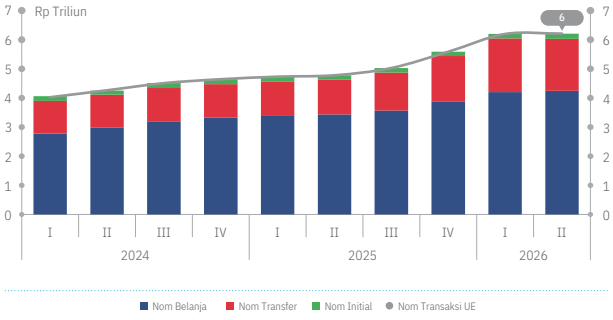

Sumber: BI, diolah

Grafik 4.6. Pangsa Instrumen Pembayaran *e-commerce*

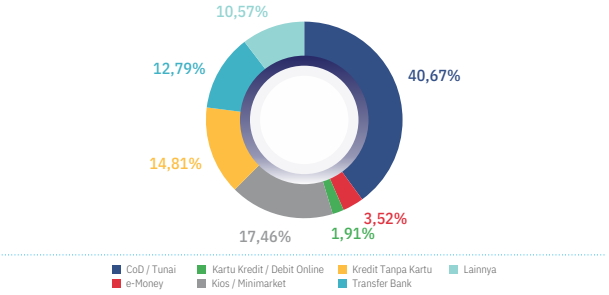

Grafik 4.7. Perkembangan Transaksi *E-Commerce*

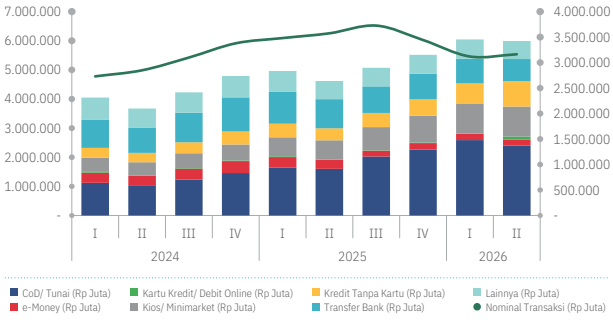

Sumber: BI, diolah

Grafik 4.8. Perkembangan RTGS

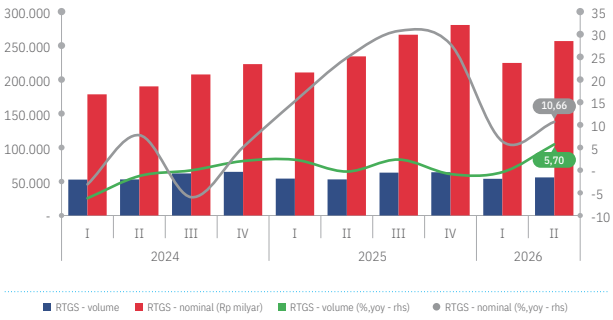

Sumber: BI, diolah

Penurunan ini sejalan dengan peningkatan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran non-tunai yang lebih cepat dan efisien, seperti BI-FAST, QRIS, uang elektronik, dan kanal digital lainnya.

Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Sembako tetap menjadi salah satu instrumen dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Pada triwulan II 2026, penyaluran Program Sembako menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mendukung daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Realisasi penyaluran Bansos Sembako tercatat sebesar Rp472,51 miliar, sementara nilai yang berhasil diserap mencapai Rp453,77 miliar (Grafik 5.10). Dengan demikian, tingkat penyerapan Program Sembako pada periode tersebut mencapai sekitar 96,03% dari total penyaluran. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan pada triwulan II tahun 2026 berjalan cukup optimal, sehingga dapat turut menjaga konsumsi rumah tangga penerima manfaat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar masyarakat. Di Sumatera Utara, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu secara tunai melalui PT Pos Indonesia dan secara nontunai melalui bank-bank anggota Himbara serta Bank Syariah Indonesia (BSI).

Grafik 4.9. Perkembangan SKNBI

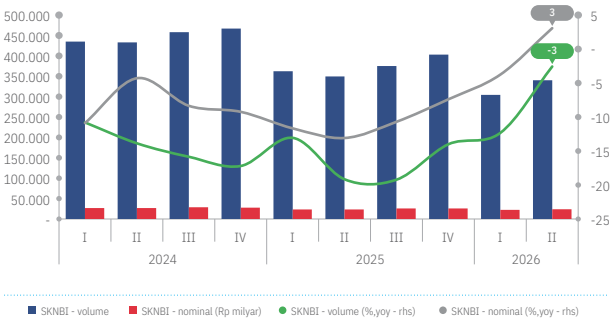

Sumber: BI, diolah

Grafik 4.10. Perkembangan Bantuan Sosial - Sembako

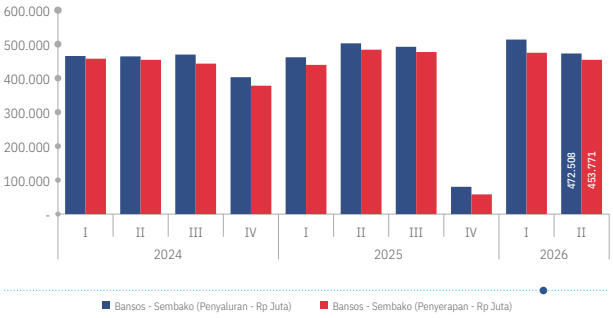

Sumber: Kementerian Sosial, diolah

Grafik 4.11. Perkembangan PKH

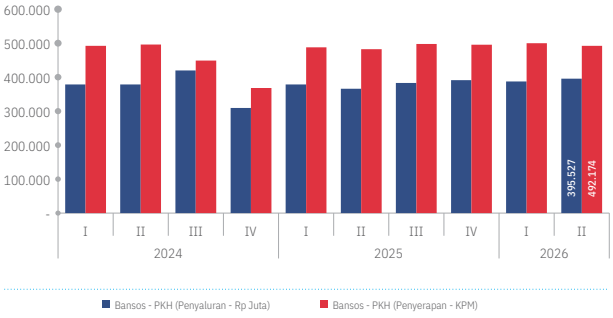

Sumber: Kementerian Sosial, diolah

Sementara itu Program Keluarga Harapan penyaluran tetap berjalan lancar. Realisasi penyaluran PKH tercatat sebesar Rp395,53 miliar, sementara dari sisi jumlah penerima manfaat, penyerapan tercatat sebanyak 492,18 ribu KPM atau dengan tingkat penyerapan 98% (Grafik 5.11). Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyaluran PKH masih berlangsung secara efektif dan menjangkau masyarakat penerima manfaat secara luas.

4.2. Upaya Perluasan Elektronifikasi Sistem Pembayaran Terus Dilaksanakan

Perkembangan transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di wilayah Sumatera Utara terus menunjukkan tren yang positif dan peningkatan yang signifikan. Pemanfaatan QRIS secara nasional juga mencatat kinerja positif. Capaian ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia dalam mendorong inovasi sistem pembayaran yang Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal. Pertumbuhan tersebut mencerminkan mulai terbentuknya budaya masyarakat dalam menggunakan QRIS sebagai instrumen pembayaran, khususnya untuk transaksi non-tunai. Pada triwulan II 2026, Volume transaksi QRIS tercatat mencapai 144,31 juta transaksi atau tumbuh 90,5% (yoy). Sejalan dengan peningkatan tersebut, nominal transaksi QRIS juga tercatat sebesar Rp15,04 triliun atau tumbuh 82% (yoy).

Jumlah pengguna QRIS dan *merchant* QRIS di Sumatera Utara terus mencatatkan peningkatan pertengahan tahun 2026. Pada triwulan II 2026, jumlah pengguna QRIS tercatat mencapai 3,09 juta pengguna atau tumbuh sebesar 11,5% (yoy). Sejalan dengan itu, jumlah merchant QRIS juga meningkat hingga mencapai 1,77 juta merchant atau tumbuh sebesar 18,3% (yoy). Peningkatan ini menunjukkan bahwa akseptasi QRIS di Sumatera Utara terus meluas, baik dari sisi masyarakat sebagai pengguna maupun pelaku usaha sebagai penyedia kanal pembayaran digital. Bank Indonesia senantiasa bersinergi

Grafik 4.12. Perkembangan QRIS

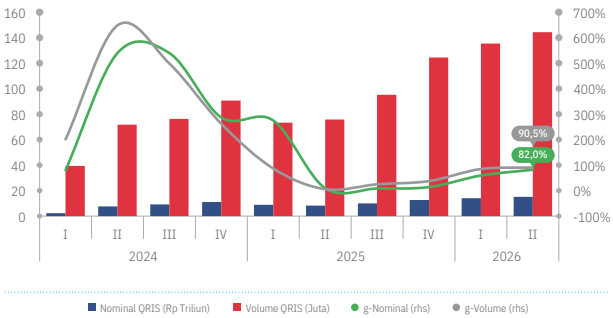

Sumber: BI, diolah

Grafik 4.13. Perkembangan QRIS

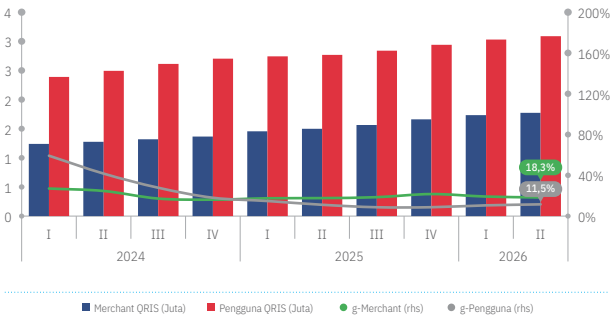

Sumber: BI, diolah

dengan akademisi, perbankan, pemerintah daerah, dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk memperluas implementasi QRIS sebagai alternatif transaksi pembayaran digital yang mudah, cepat, dan inklusif.

Pada pertengahan tahun 2026, kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai keuangan digital, Cinta Bangga Paham Rupiah (CBP), serta Pelindungan Konsumen terus diperkuat melalui pendekatan yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan literasi keuangan digital sekaligus memastikan masyarakat dapat bertransaksi secara aman, nyaman, dan terlindungi. Komitmen Bank Indonesia dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital diwujudkan melalui berbagai kegiatan, antara lain Sosialisasi Edukasi Keuangan Digital, CBP, dan PeKA di tingkat lingkungan *Car Free Day* (CFD) dalam rangka HUT Sumut ke 78, Edukasi PeKA bersama OJK di 33 Kabupaten Kota dan Pemko Medan serta di lingkungan TNI AU, Edukasi QRIS Cross Border dalam acara GEMES (Gelar Melayu Serumpun): Event Internasional dengan mendatangkan turis Malaysia, Thailand, dan Singapore, serta Edukasi dan User Experience Keuangan Digital dan PeKA pada Event Trail of The King (ToTK). Kolaborasi juga dilakukan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan edukasi dan *User Experience* terkait keuangan digital, CBP, dan PeKA dalam acara Acara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Provinsi Sumut, serta kolaborasi edukasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Medan dalam kegiatan KUA *On The Street*. Selain itu, akselerasi digitalisasi juga diperkuat melalui piloting project QRESTO *(Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization),* yaitu inovasi pemanfaatan QRIS untuk pembayaran pajak restoran secara otomatis, praktis, dan transparan di Kota Medan. Berbagai program tersebut diharapkan dapat semakin memperluas akseptasi pembayaran digital, memperkuat perlindungan konsumen, serta mendukung ekosistem transaksi nontunai yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Sumatera Utara.

Dalam rangka mendorong percepatan transformasi digital serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perluasan program elektronifikasi di Sumatera Utara terus dioptimalkan. Upaya tersebut dilakukan pada berbagai sektor strategis, antara lain transportasi, pariwisata, serta transaksi keuangan pemerintah daerah. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sendiri merupakan langkah terintegrasi untuk mendorong peralihan transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari metode tunai menjadi nontunai. Melalui implementasi ETPD, transaksi keuangan di lingkungan pemerintah daerah diharapkan dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperluas inklusi keuangan melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi sistem pembayaran.

Perkembangan digitalisasi daerah tecermin melalui capaian Indeks ETPD yang dievaluasi secara berkala setiap semester. Indeks ini digunakan sebagai alat ukur untuk memantau progres elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, sekaligus melihat perbandingan tingkat implementasi ETPD antarwilayah. Di Sumatera Utara, peningkatan Indeks ETPD didorong oleh semakin luasnya jenis transaksi pemerintah daerah yang telah terdigitalisasi, serta meningkatnya penggunaan kanal pembayaran nontunai dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebagai bagian dari strategi penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

pengelolaan keuangan daerah serta strategi akselerasi digitalisasi sistem pembayaran sekaligus optimalisasi penerimaan pajak daerah, Sumatera Utara melalui sinergi Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, dan Bank Sumut menghadirkan inovasi QRIS Duo segmen QRESTO. QRESTO merupakan pengembangan penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak restoran secara otomatis, praktis, dan transparan melalui fitur pemisahan dana atau splitting antara hasil penjualan merchant dan pajak restoran secara langsung. Melalui sistem ini, pembayaran masyarakat menggunakan QRIS akan secara otomatis terbagi, sehingga dana hasil penjualan masuk ke rekening *merchant* dan pajak restoran masuk ke rekening Pemerintah Daerah pada hari yang sama. Inovasi ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi salah hitung, keterlambatan pembayaran, maupun kurang bayar pajak, serta mendorong tata kelola usaha restoran yang lebih cepat, akurat, nyaman, dan akuntabel.

4.3. Aliran Uang Kartal Mengalami *Net Inflow*

Pada pertengahan tahun 2026 arus kas di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara menunjukkan arah yang sama dengan triwulan sebelumnya, tecermin dari peningkatan *inflow* dan penurunan *outflow* yang mendorong *netflow* tetap berada pada posisi *net inflow.* Pada triwulan II 2026, arus kas di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara menunjukkan posisi *net inflow.* Kondisi ini mencerminkan bahwa aliran kas masuk ke Bank Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan aliran kas keluar ke masyarakat/perbankan. Total *net inflow* tercatat sebesar Rp6,95 triliun, yang merupakan hasil *net-off* dari inflow sebesar Rp8,38 triliun dan *outflow* sebesar Rp1,43 triliun. Peningkatan *inflow pada pertengahan tahun 2026 mengindikasikan a*danya peningkatan penyetoran uang kartal ke Bank Indonesia, sejalan dengan normalisasi kebutuhan uang tunai masyarakat pasca periode akhir tahun. (Grafik 5.14).

Grafik 4.14. Perkembangan *Inflow - Outflow*

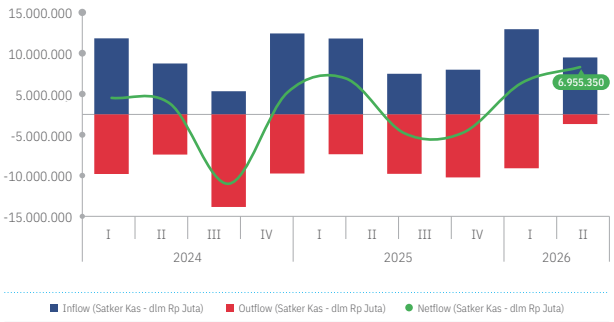

Sumber: BI, diolah

4.4. Aliran Transfer Dana Lintas Negara mengalami peningkatan

Pasar valuta asing domestik terus mengalami peningkatan secara signifikan. Dari sisi nominal, pasar industri KUPVA-BB terus mengalami peningkatan yang signifikan sejak triwulan I 2024 s.d. triwulan I 2026. Pada triwulan ini terdapat 38 KUPVA-BB berizin yang beroperasi di bawah pengawasan KPwBI Provinsi Sumatera Utara. Nilai transaksi secara KUPVA BB agregat sebesar Rp 1,66 triliun. Nilai ini lebih tinggi Rp 714 miliar dibanding triwulan II 2025 atau meningkat sebesar 6,7% (yoy). Triwulan ini juga mencatatkan adanya pertumbuhan sebesar 75% (yoy). Angka nominal ini secara signifikan terus tumbuh dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang berada di angka 37% (yoy).

Meskipun terdapat penurunan jumlah KUPVA BB berizin dibandingkan triwulan sebelumnya, nominal transaksi justru meningkat signifikan. Adapun KUPVA BB yang sudah tidak beroperasi dengan optimal di tengah pertumbuhan nominal transaksi yang cukup tinggi dari KUPVA BB yang baru berizin. Dengan demikian, potensi KUPVA BB di Sumatera Utara sangat tergantung dari karakteristik manajemennya itu sendiri dan bukan dari kejenuhan pasar atau masyarakat dalam preferensi penggunaan Uang Kertas Asing (UKA) dalam melaksanakan transaksi dengan pihak asing. Dengan demikian, masih terdapat potensi yang tinggi akan adanya peningkatan jumlah Penyelenggara KUPVA BB di Sumatera Utara.

Transaksi jual-beli UKA terbesar melalui KUPVA BB di wilayah kerja KPw BI Provinsi Sumatera Utara merupakan mata uang Ringgit Malaysia. Pangsa transaksi Ringgit tercatat mencapai 38,8% dari total seluruh mata uang yang ditransaksikan oleh KUPVA BB di bawah pengawasan KPw BI Provinsi Sumatera Utara (Grafik 4.15). Pangsa ini lebih besar dibandingkan periode sebelumnya di angka 35,2%. Pangsa terbesar berikutnya kemudian diikuti oleh Dolar Singapura, Yuan Tiongkok,

Grafik 4.15. Perkembangan Transaksi KUPVA BB

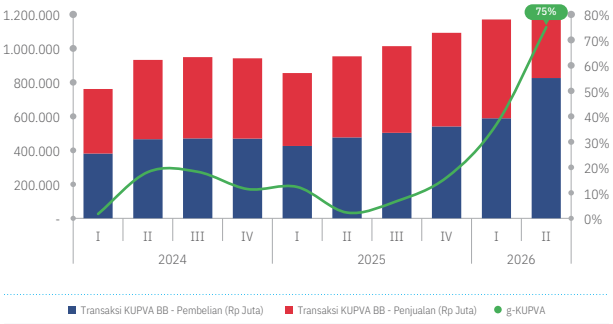

Sumber: BI, diolah

Dolar Amerika Serikat, dan Dolar Australia. Kebutuhan berobat, pendidikan, bekerja, dan pariwisata ke Malaysia masih menjadi alasan utama transaksi Ringgit yang tinggi di Sumatera Utara. Hal ini didukung oleh kondisi geografis wilayah Sumatera Utara yang berdekatan dengan Malaysia maupun Singapura.

Peningkatan transaksi nominal transaksi KUPVA BB yang tetap tinggi di tengah tren digitalisasi, menunjukkan hubungan komplementer dan bukan saling menggantikan antara transaksi UKA (fisik) dengan transaksi digital.

Pertumbuhan triwulan II 2026 Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) menunjukkan pertumbuhan yang melandai. PJP LR adalah pihak yang menyediakan layanan transfer dana dengan melakukan proses pemindahbukuan dari pengirim kepada penerima akhir. Layanan ini mencakup transaksi pengiriman dana ke luar negeri *(outgoing),* penerimaan dana dari luar negeri *(incoming),* serta transaksi antarpihak di dalam negeri *(domestik).* Dalam hal menjalankan kegiatan pemindahbukuan seperti disebutkan di atas, badan usaha wajib memiliki izin dari Bank Indonesia yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi industri sistem pembayaran demi memastikan ekosistem yang tetap stabil dan dipercaya masyarakat.

Dari sisi nominal, total transaksi *outgoing* dan *incoming* yang dilakukan oleh PJP LR masing-masing tercatat sebesar Rp1,61 triliun dan Rp1,82 triliun. Total kedua transaksi ini mencatat pertumbuhan sebesar 25% (yoy) atau setara Rp694 miliar (Grafik 5.17). Meskipun tren pertumbuhan transaksi PJP LR meskipun sempat melandai di triwulan I 2026, transaksi PJP LR mulai kembali meningkat signifikan pada triwulan II 2026. Di tengah digitalisasi yang tinggi, para Penyelenggara PJP LR perlu terus melakukan inovasi untuk memangkas *cost* agar bisa tetap bersaing dengan dengan berbagai opsi digitalisasi pelayanan sistem pembayaran di Indonesia. Sebagian besar tujuan transfer dilaksanakan untuk keperluan wisata ke luar negeri, pendidikan, dan untuk keperluan berobat.

Grafik 4.16. Perkembangan Transaksi KUPVA BB

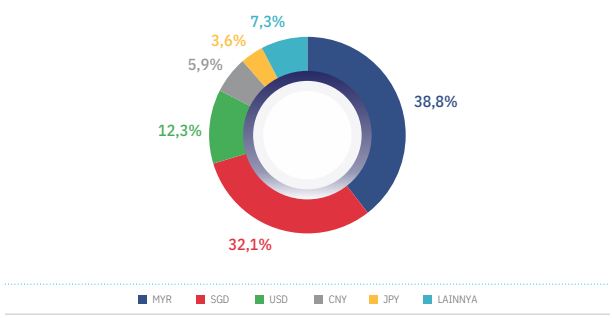

Sumber: BI, diolah

Grafik 4.17. Perkembangan Transaksi PJP-LR

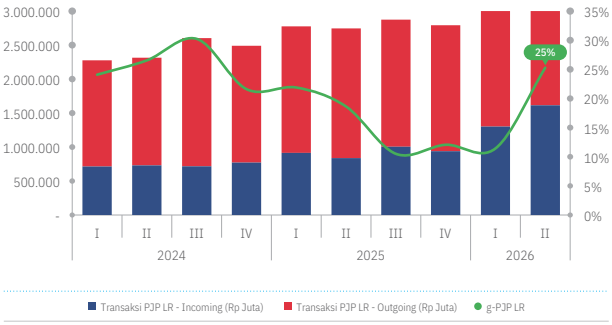

Sumber: BI, diolah

BOKS 5

Implementasi Inovasi Split Payment System Pada Pajak Daerah dengan Skema Insentif Pengurangan Pajak Untuk Peningkatan PAD di Kabupaten Deli Serdang

Sejalan dengan semakin menguatnya digitalisasi sistem pembayaran di Sumatera Utara, kinerja penerimaan daerah terus menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara agregat meningkat, didukung oleh tingginya pemanfaatan kanal pembayaran non tunai yang telah mencapai 88,4 persen dari total transaksi penerimaan daerah. Capaian tersebut mencerminkan semakin luasnya adopsi transaksi digital oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, sekaligus memperkuat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mempercepat transformasi digital pada sisi penerimaan daerah sekaligus mengoptimalkan potensi PAD, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Bank Sumut menghadirkan inovasi QRESTO (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization). Inovasi pembayaran digital berbasis QRIS ini menerapkan mekanisme split payment yang secara otomatis memisahkan hasil penjualan merchant dan pajak restoran pada setiap transaksi. Melalui sistem tersebut, bagian pajak langsung disalurkan ke rekening pemerintah daerah pada hari yang sama, sehingga meningkatkan transparansi, akurasi, dan kepatuhan pembayaran pajak. Ke depan, implementasi split payment pada sektor Hotel, Restoran, dan Kafe (HOREKA), yang turut didukung pemberian insentif bagi merchant dan konsumen, diharapkan dapat memperkuat digitalisasi keuangan daerah serta mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan.

Peluncuran Qresto di Kabupaten Deli Serdang

Melalui kolaborasi Bank Indonesia, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan Bank Sumut sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD), Kabupaten Deli Serdang resmi menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang mengimplementasikan inovasi *splitting payment system* untuk Pajak Daerah. Inovasi ini tidak hanya menghadirkan kemudahan pembayaran digital, tetapi juga menjadi terobosan kebijakan yang mengintegrasikan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui mekanisme *split payment* secara otomatis. Selain itu, implementasi QResto turut didukung dengan pemberian insentif fiskal bagi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah, serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Deli Serdang mengumumkan kebijakan penurunan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman dari 8% menjadi 5% bagi transaksi yang menggunakan QResto. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat karena konsumen langsung memperoleh pengurangan pajak sehingga harga yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah. Manfaat insentif bagi konsumen dapat langsung dirasakan pada saat transaksi berlangsung, sehingga diharapkan mampu mendorong masyarakat beralih ke pembayaran digital dan pajak yang dibayarkan konsumen langsung terkirim ke rekening Pemda secara real time. Kombinasi QResto dan insentif fiskal juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha HOREKA sekaligus meningkatan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak secara sukarela.

Melalui implementasi QResto, pembayaran menggunakan QRIS terhubung langsung dengan sistem perpajakan daerah sehingga pajak dapat dihitung dan disetorkan secara otomatis. Inovasi ini menjadi bentuk perluasan penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak daerah yang mendukung transaksi lebih mudah, transparan, dan akuntabel, sekaligus dirangkum dalam satu konsep sederhana: Scan, Bayar, Pajak Beres.

Gambar 1. *Launching* Inovasi *Splitting Payment System* di Kabupaten Deli Serdang

Bagi pelaku usaha, QResto juga menghadirkan manfaat yang C.U.A.N., yaitu Cepat karena pembayaran dan pencatatan pajak berlangsung otomatis, Utuh karena penerimaan merchant langsung diterima secara jelas dan terdokumentasi, Aman karena transaksi tercatat secara digital dan transparan, serta Nyaman karena cukup satu kali scan, pembayaran dan pajak langsung selesai.

Keterbaruan Inovasi *Splitting Payment System* Kabupaten Deli Serdang

Sebagai bentuk inovasi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan insentif fiskal berupa penurunan tarif PBJT sektor makanan dan minuman dari 8% menjadi 5% bagi transaksi yang menggunakan QResto. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak daerah sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui harga yang lebih terjangkau.

Sebagai dasar implementasi, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan dua Peraturan Bupati, yaitu:

- Perbup No. 30 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman melalui kanal non-tunai dengan mekanisme split payment.
- Perbup No. 29 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan atas Pembayaran PBJT Makanan dan/atau Minuman melalui sistem pembayaran QResto.

Dampak dan Tindak Lanjut

Implementasi QResto di Kabupaten Deli Serdang merupakan langkah strategis dalam memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui perluasan penggunaan QRIS pada pembayaran pajak daerah. Inovasi ini mendukung transformasi digital pengelolaan keuangan daerah dengan menghadirkan sistem pembayaran yang lebih

efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui mekanisme split payment, pajak daerah dapat dipungut dan disetorkan secara otomatis bersamaan dengan transaksi pembayaran, sehingga mengurangi potensi kebocoran penerimaan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Untuk mendorong adopsi yang lebih luas, implementasi QResto didukung oleh kebijakan insentif fiskal yang ditujukan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Pemberian insentif tersebut diharapkan dapat meningkatkan penggunaan QResto sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung oleh konsumen dan merchant. Di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi instrumen untuk mempercepat onboarding pelaku usaha sektor Hotel, Restoran, dan Kafe (HOREKA) ke dalam ekosistem pembayaran digital, sehingga memperluas cakupan transaksi non tunai di daerah.

Ke depan, keberhasilan implementasi QResto di Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat menjadi best practice bagi daerah lain dalam mengoptimalkan penerimaan daerah melalui digitalisasi sistem pembayaran. Pengalaman tersebut dapat menjadi model yang direplikasi oleh kabupaten/kota lain di Sumatera Utara untuk memperkuat tata kelola penerimaan daerah, meningkatkan transparansi dan efektivitas pemungutan pajak, serta mendukung upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

05.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

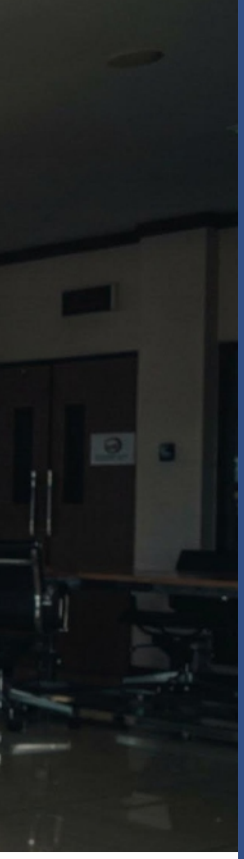

05.

Kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Utara pada Mei 2026 berada pada level yang lebih rendah dibandingkan Februari 2026. Hal ini ditandai dengan menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sejalan dengan meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT mengalami peningkatan bersamaan dengan kesenjangan urban dan rural. Masih terdapat ketimpangan antara upah riil dan upah nominal yang cenderung melebar pasca COVID 19.

Kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara secara umum tetap terjaga, tecermin dari penurunan kemiskinan yang disertai peningkatan NTP serta penurunan Rasio Gini yang menunjukkan distribusi hasil pembangunan semakin merata. Pada periode terbaru, Maret 2026, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 1,11 juta jiwa atau 7,10% dari total populasi atau menurun dibanding dibandingkan September 2025 yang sebesar 7,24% atau sekitar 1,13 juta jiwa. Penurunan tingkat kemiskinan terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan. Lebih lanjut, kesejahteraan petani mengalami peningkatan tecermin dari Nilai Tukar Petani yang meningkat pada triwulan II 2026 dibandingkan triwulan I 2026. Ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara tetap berada dalam kondisi yang relatif terjaga, tecermin dari nilai Rasio Gini yang masih lebih rendah dibandingkan Nasional. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut memperkuat kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

5.1. Ketenagakerjaan

Tabel 5.1. Klasifikasi Penduduk Bekerja (Pekerja Penuh/Tidak Penuh)

Status Ketenagakerjaan	Feb-2026 (ribu orang)	Mei-2026 (ribu orang)
Penduduk Usia Kerja	11.741	11.785
Angkatan Kerja	8.135	8.162
- Bekerja	7.727	7.752
- Pengangguran	408	411
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,28%	69,26%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,01%	5,03%

Sumber: BPS, diolah

Pada periode Mei 2026, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara berada pada level yang lebih rendah dibandingkan Februari 2026. Hal ini tercermin dari meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi sebesar 5,03% pada Mei 2026 serta menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi sebesar sebesar 69,26% (Tabel 5.1).

Adapun jumlah penduduk usia kerja pada periode Mei 2026 tercatat sebesar 11,78 juta jiwa meningkat dibandingkan Februari 2025 yang tercatat sebesar 11,74 juta jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat sebagian penduduk usia kerja yang belum sepenuhnya berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Faktor lainnya yang memberikan tekanan terhadap pasar kerja antara lain dipengaruhi oleh terganggunya aktivitas produksi di sektor pertanian, konstruksi, dan industri pengolahan akibat bencana banjir pada akhir tahun 2025, serta dampak lanjutan dari dinamika perekonomian global terhadap kinerja ekonomi daerah.

Selanjutnya, peningkatan TPT di Provinsi Sumatera Utara pada Mei 2026 utamanya tercermin dari kondisi pasar kerja di perdesaan. Di wilayah perdesaan, TPT tercatat sebesar 3,86% yang relatif meningkat dibandingkan Februari 2026 sebesar 3,04%. Di sisi lain, kondisi pasar kerja di wilayah perkotaan relatif terjaga yang tercermin dari TPT yang menurun dari 6,29% pada Februari 2026 menjadi sebesar 5,77% pada Mei 2026 (Grafik 5.1).

Ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, peningkatan pengangguran di Provinsi Sumatera Utara pada Mei 2026 terutama terjadi pada kelompok lulusan pendidikan SD, SMP dan SMK. Pada Mei 2026, tercatat TPT lulusan SD meningkat dari 2,04% menjadi 2,50%; TPT lulusan SMP meningkat dari 3,26% menjadi 4,18%; dan TPT lulusan SMK meningkat dari 6,51% menjadi 6,76% (Grafik 5.2).

Perkembangan ini mengindikasikan bahwa kelompok penduduk berpendidikan rendah masih menghadapi tantangan yang relatif lebih besar dalam memasuki pasar kerja dan mencerminkan adanya *mismatch* antara kualifikasi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha.

Di sisi lain, tingkat pengangguran pada lulusan diploma ke atas relatif menurun pada periode Mei 2026. TPT lulusan diploma tercatat menurun dari sebelumnya 9,14% menjadi 7,86% dan TPT lulusan universitas juga tercatat menurun dari sebelumnya 6,48% menjadi 5,90%. Hal ini mencerminkan bahwa permintaan tenaga kerja dengan kualifikasi dan kompetensi yang lebih tinggi relatif tetap terjaga di tengah dinamika permintaan pasar. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat daya saing tenaga kerja dan memperluas akses terhadap kesempatan kerja.

Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mendorong akselerasi penyerapan tenga kerja, Pemerintah Sumatera Utara melakukan beberapa upaya meliputi:

1. Memperkuat pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja dengan mengadakan Pelatihan Peningkatan Produktivitas kepada tenaga kerja UMKM.

Grafik 5.1. Tingkat Pengangguran Menurut Daerah Tempat Tinggal

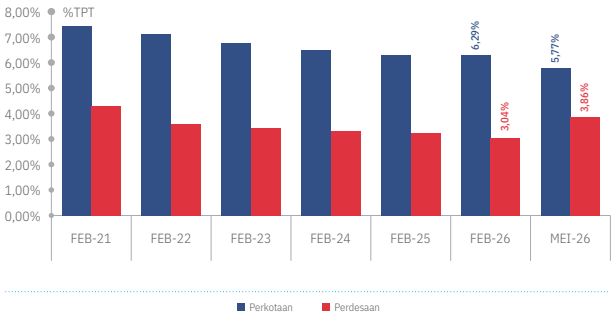

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.2. TPT Menurut Jenjang Pendidikan

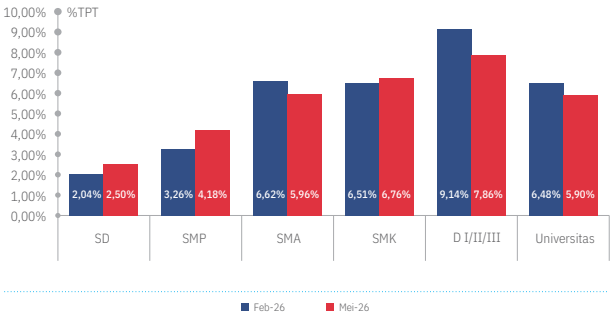

Sumber: BPS, diolah

2. Mendorong pelaksanaan program magang melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk meningkatkan kompetensi, disiplin, dan daya saing tenaga kerja Sumatera Utara sekaligus mempersiapkan tenaga kerja agar dapat masuk dalam pasar kerja di dalam negeri maupun global.
3. Memperluas akses informasi dan fasilitasi informasi penerimaan tenaga kerja melalui Portal SIGAP KERJA (Sistem Terintegrasi dan Akses Peluang Kerja) yang menyediakan layanan lowongan pekerjaan, magang, pelatihan, serta *dashboard* bagi perusahaan, pencari kerja, dan LPK.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga meningkatkan peluang kesempatan kerja melalui implementasi program prioritas Pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang turut mendukung peningkatan penyerapan tenaga kerja. Implementasi program MBG berpotensi mendorong penyerapan tenaga kerja secara langsung pada operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), antara lain tenaga pengelola, juru masak, pemorsian, distribusi, kebersihan, dan administrasi. Di sisi lain, peningkatan aktivitas KDMP berpotensi membuka kesempatan kerja pada pengelolaan koperasi, perdagangan dan distribusi, pengadaan serta pengolahan produk, hingga jasa pendukung di tingkat desa/kelurahan. Lebih lanjut, kedua program tersebut berpotensi menciptakan *multiplier effect* terhadap penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan permintaan produk dan jasa lokal, khususnya pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan pangan, transportasi, dan perdagangan.

Selanjutnya, dari total penduduk usia kerja di periode Mei 2026, sebesar 65,77% merupakan angkatan bekerja (Grafik 5.3).

Grafik 5.3. Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Februari 2026

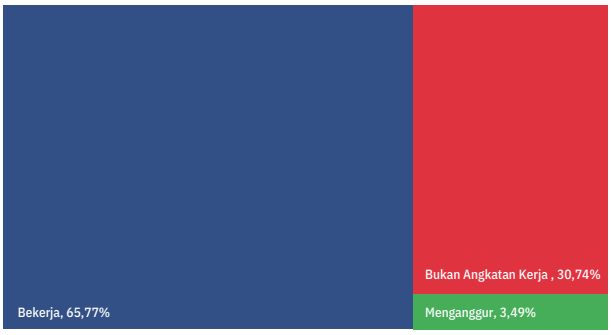

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.4. Pangsa Pekerja Berdasarkan Lapangan Usaha

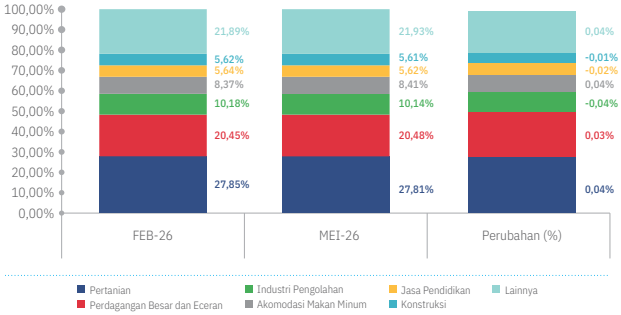

Sumber: BPS, diolah

Komposisi penduduk bekerja tersebut berdasarkan hasil Sakernas Mei 2026, terdapat 3 (tiga) lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 27,81%, Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 20,48%, dan Industri Pengolahan sebesar 10,14% (Grafik 5.4). Perkembangan serapan tenaga kerja sektoral pada Mei 2026 mengalami peningkatan dibandingkan Februari 2026 pada LU Penyediaan Akomodasi Makan Minum, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan sektor lainnya. Peningkatan serapan tenaga kerja pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum didorong oleh momentum Hari Besar Keagamaan Nasional serta membaiknya aksesibilitas ke kawasan wisata, terutama di Danau Toba dan pusat wisata budaya lainnya. Kondisi ini meningkatkan aktivitas pariwisata yang berdampak langsung pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja di sektor pendukung, seperti pemandu wisata, jasa transportasi, dan pengelola usaha hiburan.

Peningkatan pada LU perdagangan besar dan eceran juga mencerminkan pergeseran permintaan tenaga kerja ke sektor-sektor yang didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, peningkatan event sehingga mendorong pariwisata, serta peningkatan penyaluran kredit aktivitas keuangan sehingga memperkuat struktur ketenagakerjaan dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

Upah Riil dan Upah Minimum: Perkembangan dan Tantangan Pascapandemi

Perkembangan upah di Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan data terakhir tahun 2026, menunjukkan tren penurunan pada Upah Minimum Provinsi (UMP) yang mencerminkan penguatan perlindungan terhadap pendapatan nominal pekerja. Dinamika upah riil pascapandemi masih belum sepenuhnya menunjukkan pemulihan. Sepanjang periode 2022–2025, upah riil

cenderung stagnan, dan pada tahun 2026 masih tercatat lebih rendah sekitar 1,62% dibandingkan dengan kondisi tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan upah nominal belum diikuti oleh pemulihan daya beli tenaga kerja. (Grafik 5.5).

Grafik 5.5. Tingkat Upah Rill vs Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara

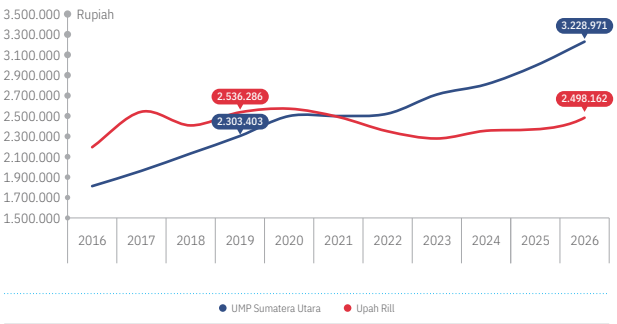

Sumber: BPS, diolah

Relatif masih lebarnya gap upah riil dan upah nominal ini dipengaruhi tekanan struktural ekonomi. Meningkatnya tekanan inflasi pada komoditas energi, pangan, dan kenaikan biaya hidup menyebabkan kenaikan pengeluaran rumah tangga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan upah nominal. Dari sisi pelaku usaha, meningkatnya biaya logistik dan biaya operasional yang disebabkan kenaikan harga energi dan bahan baku turut menekan kemampuan pelaku usaha dalam menaikkan upah di atas standar minimum UMP.

Namun demikian, terdapat prospek perbaikan seiring dengan pemulihan sektor perdagangan besar dan eceran, peningkatan investasi, dan akselerasi pariwisata yang didukung oleh peningkatan investasi pada sektor padat karya. Perkembangan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas daya beli tenaga kerja secara bertahap, sekaligus membuka peluang perbaikan kualitas pekerjaan melalui meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil, sehingga mendukung terciptanya struktur upah yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

5.2. Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara secara umum tetap terjaga, tecermin dari penurunan kemiskinan yang disertai peningkatan NTP serta penurunan Rasio Gini yang menunjukkan distribusi hasil pembangunan semakin merata. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa fundamental ekonomi masyarakat masih cukup kuat. Ke depan, diperlukan kebijakan yang konsisten dan langkah antisipatif agar perbaikan kesejahteraan dapat terus berlanjut serta dirasakan secara lebih merata.

5.2.1. Dinamika Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara

Kondisi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara membaik tercermin dari tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada periode Maret 2026 menunjukkan penurunan dibandingkan September 2025. Pada periode Maret 2026, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 1,11 juta jiwa atau 7,10% dari total populasi, menurun dibandingkan September 2025 yang sebesar 7,24% atau sekitar 1,13 juta jiwa – (Grafik 5.6). Capaian tersebut juga lebih baik dibandingkan rata-rata tingkat kemiskinan Nasional yang mencapai 8,07%, menunjukkan bahwa proporsi penduduk miskin di Sumatera lebih rendah dibandingkan nasional. Penurunan tingkat kemiskinan pada Maret 2026 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara triwulan I 2026 yang tetap tumbuh solid.

Penurunan angka kemiskinan ditopang oleh mobilitas penduduk dari wilayah beraktivitas ekonomi rendah menuju pusat-pusat pertumbuhan yang menyediakan peluang kerja dan pendapatan lebih tinggi. Sejalan dengan itu, terjadi peralihan tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah, terutama Sektor Pertanian ke sektor bernilai tambah yang menyerap tenaga kerja formal lebih luas, seperti Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Pengolahan, serta Akomodasi dan Makan Minum sesuai Grafik 5.4.

Dari perspektif spasial dan aglomerasi, tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada 2026 masih menunjukkan kesenjangan, terutama di wilayah kepulauan. Kabupaten Nias Barat mencatat tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 22,47%, diikuti Nias Utara sebesar 20,79% dan Nias Selatan sebesar 16,16%.

Grafik 5.6. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.7. Tingkat Kemiskinan Kab/Kota Sumut Maret 2026

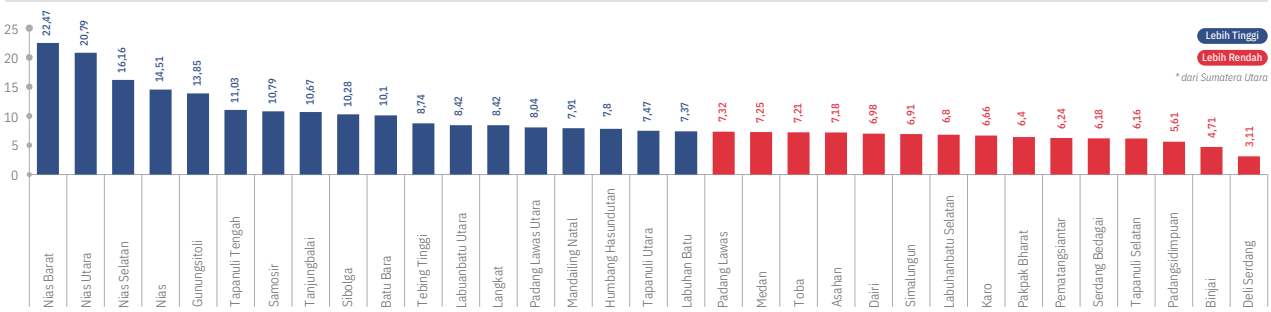

Sumber: BPS, diolah

Sebaliknya, wilayah yang berada dekat pusat pertumbuhan ekonomi menunjukkan kondisi yang lebih baik, seperti Kabupaten Deli Serdang dengan tingkat kemiskinan terendah sebesar 3,11% dan diikuti Kota Binjai sebesar 4,71%–(Grafik 5.7).

Perbedaan tersebut mencerminkan adanya hambatan struktural yang memengaruhi kapasitas tiap wilayah dalam menurunkan kemiskinan. Wilayah kepulauan masih dibayangi keterbatasan infrastruktur transportasi dan logistik, akses layanan dasar yang belum merata, serta minimnya investasi akibat tingginya biaya distribusi dan risiko usaha. Selain itu, kendala permodalan, adopsi teknologi, dan tingkat pendidikan mempersempit pilihan kerja, sehingga aktivitas ekonomi tetap didominasi sektor primer tradisional yang rentan terhadap gangguan cuaca dan gejolak harga komoditas.

Berbeda dengan wilayah lain, kawasan daratan yang terintegrasi dengan daerah urban, Medan–Binjai–Deli Serdang memiliki struktur ekonomi yang lebih beragam, kualitas sumber daya manusia lebih unggul, serta akses pasar dan jaringan distribusi yang lebih efisien. Kondisi ini menghasilkan peluang kerja dan pendapatan yang lebih stabil, sehingga tingkat kemiskinan cenderung lebih rendah. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa konsentrasi pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan belum sepenuhnya menyalurkan manfaat secara merata ke wilayah kepulauan dan kawasan pinggiran.

Strategi ke depan difokuskan pada percepatan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal (transportasi, energi, kesehatan, pendidikan) untuk memperkuat konektivitas dan mobilitas ekonomi, pengembangan pariwisata berbasis budaya alam di kepulauan, serta perluasan akses pembiayaan bagi UMKM dan petani; peningkatan kualitas SDM lewat pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi, dan digitalisasi layanan publik; serta penguatan tata kelola dan kolaborasi pemangku kepentingan agar kebijakan selaras dengan kebutuhan lokal. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja, mempersempit kesenjangan antarwilayah, dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

Selanjutnya, berdasarkan wilayah tempat tinggal, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan pada Maret 2026 dibandingkan September 2025. Di wilayah perkotaan, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 644 ribu orang, dengan tingkat kemiskinan menurun dari 7,16% pada September 2025 menjadi 7,05% pada Maret 2026. Sementara itu, di wilayah perdesaan, jumlah penduduk miskin mencapai 479 ribu orang, dengan tingkat kemiskinan menurun dari 7,35% menjadi 7,17% pada periode yang sama (Grafik 5.8).

Grafik 5.8. Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan

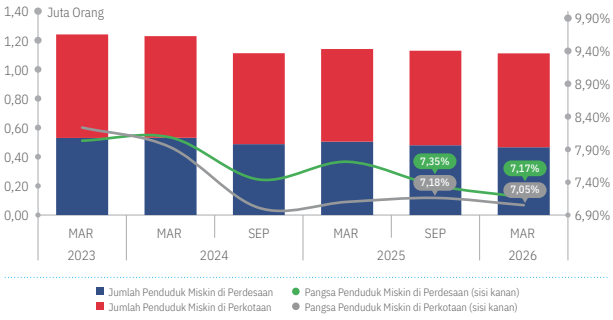

Sumber: BPS, diolah

Penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan didukung oleh membaiknya kesejahteraan petani yang tercermin dari peningkatan NTP, efektivitas program bantuan sosial Pemerintah, serta perpindahan sebagian penduduk usia produktif ke wilayah perkotaan. Arus migrasi tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan penduduk usia kerja di perkotaan. Peningkatan penduduk ini mendorong terbukanya

peluang kerja yang lebih luas di perkotaan, tercermin dari membaiknya penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi kelompok migran usia produktif. Momen ini memperlihatkan bagaimana geliat ekonomi kota mampu mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan membantu masyarakat mengamankan pendapatan yang lebih stabil. Kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di kawasan perkotaan, dari 7,16% pada September 2025 menjadi 7,05% pada Maret 2026.

Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) pada Maret 2026 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan September 2025. Berdasarkan indikator Rasio Gini yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan pada skala 0 hingga 1, dimana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi, Provinsi Sumatera Utara mencatat angka rasio gini di perkotaan dan pedesaan sebesar 0,278 pada Maret 2026, lebih baik dibandingkan posisi September 2025 sebesar 0,283 (Grafik 5.9).

Di wilayah perkotaan, angka rasio gini menurun pada Maret 2026 dari sebelumnya sebesar 0,305 menjadi 0,299. Di wilayah perdesaan angka rasio gini stabil pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 sebesar 0,233. Karakteristik ekonomi perdesaan yang didominasi Sektor Pertanian dan usaha skala kecil dengan tingkat pendapatan yang cenderung seragam menjadi salah satu faktor pendukung. Selain itu, biaya hidup yang relatif lebih rendah serta kemampuan rumah tangga untuk memenuhi sebagian kebutuhan dasar secara mandiri turut membantu menjaga kesenjangan konsumsi tetap terkendali.

Tingkat ketimpangan Provinsi Sumatera Utara tercatat lebih rendah daripada rata-rata Nasional yang tercatat sebesar 0,368. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Sumatera Utara relatif lebih merata dibandingkan tingkat Nasional. Dengan demikian, pemerataan kesejahteraan di Sumatera Utara dapat dikatakan cukup baik, didukung oleh distribusi manfaat pembangunan yang lebih luas dan tingkat kesenjangan yang lebih terkendali dibandingkan banyak daerah lainnya di Indonesia.

Berdasarkan distribusi pengeluaran, masyarakat di wilayah perkotaan masih menunjukkan kesenjangan yang membaik antar kelompok pendapatan. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah pendapatan 40% terbawah pada Maret 2026, yang terlihat meningkat menjadi 23,37 persen dari sebelumnya 22,93 persen pada Maret 2026 – (Grafik 5.10). Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa daya beli kelompok berpendapatan rendah secara umum meningkat yang mengindikasikan adanya perbaikan daya beli kelompok dimaksud.

Pola distribusi pengeluaran masyarakat perdesaan di Sumatera Utara masih menunjukkan tingkat pemerataan yang relatif baik, tecermin dari perbedaan proporsi pengeluaran antar kelompok masyarakat yang cenderung tidak terlalu mencolok.

Pada Maret 2026, porsi pengeluaran kelompok 40% masyarakat berpendapatan menengah tercatat sebesar 39,04%, sedikit menurun dibandingkan 39,41% pada September 2025. Berkebalikan dengan pangsa pengeluaran kelompok 20% berpendapatan tertinggi meningkat dari 34,56% menjadi 34,73%, Peningkatan juga dialami kelompok 40% terbawah mengalami kenaikan dari 26,03% menjadi 26,23% – (Grafik 5.11). Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi, di mana sebagian porsi pengeluaran kelompok menengah beralih ke kelompok atas, meskipun kelompok berpendapatan rendah juga mencatat perbaikan daya beli.

Grafik 5.9. Perkembangan Rasio Gini

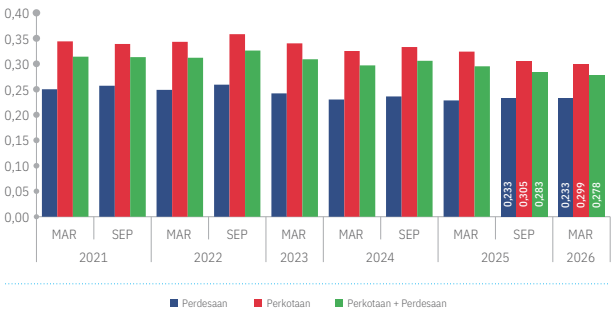

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.10. Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perkotaan

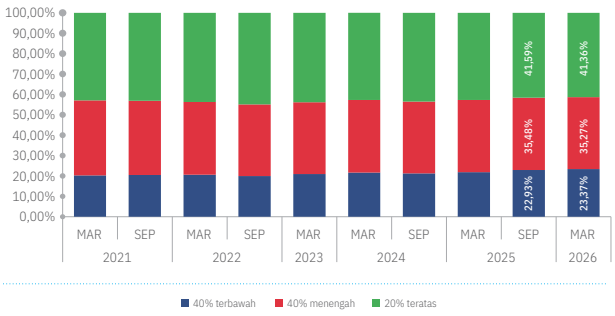

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.11. Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perdesaan

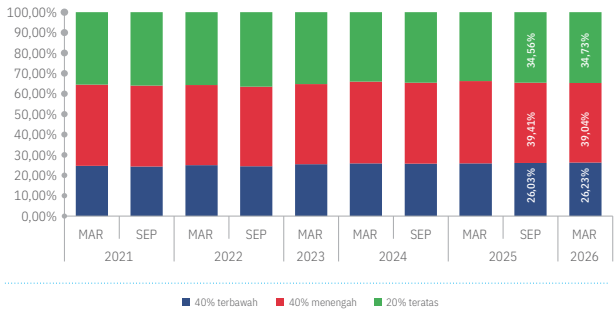

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.12. Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perkotaan

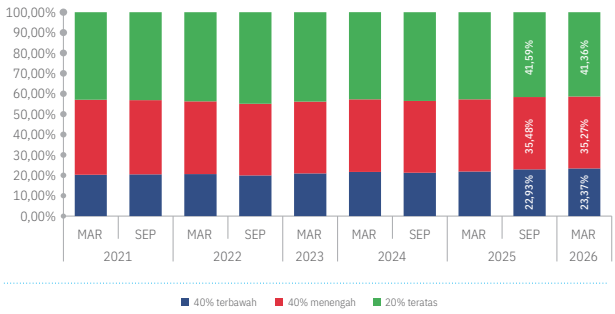

Sumber: BPS, diolah

Secara umum, kondisi tersebut mengindikasikan adanya tekanan terhadap pendapatan kelompok menengah yang cenderung turun bila dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain itu, kenaikan porsi pengeluaran kelompok berpendapatan rendah memberikan sinyal bahwa kemampuan konsumsi masyarakat lapisan bawah membaik. Untuk mendorong peningkatan konsumsi 40% masyarakat terbawah tersebut, diperlukan perluasan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, disertai penguatan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan agar peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah dapat berlangsung secara lebih merata.

Meski demikian, masyarakat perdesaan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur pendukung, dan pasar. Di samping itu, manfaat peningkatan NTP belum tentu dirasakan secara merata karena sebagian besar keuntungan berpotensi lebih banyak dinikmati oleh pemilik lahan dibandingkan petani penggarap. Oleh karena itu, penguatan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas layanan dasar, dan perluasan akses ekonomi menjadi faktor penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat desa secara lebih berkelanjutan.

Dari sisi spasial, distribusi pengeluaran masyarakat perkotaan menunjukkan penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah pendapatan 40% terbawah pada Maret 2026, dibandingkan dengan September 2025 – (Grafik 5.12). Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa daya beli kelompok berpendapatan rendah secara umum meningkat akibat berbagai kebijakan seperti Gerakan Pangan Murah untuk menjaga daya beli masyarakat, Padat Karya Tunai.

Pola distribusi pengeluaran masyarakat perdesaan di Sumatera Utara masih menunjukkan tingkat pemerataan yang relatif baik, tercermin dari perbedaan proporsi pengeluaran antar kelompok masyarakat yang cenderung tidak terlalu mencolok.

Pada Maret 2026, porsi pengeluaran kelompok 40% masyarakat berpendapatan menengah tercatat sebesar 39,04%, sedikit menurun dibandingkan 39,41% pada Oktober 2025. Di sisi lain, pangsa pengeluaran kelompok 20% berpendapatan tertinggi meningkat dari 34,56% menjadi 34,73%, sementara kelompok 40% terbawah juga mengalami kenaikan tipis dari 26,03% menjadi 26,23% – (Grafik 5.13). Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi, di mana sebagian porsi pengeluaran kelompok menengah beralih ke kelompok atas, meskipun kelompok berpendapatan rendah juga mencatat perbaikan daya beli.

Secara umum, kondisi tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan ketimpangan karena pertumbuhan pangsa pengeluaran kelompok atas lebih besar dibandingkan peningkatan yang terjadi pada kelompok terbawah. Namun demikian, kenaikan porsi pengeluaran kelompok berpendapatan rendah

Grafik 5.13. Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perdesaan

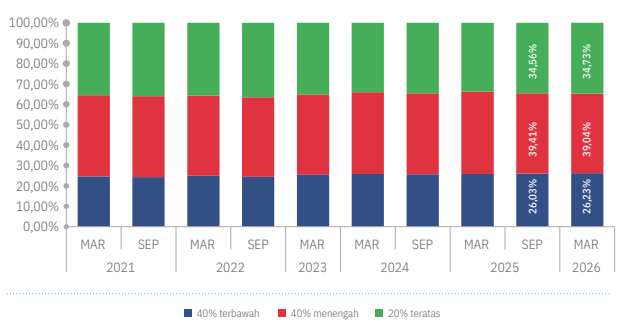

Sumber: BPS, diolah

memberikan sinyal bahwa kemampuan konsumsi masyarakat lapisan bawah membaik. Untuk memperkuat tren tersebut, diperlukan perluasan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, disertai penguatan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan agar peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah dapat berlangsung secara lebih merata.

5.2.2. Nilai Tukar Petani

Kesejahteraan petani Sumatera Utara pada triwulan II 2026 menunjukkan tren positif. NTP pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 159,50 atau lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 154,07. NTP Sumatera Utara yang berada di atas level 100, mengindikasikan bahwa daya beli petani semakin membaik, di mana kenaikan harga produksi hasil pertanian lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga konsumsi dan biaya produksi mereka.

Namun, dinamika antar-subsektor menunjukkan variasi yang perlu dicermati. NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 229,14 atau relatif meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 224,85. Kinerja positif juga terlihat pada NTP Tanaman Pangan (NTPP) yang naik dari 105,76 menjadi 106,68 – (Grafik 5.14). Peningkatan tersebut mencerminkan membaiknya posisi petani, baik karena kenaikan harga jual di tingkat petani maupun terkendalinya biaya yang harus dikeluarkan, sehingga margin usaha petani menjadi lebih baik. Kondisi ini berpotensi mendorong peningkatan daya beli masyarakat perdesaan serta mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan seiring dengan kelancaran distribusi dan kualitas produksi yang tetap terjaga. Meski demikian, sejumlah risiko masih perlu diwaspadai, antara lain fluktuasi harga komoditas, kenaikan biaya sarana produksi, serta potensi gangguan cuaca yang dapat memengaruhi kinerja Sektor Pertanian.

Grafik 5.14. Perkembangan Nilai Tukar Petani

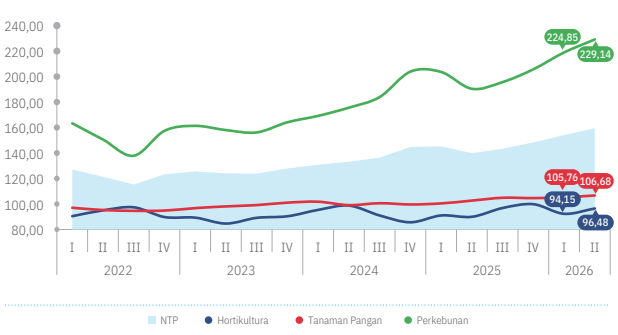

Sumber: BPS, diolah

NTP Hortikultura (NTPH) juga mengalami peningkatan dari 94,15 pada triwulan sebelumnya menjadi 96,48 pada triwulan II 2026. Kenaikan ini tidak terlepas dari perkembangan harga jual komoditas hortikultura serta perubahan kondisi permintaan dan pasokan di pasar. Relatif meningkatnya kinerja antar-subsektor tersebut menunjukkan daya saing subsektor hortikultura perlu dijaga stabilitasnya mengingat perannya yang penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Berbagai langkah yang dapat ditempuh antara lain meningkatkan ekstensifikasi hasil panen untuk meningkatkan produktivitas, pencarian pasar untuk hasil panen, mendorong penurunan biaya produksi, mendorong hiliriasi produk, memperbaiki infrastruktur pendukung, memperluas akses pasar, serta memperkuat akses petani terhadap pembiayaan usaha. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, kinerja subsektor hortikultura diharapkan dapat terus terjaga stabilitasnya.

Grafik 5.15. IT dan IB Sumatera Utara

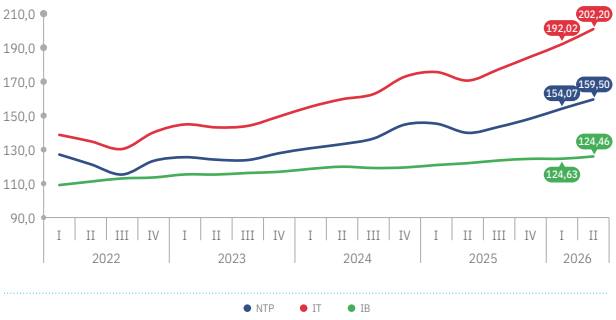

Sumber: BPS, diolah

Sejalan dengan perkembangan NTP, tingkat penerimaan petani juga menunjukkan kondisi yang relatif baik. Pada triwulan II 2026, Indeks yang Diterima Petani (IT) tercatat sebesar 202,20, sedangkan Indeks yang Dibayarkan Petani (IB) berada pada level 124,46 – (Grafik 5.15). Jarak yang cukup lebar antara indeks penerimaan dan indeks pengeluaran tersebut menjadi faktor utama yang menopang tingginya NTP. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan pendapatan yang diperoleh petani masih lebih tinggi dibandingkan peningkatan biaya konsumsi maupun biaya usaha, sehingga sektor pertanian tetap memberikan tingkat keuntungan yang cukup baik di tengah berbagai tantangan pasar yang dihadapi.

5.2.3. Turunnya Ketimpangan Pendapatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi cerminan membaiknya pemerataan pendapatan di Sumatera Utara.

Tabel 5.2. IPM Sumatera Utara Menurut Komponen

Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	73,00	73,10	73,39	73,67	73,90	74,19
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,23	13,27	13,31	13,48	13,49	13,50
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,54	9,58	9,71	9,82	9,93	10,08
Pengeluaran per Kapita	Rp Ribu	10.420,00	10.499,00	10.848,00	11.049,00	11.460,00	11.898,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	73,62	73,84	74,51	75,13	75,76	76,47
Pertumbuhan IPM (yoy)	%	3,43	0,30	0,91	0,83	0,84	0,94

Sumber: BPS, diolah

Perluasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan telah memperkuat kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga membuka ruang mobilitas sosial-ekonomi yang lebih besar. Pembangunan modal manusia yang terus berlanjut dengan demikian menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong terciptanya kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah.

IPM Sumatera Utara tercatat terus membaik, meningkat 0,94% dari 75,76 pada tahun 2024 menjadi 76,47 pada 2025 – (Tabel 5.2), dan masih berada di atas rata-rata Nasional sebesar 75,90 – (Grafik 5.15). Kenaikan ini didorong oleh perbaikan pada seluruh komponen utama, mulai dari usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, hingga pengeluaran per kapita. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta pelaksanaan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran telah memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan ketimpangan pendapatan dan memperkuat pertumbuhan yang inklusif di berbagai wilayah Sumatera Utara.

Grafik 5.15. Perkembangan IPM Sumatera Utara dan Nasional

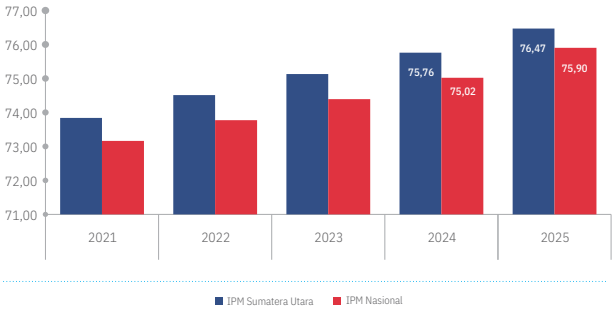

Sumber: BPS, diolah

06.

Prospek Perekonomian Daerah

Pertumbuhan Global

3,0%

2026[P]

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara

4,9 – 5,7%

2026[P]

Pertumbuhan Ekonomi Nasional

4,9 – 5,7%

2026[P]

Inflasi Sumatera Utara

2,5% ± 1%

2026[P]

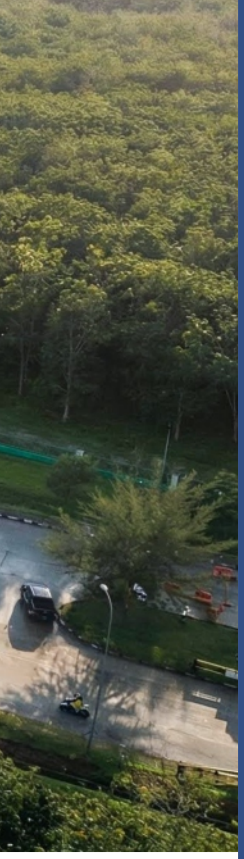

06.

Perekonomian Sumatera Utara pada 2026 diprakirakan tumbuh lebih kuat dalam kisaran 4,9–5,7% (yoy), ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang solid, peningkatan kualitas belanja pemerintah melalui optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD) dan pemulihan pascabencana, serta PMTB yang menguat didorong ekspansi KEK Sei Mangkei dan proyek infrastruktur strategis. Kinerja ekspor diproyeksikan tetap tinggi seiring kuatnya permintaan global terhadap CPO dan produk turunannya, sementara dari sisi sektoral pertumbuhan didorong oleh akselerasi industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, transportasi, serta pertanian melalui program swasembada pangan.

Inflasi tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam sasaran 2,5±1% berkat sinergi erat TPID dan implementasi GPIPS untuk mengendalikan harga volatile food. Di tengah tingginya ketidakpastian global, perlambatan ekonomi dunia, serta dinamika geopolitik, Sumatera Utara perlu memperkuat sinergi dan implementasi strategi pembangunan guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

6.1. Prospek Perekonomian Global

Prospek perekonomian global tetap lemah akibat perang di Timur Tengah yang terjadi sejak akhir Februari 2026. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diperkirakan tetap lemah sebesar 3,0% dan inflasi global meningkat menjadi sekitar 4,5%. FFR diperkirakan naik lebih awal ke triwulan IV 2026 dan imbal hasil *(yield)* US Treasury diprakirakan meningkat didorong oleh melebarnya defisit fiskal AS.

6.2. Prospek Perekonomian Nasional

Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan berada dalam kisaran 4,9% hingga 5,7%.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat untuk mendukung ketahanan eksternal. Bank Indonesia memprakirakan ketahanan eksternal tetap kuat ditopang sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menghadapi gejolak global. Sejalan dengan itu, nilai tukar Rupiah diprakirakan tetap stabil didukung penguatan respons kebijakan stabilisasi Bank Indonesia.

Dalam menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter dan memperluas kebijakan insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, sekaligus mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA). Insentif berupa pengurangan premi bagi Swap Jual Lindung Nilai dinaikkan menjadi sebesar 12,5% dan insentif bagi DNDF Jual Lindung Nilai diberikan sebesar 15%. Insentif juga diberikan untuk meningkatkan *Local Currency Transaction* (LCT) dengan negara mitra berupa premi Swap Beli Lindung Nilai sebesar 10% dan pengurangan premi DNDF Jual Lindung Nilai sebesar 10%. Bank Indonesia akan terus menempuh berbagai strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

Sementara itu, prospek inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2026 dan 2027 diperkirakan tetap berada dalam sasaran 2,5% ± 1%.

Stabilitas inflasi tersebut didukung oleh konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga inflasi serta berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian harga. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dalam implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), guna mengendalikan inflasi pangan termasuk antisipasi risiko gangguan cuaca (El Nino) terhadap harga pangan.

6.3. Prospek Perekonomian Sumatera Utara

6.3.1. Prospek Perekonomian Sumatera Utara Tahun 2026

Ekonomi Sumatera Utara pada 2026 diprakirakan tumbuh lebih kuat di kisaran 4,9–5,7% (yoy). Pertumbuhan diprakirakan didorong oleh tetap kuatnya konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, berlanjutnya investasi di kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta terjaganya kinerja ekspor. Berbagai stimulus pemerintah dan penyelenggaraan event nasional maupun internasional di Sumatera Utara turut memperkuat aktivitas ekonomi, pariwisata, dan perdagangan.

Dari sisi pengeluaran, prospek pertumbuhan ekonomi didukung oleh inflasi yang terkendali. Selain itu, efektivitas berbagai stimulus pemerintah turut mendorong pertumbuhan ekonomi, diantaranya program MBG, KDMP, perpanjangan PPh final UMKM, program magang, stimulus pekerja pariwisata dan industri padat karya, hingga diskon iuran JKK dan JKM. Konsumsi RT diprakirakan meningkat seiring penyelenggaraan berbagai event nasional dan internasional di Sumut, seperti Piala AFF, Forum IMT-GT, dan Rakernas APEKSI, yang mendorong mobilitas, pariwisata, dan belanja daerah. Lebih lanjut, Konsumsi pemerintah juga meningkat didukung optimalisasi kualitas belanja, pengembalian TKD, belanja barang, percepatan pemulihan pascabencana, serta dampak base effect tahun sebelumnya. Di sisi investasi, percepatan pembangunan hunian tetap, Sekolah Rakyat, penguatan kawasan industri dan KEK, termasuk target investasi KEK Sei Mangkei sebesar Rp7,5 triliun, serta keberlanjutan proyek infrastruktur menjadi pendorong utama. Sementara itu, ekspor diprakirakan tetap tumbuh seiring kuatnya permintaan CPO dan produk turunannya dari negara mitra utama, di tengah peningkatan impor yang mencerminkan menguatnya aktivitas ekonomi domestik.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat didorong oleh akselerasi sektor industri pengolahan dan konstruksi. Hal ini seiring peningkatan bauran biodiesel, kepastian tarif resiprokal AS, percepatan proyek pemerintah, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk pembangunan

hunian tetap dan Sekolah Rakyat. Kinerja perdagangan turut membaik didukung peningkatan ekspor komoditas unggulan. Di sisi lain, sektor transportasi dan akomodasi tetap tumbuh positif seiring momentum HBKN dan Nataru, meningkatnya aktivitas MICE, serta penyelenggaraan berbagai event nasional dan internasional di Sumatera Utara. Sementara itu, sektor pertanian tetap menjadi penopang pertumbuhan melalui penguatan program swasembada pangan.

Di tengah berlanjutnya ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi mitra dagang utama, perekonomian Sumatera Utara pada 2026 diproyeksikan tetap bertumbuh secara akseleratif, didorong oleh ketahanan permintaan domestik, stabilitas kinerja ekspor, serta kelanjutan berbagai kebijakan dan proyek strategis pemerintah.

Tabel 6.1. Faktor Pendorong dan Penahan Perekonomian Sumatera Utara Tahun 2026

Faktor Pendorong
1. Peningkatan bauran biodiesel yang memperkuat permintaan domestik dan stabilitas harga CPO.
2. Percepatan program Asta Cita (termasuk MBG, KDMP, pendidikan, kesehatan) serta penyaluran bansos yang menjaga daya beli masyarakat.
3. Kondisi cuaca yang kondusif dan penguatan ketahanan pangan yang mendongkrak produksi sektor pertanian.
4. Potensi peningkatan investasi di sejumlah kawasan industri dan ekonomi khusus.
5. Penyelenggaraan berbagai *event* strategis regional dan nasional (Rakernas APEKSI, Piala AFF, serta forum IMT-GT) yang menggerakkan ekonomi lokal.
6. Penyesuaian tata kelola, administrasi, dan koordinasi antarlembaga dalam transisi implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI.

Faktor Penahan
1. Peningkatan ketidakpastian global dan proteksionisme yang berpotensi mengganggu rantai pasok serta perdagangan internasional.
2. Keterbatasan ruang fiskal daerah akibat tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat dan belum optimalnya komposisi belanja produktif.
3. Rendahnya nilai tambah ekspor yang membuat kinerja perdagangan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
4. Konsentrasi ekspor pada negara tujuan tertentu yang rentan terhadap fluktuasi permintaan luar negeri.
5. Kendala pada aspek perizinan, kesiapan infrastruktur, dan kepastian regulasi yang menghambat realisasi investasi, termasuk pada sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan baru.

6.3.1.1. Prospek Sisi Pengeluaran

Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, ditopang oleh inflasi yang terkendali, efektivitas stimulus fiskal, serta peningkatan pendapatan dari sektor perkebunan dan aktivitas event regional.

Konsumsi rumah tangga diprakirakan tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada 2026. Kondisi ini ditopang oleh inflasi yang terkendali sehingga menjaga daya beli masyarakat, serta efektivitas berbagai stimulus fiskal seperti program Asta Cita (termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih), perpanjangan PPh final UMKM, dan insentif PPh 21 DTP bagi pekerja sektor pariwisata serta industri padat karya. Peningkatan pendapatan petani dan pelaku usaha perkebunan seiring kuatnya permintaan global terhadap CPO dan produk turunannya turut memperkuat *disposable income* masyarakat.

Selain itu, mobilitas masyarakat dan perputaran ekonomi lokal terdongkrak berkat penyelenggaraan berbagai event strategis regional dan nasional seperti Rakernas APEKSI, Piala AFF, serta forum IMT-GT. Meskipun demikian, kewaspadaan masyarakat terhadap fluktuasi harga pangan pokok menjelang hari besar keagamaan sempat memicu penahanan ekspektasi belanja jangka pendek, namun secara keseluruhan stabilitas harga dan dukungan stimulus fiskal tetap menjadi fondasi utama penopang konsumsi.

Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah meningkat seiring perbaikan kualitas belanja dan optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD), meski masih dibayangi tantangan keterbatasan ruang fiskal produktif.

Konsumsi pemerintah pada 2026 diprakirakan meningkat seiring dengan perbaikan kualitas belanja yang berorientasi pada pelayanan publik dan aktivitas ekonomi daerah, ditopang oleh optimalisasi alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Dukungan fiskal semakin menguat melalui percepatan program prioritas, rehabilitasi pascabencana, pembangunan fasilitas pendidikan, serta *base effect* dari realisasi anggaran tahun sebelumnya yang relatif

terbatas. Kendati demikian, efektivitas belanja pemerintah ini masih dihadapkan pada tantangan keterbatasan ruang fiskal akibat tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat serta perlunya optimalisasi komposisi belanja agar lebih berorientasi pada sektor-sektor produktif.

Investasi

PMTB mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi didorong ekspansi hilirisasi KEK Sei Mangkei dan proyek infrastruktur strategis, di tengah tantangan perizinan dan tata kelola regulasi.

PMTB diprakirakan mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi seiring perbaikan iklim investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis. Pengembangan KEK Sei Mangkei dengan target investasi Rp7,5 triliun pada 2026 menjadi motor utama hilirisasi berbasis sawit, karet, hingga industri FMCG, yang didukung oleh diversifikasi investor global. Ekspansi investasi ini turut didorong oleh sinergi North Sumatra Invest (NSI) serta realisasi berbagai Proyek Strategis Nasional. Kendati minat investasi terpantau tinggi, realisasinya masih menghadapi sejumlah kendala struktural, antara lain pada aspek perizinan, kesiapan infrastruktur, kepastian regulasi, serta penyesuaian tata kelola dan koordinasi antarlembaga dalam transisi implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui *Digital Single Interface* (DSI).

Ekspor-Impor

Kinerja ekspor netto tumbuh positif berkat permintaan global dan bauran biodiesel, sementara peningkatan impor merefleksikan penguatan aktivitas produksi dan investasi domestik yang produktif.

Kinerja ekspor netto diprakirakan tetap memberikan kontribusi positif di tengah dinamika global. Ekspor didorong oleh tingginya permintaan global terhadap CPO dan produk turunannya, peningkatan bauran biodiesel domestik, serta implementasi *Agreement on Reciprocal Trade* (ART) yang memberikan tarif impor 0% di pasar AS. Di sisi lain, diversifikasi pasar ke India, Pakistan, Afrika, dan Eropa serta penguatan standar keberlanjutan melalui kepatuhan regulasi internasional memperkuat daya saing ekspor daerah. Meskipun demikian, kinerja ekspor masih dibayangi oleh risiko ketidakpastian global, proteksionisme, rendahnya nilai tambah pada komoditas tertentu, serta konsentrasi tujuan ekspor yang rentan terhadap fluktuasi permintaan luar negeri.

Sementara itu, komponen impor turut membukukan pertumbuhan positif guna memenuhi kebutuhan bahan baku, barang modal, dan *intermediate goods,* yang secara teoretis memberikan efek kontraksi terhadap *net export* namun merefleksikan penguatan aktivitas produksi serta investasi yang produktif di dalam negeri.

6.3.1.2. Komponen Lapangan Usaha

Pertanian

Kinerja Lapangan usaha pertanian diprakirakan tetap menguat pada 2026, terutama ditopang oleh subsektor perkebunan, implementasi program swasembada pangan nasional, penguatan sinergi antarinstansi, serta dukungan fiskal pemerintah pusat dan daerah.

Pada subsektor perkebunan, permintaan terhadap komoditas unggulan seperti kelapa sawit diprakirakan tetap tinggi sejalan dengan pemenuhan permintaan terhadap industri pengolahan CPO dan produk turunannya baik dalam domestik maupun ekspor. Selain itu, tren harga komoditas TBS kelapa sawit dan karet juga diprakirakan tetap memberikan insentif positif bagi pelaku usaha perkebunan, meskipun volatilitas harga perlu diwaspadai di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Di sisi subsektor tanaman pangan, khususnya padi, kinerja diprakirakan membaik didukung oleh produktivitas dari panen raya yang akan berlangsung pada triwulan III 2026. Di sisi lain, anomali cuaca dapat berpotensi terhadap risiko gangguan produktivitas sehingga diperlukan sinergi yang erat dalam memperkuat program ketahanan pangan antara lain melalui peningkatan produktivitas petani, penguatan kelembagaan dan perbaikan tata niaga serta efisiensi rantai pasok.

Industri Pengolahan

Kinerja industri pengolahan diprakirakan tetap menguat dan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada 2026. Penguatan tersebut terutama didukung oleh kinerja industri pada komoditas CPO dan produk turunannya serta karet, yang sejalan dengan peningkatan produksi dan kinerja LU Pertanian. Dari sisi permintaan domestik, kebijakan pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO), peningkatan bauran biodiesel dan kebutuhan energi diprakirakan turut mendorong permintaan CPO untuk kebutuhan dalam negeri.

Di sisi eksternal, prospek permintaan global yang tetap tinggi berpotensi menjaga harga CPO dan karet relatif kuat, sehingga memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Dari sisi spasial, kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) khususnya KEK Sei Mangkei menunjukkan prospek penguatan aktivitas industri dan hilirisasi di Sumatera Utara. Hal tersebut tecermin dari bertambahnya jumlah perusahaan pada sektor industri berbasis kelapa sawit dan hilirisasi sawit yang telah beroperasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.4. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin kuatnya ekosistem industri yang mengintegrasikan aktivitas pengolahan bahan baku dengan industri hilir bernilai tambah. Selain itu, ekspansi perusahaan yang bergerak pada produksi bahan baku industri oleokimia di tahun 2026 semakin memperkuat indikasi peningkatan kapasitas hilirisasi.

Ke depan, optimalisasi potensi KEK Sei Mangkei sebagai salah satu kawasan industri strategis Sumatera Utara perlu terus didorong menjadi ekosistem industri hilir melalui upaya iklim investasi yang semakin kondusif, percepatan ketersediaan infrastruktur dan energi yang memadai, penguatan konektivitas logistik, dan integrasi rantai pasok hulu-hilir.

Perdagangan

Lapangan usaha perdagangan diprakirakan tumbuh lebih tinggi pada 2026, didukung oleh menguatnya aktivitas konsumsi masyarakat, intensitas penyelenggaraan berbagai event, serta peningkatan ekspor komoditas unggulan Sumatera Utara. Penguatan aktivitas perdagangan terutama diprakirakan terjadi pada semester II, sejalan dengan *Calendar of Event* pariwisata yang tetap intens pada Semester II 2026, yang meningkatkan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan.

Peningkatan aktivitas perdagangan juga didukung oleh momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Natal–Tahun Baru (Nataru) yang mendorong permintaan barang konsumsi, serta meningkatnya aktivitas *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE). Berbagai kegiatan tersebut diprakirakan memberikan multiplier effect terhadap perdagangan eceran, terutama melalui peningkatan permintaan akomodasi, makanan-minuman, transportasi, serta berbagai kebutuhan konsumsi selama pelaksanaan event.

Momentum Harbolnas pada akhir tahun turut menjadi katalis bagi perdagangan eceran, seiring meningkatnya transaksi dan konsumsi melalui kanal perdagangan digital *(e-commerce).* Perkembangan digitalisasi perdagangan juga diprakirakan memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi distribusi barang, sehingga mendukung aktivitas perdagangan menjelang akhir tahun.

Dari sisi eksternal, peningkatan ekspor komoditas unggulan Sumatera Utara, khususnya kelapa sawit dan produk turunannya, karet, kopi, serta komoditas hortikultura, diprakirakan turut memperkuat aktivitas perdagangan besar. Terjaganya permintaan dari negara mitra dagang utama serta peluang diversifikasi pasar ekspor menjadi faktor pendukung bagi peningkatan arus perdagangan komoditas daerah.

Penguatan konsumsi domestik, padatnya agenda pariwisata dan event pada semester II, momentum HBKN–Nataru dan Harbolnas, serta peningkatan ekspor komoditas unggulan, lapangan usaha perdagangan diprakirakan mengalami akselerasi pada 2026.

Transportasi dan Pergudangan

Kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan diprakirakan mengalami peningkatan sejalan dengan tingginya mobilitas penumpang dan aktivitas logistik.

Peningkatan mobilitas utamanya didorong oleh aktivitas pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), periode Natal dan Tahun Baru, serta *long weekend* yang meningkatkan permintaan terhadap jasa transportasi. Selain itu, peningkatan aktivitas MICE dan penyelenggaraan kegiatan regional pada semester II 2026 antara lain Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50, *flagship event* Bank Indonesia, Forum Tingkat Menteri IMT-GT *(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)* ke-32, *Samosir International Choir Competition,* dan berbagai *event* dan festival di Sumatera Utara juga diprakirakan meningkatkan arus wisatawan, perjalanan bisnis, dan tingkat okupansi hotel.

Dari sisi infrastruktur, beberapa ruas lanjutan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2026 semakin memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung kelancaran mobilitas penumpang maupun distribusi barang.

Selanjutnya dari sisi transportasi udara, pengembangan konektivitas Bandara Internasional Kualanamu diprakirakan meningkatkan aksesibilitas wilayah serta memperluas pilihan konektivitas udara. Pembukaan rute Kualanamu – Mandailing Natal dalam penerbangan Wings Air sejak Agustus 2026 diharapkan dapat mendorong efisiensi waktu tempuh dan distribusi logistik serta membuka akses yang lebih luas terhadap mobilitas masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di Mandailing Natal dan wilayah sekitarnya.

Konstruksi

Lapangan usaha konstruksi diprakirakan tumbuh lebih tinggi pada 2026, didorong oleh akselerasi realisasi belanja pemerintah dan berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis swasta di Sumatera Utara. Akselerasi tersebut antara lain tercermin dari berlanjutnya pembangunan dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang membutuhkan pembangunan maupun penyiapan sarana dan prasarana fisik. Peningkatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk konstruksi dari pemerintah pusat juga diprakirakan mendorong percepatan realisasi belanja daerah, termasuk belanja modal dan pembangunan infrastruktur.

Dorongan terhadap sektor konstruksi juga berasal dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor pada akhir 2025. Kebutuhan pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik pascabencana tecermin dari peningkatan pagu anggaran yang signifikan pada 2026, yang diarahkan antara lain untuk perbaikan jalan dan jembatan, infrastruktur dasar, fasilitas publik, serta pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat turut menambah aktivitas konstruksi melalui pembangunan fasilitas pendidikan beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Peningkatan alokasi untuk berbagai kebutuhan pembangunan fisik tersebut diprakirakan mendorong kenaikan volume pekerjaan konstruksi sepanjang 2026.

Kinerja konstruksi pada 2026 turut didukung oleh *base effect* dari tahun sebelumnya, ketika kebijakan pengetatan anggaran menahan realisasi pembangunan sehingga sektor konstruksi mengalami kontraksi. Dengan ruang fiskal yang lebih mendukung pada 2026, realisasi berbagai proyek pemerintah diprakirakan kembali meningkat dan memberikan dorongan terhadap aktivitas konstruksi secara lebih luas.

Dari sisi swasta, *groundbreaking* dan dimulainya konstruksi sejumlah tenant di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) menjadi sumber pertumbuhan tambahan, seiring meningkatnya aktivitas investasi dan pembangunan kawasan. Selain itu, penyelenggaraan berbagai *event* nasional dan internasional di Sumatera Utara, seperti Piala AFF U-19 diprakirakan mendorong pembangunan dan penataan fasilitas pendukung, termasuk sarana olahraga, konektivitas, serta infrastruktur penunjang kegiatan.

Adanya peningkatan pagu dan realisasi belanja pemerintah, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pembangunan proyek strategis, akselerasi investasi di KEK/KI, serta kebutuhan infrastruktur pendukung berbagai *event,* aktivitas konstruksi pada 2026 diprakirakan mengalami akselerasi signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

6.3.2. Prospek Inflasi Sumatera Utara

Inflasi Sumatera Utara pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5±1%, meskipun tekanan inflasi diperkirakan masih meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Secara umum, inflasi 2026 diprakirakan mengalami moderasi dibandingkan periode tekanan tinggi sebelumnya, terutama didukung oleh faktor *base effect,* normalisasi harga pangan pascabencana hidrometeorologi pada akhir 2025, serta normalisasi tarif listrik setelah berakhirnya dampak diskon tarif listrik pada awal 2025. Namun demikian, dibandingkan dengan tracking inflasi terkini, tekanan harga perlu terus diwaspadai karena terdapat sejumlah faktor risiko yang berpotensi meningkatkan inflasi, baik yang berasal dari sisi domestik maupun global.

Dari sisi domestik, **kelompok makanan bergejolak *(volatile food)* masih menjadi sumber risiko utama** bagi prospek inflasi 2026. Kondisi cuaca dan ketahanan pasokan pangan, khususnya di daerah sentra hortikultura seperti Kabupaten Karo dan Simalungun, akan sangat menentukan dinamika harga komoditas strategis, antara lain cabai merah, cabai rawit, tomat, dan bawang merah. Anomali cuaca yang terjadi secara spasial berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan serta meningkatkan volatilitas harga. Tekanan tersebut juga dapat diperkuat oleh kenaikan biaya produksi pertanian, termasuk harga pupuk nonsubsidi dan upah pekerja tani. Selain itu, meningkatnya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan penerima manfaat program Makan Bergizi

Gratis (MBG) perlu terus diantisipasi agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keseimbangan pasokan dan permintaan.

Meski demikian, tekanan dari kelompok pangan diprakirakan dapat diredam oleh **perbaikan pasokan domestik dan penguatan berbagai kebijakan pengendalian inflasi pangan.** Kinerja produksi yang meningkat pada sejumlah komoditas, terutama beras, didukung oleh berlanjutnya program stimulus pertanian dan perbaikan produksi hortikultura, berpotensi menjaga kecukupan pasokan. Ketersediaan pasokan dari peternakan lokal juga dapat mendorong deflasi musiman pada komoditas daging dan telur ayam ras. Selain itu, limpahan pasokan hortikultura dari Jawa apabila kondisi cuaca tetap kondusif menjadi faktor penahan tambahan bagi inflasi pangan di Sumatera Utara. Upaya tersebut perlu diperkuat melalui optimalisasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) dan TPID, antara lain melalui operasi pasar dan pasar murah menjelang HBKN, perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), penguatan *cold storage,* serta implementasi pertanian *close-loop* dan teknologi pertanian yang lebih efisien.

Pada **komponen inflasi inti *(core inflation),*** tekanan diprakirakan berasal dari menguatnya permintaan domestik dan peningkatan sejumlah biaya. Kenaikan UMP Sumatera Utara tahun 2026 sebesar 7,9% berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendorong permintaan. Di sisi lain, kenaikan upah juga dapat meningkatkan biaya produksi dan mendorong penyesuaian harga sejumlah barang dan jasa, termasuk biaya sewa atau kontrak rumah yang turut dipengaruhi kenaikan harga bahan bangunan. Stimulus fiskal melalui kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sektor tertentu sepanjang 2026 juga berpotensi memperkuat daya beli dan permintaan domestik.

Tekanan inflasi inti juga perlu diwaspadai dari **kenaikan harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik.** Tren kenaikan harga CPO global berpotensi ditransmisikan ke harga minyak goreng domestik, sementara tingginya ketidakpastian global dapat mendorong peningkatan harga emas dunia sebagai aset *safe haven.* Kondisi tersebut memiliki relevansi yang cukup besar bagi Sumatera Utara mengingat emas perhiasan secara konsisten menjadi salah satu pendorong inflasi tahunan di tengah kuatnya preferensi masyarakat terhadap investasi emas fisik. Selain itu, pergerakan harga sejumlah komoditas pada kelompok informasi dan komunikasi, seperti laptop atau *notebook,* turut menjadi sumber dinamika inflasi inti. Namun, tekanan tersebut diprakirakan dapat tertahan oleh konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, serta kebijakan penguatan devisa hasil ekspor yang mendukung ketahanan eksternal dan membantu meredam risiko *imported inflation.* Penambahan kuota rumah subsidi (FLPP) juga berpotensi menahan kenaikan harga pada komponen perumahan.

Sementara itu, risiko pada kelompok harga yang diatur pemerintah *(administered prices)* terutama berasal dari potensi kenaikan harga energi dunia akibat ketidakpastian geopolitik, yang dapat meningkatkan biaya transportasi dan harga avtur. Tekanan juga dapat berasal dari transmisi kebijakan cukai hasil tembakau terhadap harga rokok. Namun demikian, dampak kenaikan harga energi diprakirakan dapat dimitigasi oleh keberlanjutan kebijakan subsidi energi, normalisasi tarif angkutan udara, serta berbagai kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa strategis.

Secara keseluruhan, prospek inflasi Sumatera Utara pada tahun 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1%, dengan tekanan harga yang cenderung meningkat dibandingkan *tracking* terkini namun masih dapat dimitigasi melalui kuatnya faktor penahan domestik dan respons kebijakan yang terkoordinasi. Risiko utama tetap bersumber dari volatilitas harga pangan akibat gangguan cuaca, peningkatan permintaan domestik, kenaikan biaya produksi dan upah, serta imported inflation akibat kenaikan harga komoditas dan energi global di tengah ketidakpastian geopolitik. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan TPID menjadi krusial untuk menjaga kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta ekspektasi inflasi, khususnya menjelang periode HBKN dan pada saat terjadi gangguan pasokan pangan.

Untuk itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter guna menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Tabel 6.2. Faktor Pendorong dan Penahan Inflasi Sumatera Utara Tahun 2026

Faktor Pendorong:	
VF:	(1) Biaya produksi yang meningkat karena harga pupuk dan upah; (2) Peningkatan kebutuhan pangan seiring pertumbuhan penerima manfaat program MBG tecermin dari peningkatan jumlah SPPG MBG di Sumut; (3) Kinerja produksi hortikultura yang diprakirakan relatif tidak tumbuh signifikan; (4) Potensi El Nino untuk komoditas hortikultura serta sedikitnya saluran irigasi teknis di beberapa daerah sentra horti
CI:	(1) Kenaikan biaya logistik dalam maupun luar negeri menyebabkan domino effect kepada komoditas CI; (2) Peningkatan daya beli masyarakat seiring pemberian stimulus dari pemerintah dan kenaikan UMP pada tahun 2026; (3) berlanjutnya tensi geopolitik global sehingga meningkatkan tren imported inflation; (4) Depresiasi nilai tukar berpotensi menimbulkan imported inflation yang didorong naiknya harga komoditas impor (5) Potensi kenaikan harga minyak goreng akibat peningkatan harga CPO pada tahun 2026 dibandingkan 2025
AP:	Prakiraan berlanjutnya Perang dan kondisi geopolitik yang masih belum stabil yang dapat meningkatkan harga energi global dan berdampak pada harga avtur dalam negeri;
Faktor Penahan:	
VF:	a. Faktor baseline effect inflasi VF yang mengalami inflasi cukup besar sepanjang tahun 2025 terlebih pada akhir tahun pada saat terjadinya bencana alam; b. Optimalisasi kapasitas *cold storage*, perluasan hilirisasi produk hortikultura, serta perluasan optimalisasi KAD. c. Penerapan mitigasi iklim berbasis edukasi melalui implementasi Sekolah Lapang Iklim dan penyusunan pola tanam terjadwal untuk meminimalkan gagal panen akibat cuaca. d. Sinergi Pemerintah dan Bank Indonesia melalui implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), optimalisasi anggaran daerah untuk operasi pasar murah/sidak, dan edukasi belanja bijak masyarakat (termasuk SPPG dan KDKMP di daerah). e. Komunikasi efektif melalui iklan layanan masyarakat belanja bijak dan sidak pasar/pasar murah menjelang HBKN yang diprakirakan mampu menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi.
CI:	a. Pemberlakuan wajib parkir 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA di rekening khusus bank HIMBARA minimal 12 bulan (efektif per Juni 2026) berpotensi meredam risiko *imported inflation.* b. Kenaikan suku bunga BI Rate 0,5 basis point berpotensi memperlambat kredit dan menurunkan daya beli Masyarakat serta aktivitas c. Volatilitas harga emas seiring dengan turunnya harga emas global dalam beberapa bulan d. Kebijakan penambahan kuota rumah bersubsidi (FLPP) dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit pada tahun 2026 meredam gejolak harga berlebih di sektor properti dan tempat tinggal secara makro
AP:	a. Kesiapan armada udara dalam merespons kebijakan pemerintah dan diskon tarif angkutan udara pada masa HBKN b. Konsistensi pemerintah dalam menjaga dan menerapkan kebijakan subsidi bensin serta bahan bakar kendaraan bermotor sepanjang tahun berjalan. c. Pemberlakuan pajak karbon secara bertahap mulai tahun 2026 berpotensi menahan laju kenaikan harga di sektor-sektor industri hulu yang padat emisi.

6.4. Rekomendasi

Di tengah berbagai tantangan global dan domestik, Sumatera Utara perlu memperkuat sinergi serta implementasi strategi pembangunan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

1) **Mendorong Percepatan Investasi melalui Hilirisasi, Industrialisasi, dan Peningkatan Daya Saing.**

Percepatan investasi pada sektor hilirisasi dan industrialisasi merupakan instrumen penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan. Peningkatan nilai tambah CPO perlu diakselerasi guna menekan arus keluar bahan baku mentah ke wilayah lain melalui optimalisasi KEK Sei

Mangkei untuk menarik investasi pada industri oleokimia dan turunan CPO tahap lanjut (seperti surfaktan, gliserin, kosmetik, dan farmasi). Penguatan ekosistem investasi ini didukung oleh penyusunan data yang akurat, termasuk pelaporan UMKM dan penghitungan *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR) sektoral bersama BPS sebagai landasan perumusan kebijakan.

Strategi penarikan investasi diperkuat melalui penyusunan dan promosi profil produk unggulan hilirisasi, penindaklanjutan *Sumatra Investment Day* (SID) melalui pendampingan proyek *(project mentoring),* fasilitasi *business matching,* layanan purna investasi *(aftercare services),* serta penguatan forum investasi regional. Guna mengatasi hambatan struktural, diperlukan peninjauan kebijakan efisiensi biaya logistik (seperti tarif tol dan pajak angkutan barang), penyederhanaan perizinan lahan dan lingkungan, perluasan konektivitas wilayah, serta optimalisasi sinergi North Sumatra Invest (NSI) dalam memperluas proyek *Investment Project Ready to Offer* (IPRO).

2) **Peningkatan Ekspor melalui Diversifikasi Pasar dan Penguatan Nilai Tambah.**
Upaya peningkatan ekspor Sumatera Utara diarahkan pada penguatan nilai tambah serta diversifikasi ke pasar nontradisional. Penetrasi ekspor produk turunan CPO didorong secara optimal pada negara mitra tradisional utama (Tiongkok, India, dan Pakistan) yang berada pada posisi rising star dengan prospek permintaan stabil, sekaligus melakukan ekspansi agresif ke pasar nontradisional potensial seperti kawasan Afrika guna memitigasi risiko proteksionisme global. Strategi ini dikombinasikan dengan penguatan standar keberlanjutan dan pengembangan produk hilir guna mendongkrak daya saing ekspor daerah terhadap perekonomian global. Berdasarkan pendekatan *Competitive Power Position* dengan analisis *Export Product Dynamic* (EPD), peluang ekspansi pasar CPO dan produk turunannya masih terbuka lebar (Gambar 6.1).

Gambar 6.1. *Market Share Analysis using Competitive Power Position with EPD*

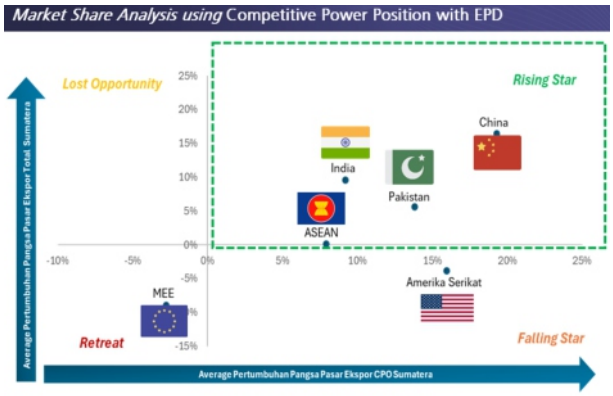

Market Share Analysis using Competitive Power Position with EPD* (Export Product Dynamic) Analysis *(Esterhuizent, 2006; Malau et al., 2022; Manalu et al., 2019)*

3) **Pengembangan Pariwisata Danau Toba sebagai Sumber Pertumbuhan Baru *(New Source of Growth)***
Pengembangan Kawasan Danau Toba sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru memerlukan penguatan orkestrasi melalui penyusunan Grand Design Jangka Panjang yang berfokus pada pariwisata berkualitas, ekonomi hijau, dan pelestarian budaya. Langkah ini ditopang oleh sinkronisasi lintas lembaga, harmonisasi RTRW, RPJMD, serta kebijakan sektoral secara terpadu.

Untuk menarik investor, kepastian berusaha ditingkatkan melalui percepatan legalisasi aset, penyederhanaan perizinan, dan penataan tata ruang. Pengembangannya juga mencakup penyusunan rencana destinasi tematik, penguatan desa wisata berbasis ekonomi kreatif dan budaya lokal, serta akselerasi proyek investasi strategis dan infrastruktur pendukung pariwisata guna mewujudkan Danau Toba sebagai destinasi kelas dunia yang memberikan *multiplier effect* luas terhadap sektor konstruksi, perdagangan, dan UMKM.

4) **Penguatan Fiskal Daerah dan Akselerasi Digitalisasi Sistem Pembayaran.**
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas belanja daerah ditempuh melalui digitalisasi keuangan dan efisiensi alokasi anggaran. Perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah didorong melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), termasuk akselerasi QRESTO *(Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization)* guna mewujudkan pembayaran pajak restoran yang cepat, transparan, otomatis, dan real-time ke kas daerah.

Selain itu, Bank Indonesia memberikan *advisory* kepada pemerintah daerah agar memprioritaskan belanja pada sektor-sektor yang memberikan *multiplier effect* tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sinergi lintas pemangku kepentingan juga diperluas melalui penguatan akseptansi QRIS, pemanfaatan satelit

SATRIA-1 untuk konektivitas daerah 3T, serta pengawasan elektronifikasi moda transportasi dan bansos nontunai.

5) **Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga melalui Kapasitas UMKM, Pertanian, dan Vokasi**
Peningkatan kesejahteraan rumah tangga didorong melalui penguatan produktivitas pelaku usaha kecil, petani, dan tenaga kerja lokal. Strategi ini mencakup perluasan program pelatihan UMKM (termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih), peningkatan kapasitas petani melalui penerapan praktik pertanian terbaik *(best agricultural practices),* serta perluasan model bisnis integrasi hulu-hilir dan hilirisasi pangan. Di sisi ketenagakerjaan, kualitas SDM ditingkatkan melalui penguatan pendidikan vokasi daerah yang selaras dengan kebutuhan industri serta optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja *(job-matching)*. Peran *local champion* sebagai *role model* dalam penerapan *best practices* serta penguatan ekonomi syariah melalui Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) turut dioptimalkan untuk mendorong kemandirian ekonomi kerakyatan secara inklusif.

6) **Memperkuat kolaborasi Bank Indonesia serta Pemerintah Daerah Melalui Langkah *Forward Looking* Pengendalian Inflasi dalam TPID dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).**
Sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah akan terus diperkuat melalui pendekatan pengendalian inflasi yang lebih *forward looking,* terintegrasi, dan berorientasi pada penguatan ketahanan pangan. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penguatan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sebagai kerangka kolaborasi dalam mengantisipasi sumber tekanan inflasi sejak dini.

Penguatan sinergi tersebut sejalan dengan agenda nasional dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan, sehingga pada akhirnya dapat mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, langkah pengendalian perlu difokuskan pada respons cepat terhadap tekanan harga dan gangguan pasokan. Sementara itu, dalam jangka menengah-panjang, pengendalian inflasi perlu diperkuat melalui peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, perbaikan tata niaga, serta peningkatan efisiensi rantai pasok pangan.

Adapun beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat ditempuh pada tahun 2026 meliputi:

a. **Keterjangkauan Harga (K1)**

Pengendalian keterjangkauan harga perlu diarahkan pada penguatan mekanisme antisipasi dan respons terhadap potensi gejolak harga pangan. Dalam hal ini, TPID perlu lebih meningkatkan pemanfaatan *Early Warning System* (EWS) sebagai instrumen untuk mengidentifikasi secara dini potensi kenaikan maupun penurunan harga komoditas pangan strategis.

Informasi yang dihasilkan melalui EWS selanjutnya perlu diintegrasikan ke dalam Protokol Manajemen Inflasi sebagai dasar penetapan langkah intervensi yang lebih terukur dan tepat waktu, termasuk pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi pasokan, maupun penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD). Optimalisasi EWS juga perlu didukung oleh penguatan kapasitas TPID di tingkat kabupaten/kota agar respons kebijakan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan sumber tekanan inflasi di masing-masing wilayah.

Dalam jangka pendek, pelaksanaan GPM perlu diperkuat melalui penyelenggaraan secara lebih masif dan terkoordinasi di seluruh kabupaten/kota, khususnya pada wilayah yang mengalami tekanan harga dan keterbatasan pasokan. Pelaksanaan GPM dapat difokuskan pada komoditas pangan strategis, antara lain beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan daging sapi, dengan penyesuaian berdasarkan perkembangan harga dan kondisi pasokan di masing-masing wilayah.

Untuk mendukung efektivitas intervensi tersebut, sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BULOG, BUMD, asosiasi, serta pemangku kepentingan lainnya perlu terus diperkuat. Dukungan Bank Indonesia diarahkan pada fasilitasi sebagian biaya penyelenggaraan operasional GPM dan subsidi ongkos angkut, terutama untuk menjangkau wilayah dengan biaya distribusi yang relatif tinggi dan keterbatasan akses pasokan.

Selain itu, percepatan penyaluran beras perlu terus didorong, khususnya melalui optimalisasi distribusi beras SPHP BULOG dan dukungan pasokan dari BUMD, dengan prioritas pada wilayah yang mengalami kenaikan harga beras yang relatif tinggi dan/atau mengalami defisit pasokan.

Selain itu, koordinasi pengawasan harga dan pasokan perlu terus diperkuat melalui sinergi TPID dengan Satgas Pangan dan instansi terkait. Pengawasan tersebut mencakup pemantauan perkembangan harga dan ketersediaan pasokan, pencegahan praktik penimbunan, serta pengawasan terhadap kualitas dan kelayakan pangan yang diperdagangkan. Pengawasan juga perlu diperkuat melalui inspeksi pada pasar, kilang atau penggilingan, pengawasan produk pangan tertentu, serta pemeriksaan terhadap kesesuaian berat dan kualitas produk.

b. Ketersediaan Pasokan (K2)

Dalam menjaga kesinambungan pasokan pangan, TPID bersama Bank Indonesia terus memperkuat langkah antisipatif dari sisi hulu hingga hilir. Upaya tersebut antara lain melalui penguatan KAD untuk komoditas strategis, khususnya sapi dan hortikultura dari wilayah Balinusra dan Jawa, sebagai langkah *forward looking* dalam mengantisipasi potensi keterbatasan pasokan dan tekanan harga di masa mendatang.

Di sisi produksi, TPID dan BI Sumatera Utara akan melaksanakan *Pilot Project* peningkatan produktivitas melalui penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP)-PI KEKDA yang berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, Dinas PUPR, dan Universitas Sumatera Utara. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan sektor pertanian terhadap risiko kemarau panjang dan perubahan iklim, termasuk melalui pengembangan benih hortikultura tahan cuaca ekstrem, penerapan pola budidaya berbasis karakteristik agroklimat, serta penguatan dukungan irigasi dan sarana produksi. Penguatan kapasitas petani juga didukung melalui sekolah lapang iklim dan pelatihan bagi Gapoktan di sentra produksi.

Selanjutnya, penguatan kelembagaan petani dan rantai nilai pangan terus didorong dengan memperkuat peran kelompok tani, Gapoktan, koperasi, BUMD/Perumda/Perseroda, dan kelembagaan usaha lainnya sebagai agregator maupun *offtaker.* Penguatan tersebut dapat diintegrasikan dengan pengembangan contract farming, perluasan akses pembiayaan, serta kepastian penyerapan hasil produksi guna meningkatkan kepastian pasar dan keberlanjutan usaha tani.

Upaya tersebut juga dilengkapi dengan perluasan cakupan asuransi pertanian serta penguatan sarana dan prasarana pascapanen dan penyimpanan, termasuk *cold storage* untuk mengurangi kehilangan hasil dan memperpanjang masa simpan produk pertanian.

Selain itu, TPID bersama KPPG Medan terus mendorong kemitraan SPPG dengan produsen dan pemasok utama di Sumatera Utara, serta penggunaan bahan pangan yang sesuai standar kualitas dan ramah inflasi melalui penyusunan *master gizi* dan *master menu* MBG.

c. Kelancaran Distribusi (K3)

TPID terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan distribusi pangan akibat cuaca ekstrem, bencana, lonjakan permintaan musiman, dan keterbatasan pasokan dari daerah sumber. Dalam jangka menengah-panjang, penguatan ketahanan distribusi dilakukan melalui percepatan rehabilitasi infrastruktur pertanian, khususnya jaringan irigasi terdampak bencana, serta pengembangan pompanisasi dan konservasi air untuk menjaga keberlanjutan produksi.

Dukungan juga diberikan melalui penyaluran alsintan dan penguatan kapasitas petani pada wilayah yang masih memiliki potensi produksi. Di sisi tata niaga, pengembangan dan replikasi model Sub Terminal Agribisnis (STA), penguatan Toko Pantau Inflasi (TOPIS), serta fasilitasi business matching antara pedagang, Gapoktan, dan kelompok tani terus didorong untuk memperpendek rantai distribusi dan memperkuat konektivitas antara sentra produksi dan pasar.

Selanjutnya, pemantauan arus masuk dan keluar komoditas pangan di pasar utama terus diperkuat sebagai basis penyempurnaan EWS dan penetapan intervensi, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan KAD, apabila terjadi gangguan pasokan. Penguatan tersebut didukung melalui sinkronisasi data harga antarinstansi dan antarplatform, termasuk SP2KP dan SIHARAPANKU, guna meningkatkan kualitas analisis dan mempercepat pengambilan kebijakan pengendalian inflasi secara tepat sasaran.

d. **Komunikasi Efektif (K4)**

TPID terus memperkuat komunikasi dan koordinasi pengendalian inflasi melalui diseminasi perkembangan harga dan pasokan, sosialisasi, serta kampanye Belanja Bijak untuk menjaga ekspektasi inflasi dan mendorong pola konsumsi yang rasional. Penguatan koordinasi antarinstansi juga dilakukan melalui kejelasan peran dan penerapan Protokol Manajemen Inflasi sebagai acuan dalam menetapkan respons berdasarkan sumber tekanan yang teridentifikasi melalui EWS, sehingga berbagai intervensi seperti GPM, fasilitasi pasokan, KAD, dan penguatan distribusi dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Selain itu, TPID bersama KPPG Medan berkolaborasi dalam pengembangan sistem informasi katalog belanja yang menghubungkan SPPG sebagai pembeli dengan *supplier*/produsen sebagai penjual, serta dilengkapi *master gizi* dan menu untuk mendukung stabilitas harga dan kelancaran operasional MBG. Secara keseluruhan, penguatan komunikasi dan koordinasi diharapkan dapat mendukung langkah pengendalian inflasi yang responsif dalam jangka pendek sekaligus memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Daftar Istilah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
***Berth Occupancy Ratio* (BOR)**	Perbandingan antara waktu penggunaan dermaga dengan waktu yang tersedia dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase.
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana Alokasi Umum (DAU)	Merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang dihimpun perbankan dari masyarakat, yang berupa giro, tabungan atau deposito.
Dwelling Time	Total waktu yang dibutuhkan peti kemas selama di pelabuhan. Waktu yang dihitung mulai dari suatu petikemas (container) dibongkar dan diangkat (unloading) dari kapal sampai petikemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama.
Ekspor-Impor	Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persistent).
Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI)	Proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mendorong ekonomi hijau dan transisi energi.
Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)	Laporan yang berisi informasi yang disusun dan disampaikan oleh bank pelapor kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh otoritas.

Loan to Deposit Ratio (LDR)	Adalah rasio antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap dana yang dihimpun (giro, tabungan dan deposito).
Month to month (mtm)	Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
Makanan Bergizi Gratis (MBG)	Program pemerintah untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada masyarakat.
Non Performing Loan (NPL)	Kredit/pembiayaan yang bermasalah atau non-lancar yang terdiri dari kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan nilai PDRB atas harga konstan dalam suatu periode tertentu (triwulanan atau tahunan).
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
Purchasing Managers Index (PMI)	Merupakan indeks gabungan dari berbagai indikator bertujuan untuk mengukur tingkat produksi, mendeteksi tekanan inflasi dan aktivitas perindustrian.
Quarter to quarter (qtq)	Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)	Rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi di daerahnya. TPID berfungsi untuk memonitor dan menganalisis pergerakan harga di pasar, serta melakukan tindakan-tindakan preventif dan korektif untuk mengendalikan inflasi
Year on year (yoy)	Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Tim Penyusun

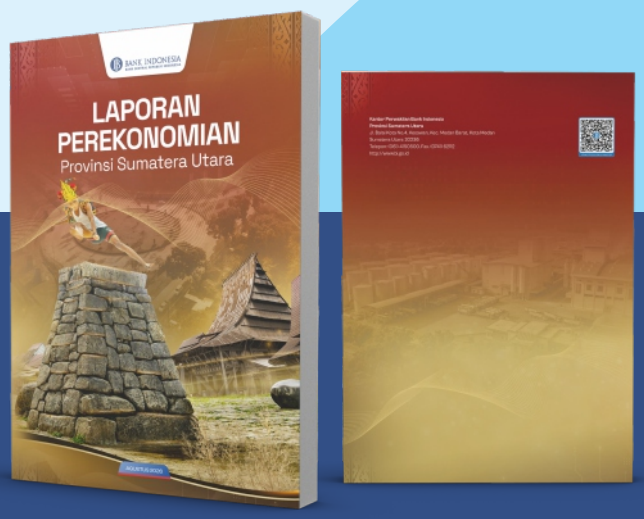

Pengarah

Ameriza M. Moesa
Iman Gunadi
Didit Widiana
Riza Putera
Ahmadi Rahman

Editor

Koordinator Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi:

Abdul Khalim

Kontributor

Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi:

Tutut Tiana
Hasudungan Paulanka Siburian
Yulian Zifar Ayustira
Ade Laide Debora
Ruth Inora Panjaitan
Dwi Febby Multiretno
Ajeng Ardhia Arya Kusuma Putri
Chatherine Nathasya Agnes Tobing
Adela Khairunnisa Nugraha
Muhammad Reihan Davie
Joe Van Lodi Purba
Dina Mariana Lubis
Nico Bayu Gilbert Siahaan
Mayumi Wijaya
Deborah Thianujaya
Devlin Halomoan Simanihuruk

Unit Implementasi Pengembangan IEKB & EKSYAR:

Muhammad Ikhroni

Divisi Implementasi SP, Pengawasan SP, PUR & PK:

Angsoka Yorintha Paundralingga
Jervis Dongara Pongsoda
Annisa Nur Rahmawati
Fadia Maghfirazmi Putri

Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Sumatera Utara
Jl. Balai Kota No.4, Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan
Sumatera Utara 20236
Telepon: (061) 4150500, Fax. (0741) 62112
http://www.bi.go.id

e-Book LPP dapat diakses melalui QR.